Membumikan
Ahlus Sunnah wal Jama'ah
Menjaga
Lingkungan Hidup
PMII

MEMBUMIKAN

AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH

DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP

PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
2022

MEMBUMIKAN
AHLUSUNNAH WAL JAMA'AH
DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP

Penulis: (PB PMII)

Muhammad Abdullah Syukri, Panji Sukma Nugraha, Hasnu Ibrahim, Robiatul Adawiyah, Ragil Setyo Cahyono, Andra Imam Putra Graha, Suhaimi Alwi, Aji Fadil Hidayatullah, Ahmad Safrudin, Siti Aminataz Zuhriyah, Ade Opa Musthofa, Imron Wasi, Dwi Putri, Tiara Lestari

Penerbit:

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Jalan Salemba Tengah No. 57 A RT/10 RW/08 Paseban Senen Jakarta Pusat 10440
Email: pb@pmii.id
Website: www.pmii.id
0812-8393-1565

Membumikan Ahlusunnah Wal Jama'ah
dalam Menjaga Lingkungan Hidup

ISBN:

Desain Sampul: Zulfikri Albukhori
Layout: Alwy Jaelani

Penulis:
Muhammad Abdullah Syukri, Panji Sukma Nugraha, Hasnu Ibrahim, Robiatul Adawiyah, Ragil Setyo Cahyono, Andra Imam Putra Graha, Suhaimi Alwi, Aji Hidayatullah, Ahmad Safrudin, Siti Aminataz Zuhriyah, Ade Opa Musthofa, Imron Wasi, Dwi Putri, Tiara Lestari

Cetakan Pertama, April 2022

Penerbit:
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Jalan Salemba Tengah No. 57 A RT/10 RW/08 Paseban Senen Jakarta Pusat 10440
Email: pb@pmii.id
Website: www.pmii.id
0812-8393-1565

KATA PENGANTAR

Rahmat Hidayat Pulungan

(Wasekjend PBNU)

Menjelang Harlah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke 62, memberikan kepemahaman kepada kita bahwa umur pergerakan bukan lagi angka yang kecil. Ini artinya apa yang kita berikan kepada PMII sebagai bakti pergerakan menjadi sebuah refleksi sejauh mana pengabdian kita terhadap pergerakan. Mengingat bahwa sekarang ini kita tengah berhadapan dengan era disrupsi, yakni dimana segala potensi, segala peluang, segala tantangan harus terkonsep secara matang.

Dalam pengantar ini, saya sangat mengapresiasi Pengurus Besar (PB) PMII 2021-2024 yang secara tidak langsung dengan adanya launching buku ini, setidaknya PB PMII mampu memetakan tantangan dan juga peluang dalam perkembangan isu-isu pemerintahan. Terlebih, soal isu pemindahan Ibu Kota Negara yang sedang di garap. Tentu Membumikan Aswaja dalam Menjaga Lingkungan Hidup kiranya dinilai cukup penting di dalam diri kader.

Dalam seluruh proses itu, saya melihat perkembangan yang baik dalam membuat konsep lingkungan hidup. Hal ini terbukti dengan adanya tulisan-tulisan yang saya anggap

cukup matang dalam melihat problematika dari dua sisi. Buku *Membumikan Aswaja dalam Menjaga Lingkungan Hidup kiranya dinilai cukup penting di dalam diri kader* ini memberikan ilmu baru dan wawasan baru bagi seluruh kader Nusantara. Harapanya mereka mampu menangkap point penting di dalam setiap tulisan yang tertera dalam buku ini. Lebih lanjut lagi, ketika harapan- harapan ini muncul maka tidak hanya soal gagasan semata. Akan tetapi, saya yakin hal ini akan menjadi langkah awal membumikan Ahlusunnah Wal Jama'ah dimana dan kapanpun itu.

Buku yang disusun oleh PB PMII 2021-2024 menjadi salah satu naskah penting dalam merumuskan perkembangan ibu kota negara dengan berbagai isu pemerintahan. Selama ini, PMII yang notabene menjadi bagian dari NU secara umum memang sangat miskin gagasan, mereka lebih aktif dalam mengonsumsi dan pasif dalam gerakan. Mau tidak mau, kita harus mengiyakan bahwa benar adanya bahwa PMII masih kalah tertinggal dengan yang lainnya. Akan tetapi, di momentum Harlah kali ini, saya melihat PMII selangkah lebih maju dalam mengambil peran. Seperti halnya pembuatan Naskah buku ini menjadi langkah awal PB PMII dalam membuat tantangan-tantangan di era disrupsi. Tidak cukup disini saja, PB PMII sudah seharusnya mampu mengambil peran disetiap isu-isu yang terjadi di masa sekarang ini dan mendatang.

Sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas diterbitnya buku ini serta selamat Harlah PMII ke 62. Semoga PMII

semakin keren dan Mendunia menciptakan peluang dalam menjawab tantangan. Tidak hanya itu, PMII harus terus melakukan kerja-kerja kolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan dan juga peluang nyata.

Selamat Membaca!

Rahmat Hidayat Pulungan

(Wasekjend PBNU)

KATA PENGANTAR MOH. HAERUL AMRI (KOMISI X DPR RI)

Manusia dan lingkungan hidup sejatinya memiliki hubungan timbal balik. Keberhasilan dan kelestarian lingkungan sangat berpengaruh pada tingkat kepedulian serta perhatian masyarakat. Karena lingkungan merupakan tanggung jawab manusia dalam hal menjaga dan mengembangkannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksadaran masyarakat terhadap lingkungan: faktor ketidaktahuan, faktor kemiskinan, faktor kemanusiaan, faktor gaya hidup.

Dalam masyarakat awam pada umumnya kadang Islam dan lingkungan dianggap dua hal yang berbeda, tetapi ketika ditelusuri kembali lagi ternyata Islam dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Seperti dalam Al-Qur'an Allah SWT secara terang dan jelas menerangkan bahwa manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut jangan sampai membuat kerusakan lingkungan.

Agama secara implisit mengajarkan kepada umat beragama untuk mengetahui dan menyadari pentingnya menjaga lingkungan sehari-hari. Karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya memberi dampak buruk jangka panjang diri manusia itu sendiri.

Di sisi lain, krisis lingkungan atau yang dikenal sebagai krisis ekologi semakin hari semakin meluas. Hal ini menuntut kepedulian kita selaku manusia yang mengemban peran sebagai khalifah di bumi untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah kerusakan lingkungan yang lebih massif. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa dukungan dari berbagai sumber daya yang ada di lingkungannya. Namun, kesadaran akan pentingnya melestarikan dan melindungi alam dinilai masih kurang. Pendidikan lingkungan hidup diharapkan dapat menjadi suatu wahana untuk mengedukasi masyarakat umumnya dan peserta didik pada khususnya untuk lebih memahami fenomena krisis lingkungan global dan menumbuhkan sikap untuk lebih peduli pada lingkungan, dengan menginternalisasikan nilai-nilai agama.

Membangun semangat keagamaan berbasis ekologis harus dilakukan secara serentak dan berkelanjutan pada semua level dan komposisi masyarakat khususnya ummat Islam, mengingat bahwa krisis ekologi itu berdampak universal. Memahamkan kembali peran manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga dan mengelola alam serta konsekuensi dari merusak lingkungan ditinjau dari perspektif

Islam diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga, mengelola secara bijaksana dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya.

Dalam pandangan Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan atau relasi yang sangat erat. Konsep ekologi telah dikembangkan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup serta interaksi berbagai komponen di dalamnya.

Pada hakekatnya, alam dan seluruh isinya mempunyai fungsi dan manfaat dalam kehidupan dunia ini seperti ditegaskan Allah dalam Surat Ar Rahman ayat 10: “Dan Dia telah menghamparkan bumi untuk semua makhluk-Nya”

Maka Allah menciptakan makhluk hidup yang terdiri dari manusia, binatang, dan tumbuhan sebagai serangkaian ekologi dan membentuk suatu ekosistem yang saling mempengaruhi untuk keberlangsungan hidupnya. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Gangguan terhadap salah satu komponen lingkungan akan mengubah keseimbangan sehingga dapat mempengaruhi komponen lingkungan yang lain.

Sebagai implikasinya penanganan problem lingkungan hidup mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak, terutama ulama’, pemerintah, dan masyarakat. Kewajiban-kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkunga secara

lestari. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis suatu ekosistem yang didukung oleh fungsi ekologis yang masing-masing komponennya secara wajar berfungsi sehingga memiliki daya dukung lingkungan yang optimum. Keseimbangan ekosistem dalam arti luas meliputi segala gerak dinamika kehidupan, baik dalam dunia fisik maupun sosial.

Buku Membumikan Ahlusunnah Wal Jamaah dalam Menjaga Lingkungan Hidup ini secara gamblang memberikan gambaran bahwa manusia tidak cukup hanya beradaptasi secara fisik *(survival of the fittest)* seperti makhluk hidup lain, melainkan juga beradaptasi secara jiwa *(suvival of the wisest*). Dengan begitu manusia dapat hidup secara bijak dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dengan kebijaksanaannya, manusia akan bisa memanfaatkan pengetahuan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat juga lingkungan alam disekitarnya.

Mahasiswa sudah seharusnya memaksimalkan perannya dalam melaksanakan Hablumminal Alam, hal tersbut dapat kita amati dalam buku ini, di mana kader-kader PMII sebagai mahasiswa tidak melupakan tanggungjawabnya dalam menumbuhkan spirit pelestarian untuk menjaga alam. Sebagai mahasiswa yang tumbuh besar berdampingan dengan alam sudah selayaknya terus memompa kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam bersikap terhadap alam.

Buku ini cukup relevan untuk dibaca sebagai inspirasi bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya dalam

rangka menjawab dan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul seiring pesatnya kemajuan zaman terhadap lingkungan

Moh. Haerul Amri

(Komisi X DPR RI)

DAFTAR ISI

KITAB VI: Rekomendasi

KITAB I

Historis Aswaja dan Ajaran-Ajaran Aswaja

ALGERIEN
LIBYEN
NIGER
NIGERIA
TSCHAD
SUDAN
SAUDI
ARABIEN
ATLANTISCHER
OZEAN
OZEAN

Pengantar

ASWAJA atau yang sering disebut sebagai Ahlussunnah wal Jama'ah dapat dimaknai sebagai salah satu aliran dari berbagai aliran yang ada dalam dunia Islam. Pada saat yang sama, Ahlussunah wal Jama'aah ini juga dapat dikatakan sebagai suatu gabungan dari kata *ahl ahs-sunnah* dan *al-jama'ah*. Pada dasarnya, istilah dari aswaja ini belum dikenal pada zaman pemimpin revolusioner yang sangat mulia, Shalli ala Nabi Muhammad Saw., bahkan setelah pemimpin umat ini 'dipanggil' oleh Allah Swt., istilah dari aswaja ini belum terlalu sistemik dikenal oleh khalayak publik, terutama oleh berbagai kelompok Islam dan umat.

Dengan kata lain, term dari aswaja ini juga belum dikenali saat kepemimpinan para sahabat-sahabat nabi, yang seringkali dikenal sebagai pemerintahan Khulafa ar-Rasyidun, yang mencakup beberapa sahabat-sahabat nabi, yakni: Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, setelah roda kepemimpinan beralih dari para Khulafa ar-Rasyidun ini, juga belum terlalu dikenali. Bahkan, terkonfirmasi ketika pemerintahan Bani Umayyah.

Kemudian, paham atau istilah Ahlussunnah wal Jama'ah baru dipakai atau digunakan term ini saat pada masa pemerintahan Khalifah Abu Jafar al-Manshur dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kedua pemimpin ini merupakan representasi dari kelompok atau pemerintahan Dinasti Abasiyah. Dalam beberapa literatur, misalnya, *ahl as-sunnah* ini juga kerap diasosiasikan dengan kelompok Sunni; dan dapat diklasifikasikan menjadi dua hal, dalam konteks umum dan khusus. Dalam pengertian umum, misalnya, Sunni adalah lawan kelompok Syi'ah.

Dalam hal ini, Mu'tazilah sebagaimana Asy-ariyah masuk dalam kelompok Sunni. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih khusus, misalnya, mengandaikan bahwa mazhab yang berada dalam rule Asy-ariyah ini merupakan lawan dari Mu'tazilah. Menurut perspektif Munawir[1], pengertian yang kedua inilah yang dipakai dalam diskursus ini.

A. Definisi Aswaja

Meminjam istilah Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, M.A, dalam studinya[2], seperti yang telah dinyatakannya, seperti Ahlussunnah wal Jama'ah adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleransi. Tak hanhya itu, secara etimologi, Ahlussunnah wal Jama'ah berasal dari bahasa

1 Munawir, *Kajian Hadis Dua Mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (STAIN Press). Hal. 1

2 Said Aqil Siraj, *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1997).

Arab, yakni, ahlu, as-sunnah dan al-jama'ah. Ahl, dapat dimaknai sebagai ashab al-mazhab, yaitu pemilik aliran atau pengikut mazhab.

Dengan demikian, definisi dari aswaja adalah sesuatu jalan atau wahana para sahabat Nabi dan Tabi'in. pada saat yang sama, al'jamaah adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Meski demikian, pandangan dalam konteks terminologi misalnya, aswaja ini berarti penganut sunnah dan mayoritas umat adalah mayoritas sahabat Nabi Muhammad Saw,. Sementara itu, dalam uraian Dhofier (1982: 148)[3], mengemukakan bahwa Ahlu Sunnah wal Jama'ah, adalah para pengikut tradisi Nabi Muhammad SAW dan ijma' ulama.

Hal ini tentunya sangat relevan dengan risalah yang ditekuni dan diaplikasikan oleh pengikut atau jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang sering kita dengar dan lihat secara kasat mata, bagaimana tradisi dan mengikuti ijma' ulama. Oleh karena itu, Ahlu Sunnah wal Jama'ah, sangat baik diterapkan untuk menciptakan sebuah sistem yang ideal. Sehingga, akan tercapai suatu tatanan pemerintahan yang baik, yang memegang prinsip *clean government and good governance.*

Di samping itu, paham Ahlu Sunnah wal Jama'ah ini juga sangat kentara dalam setiap kurikulum pendidikan dan pelatiahan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama, seperti, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan termasuk merambah pada

3 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kya* (Jakarta: LP3ES, 1982).

organisasi kemahasiswaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Oleh karena itu, dalam menjawab dan merespons segala tantangan global, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) turut hadir dan mempunyai mekanisme yang apik dalam menguraikan berbagai permasalahan kebangsaan dan keagamaan.

Namun, apakah di tengah sebuah arus globalisasi yang maha dahsyat ini akan terkikis secara perlahan atau justru semakin menunjukkan eksistensinya di ruang publik? Dalam konteks ini, sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Kasali (2018) bahwa saat ini kita sedang berada dalam sebuah era, yang disebutnya sebagai era *disruption*.[4] Artinya, di tengah berbagai dinamika dan polemik yang menyertai perkembangan masa depan, sudah seharusnya bersikap secara responsif terhadap kemajuan ini, agar tidak tertinggal.

Kendati demikian, berbagai prinsip ini secara praksis riil diaktualisasikan oleh setiap anggota dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang tercermin pada prinsip dasar, yaitu: *tawasuth, tawazun, ta'adul*, dan *tasamuth* atau dalam pengertian lain dikenal sebagai moderat, seimbang, netral dan toleran.

Dalam bahasa lain, dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, warga masyarakat kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia secara global selalu memegang prinsip ini sebagai landasan dalam melakukan

4 Rhenald Kasali, *Self Disruption: Bagaimana Perusahaan Keluar Dari Perangkat Masa Lalu Dan Mendisrupsi Dirinya Menjadi Perusahaan Yang Sehat* (Jakarta Selatan: Mizan, 2018).

interaksi sosial kebangsaan dan keagamaan. Jadi, sebagai warga masyarakat, anggota dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini dituntut untuk mampu beradaptasi dan mampu memafhumi nilai-nilai yang sesuai dengan Nilai Dasar Pergerakan dan prinsip Ahlu Sunnah wal Jama'ah.

Kemudian dalam berbagai literatur lainnya, sebagaimana yang sudah dilegitimasi oleh al-qur'an sedari awal bahwa umat Nabi Muhammad Saw., adalah ummat yang *wasath,* suatu ummat pertengahan yang adil.[5] Dengan demikian, setiap harakah dari anggota dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam paham Ahlu Sunnah wal Jama'ah.

Lalu, dalam mengambil suatu keputusan, misalnya, tentunya akan dilakukan secara musyawarah dan mengutamakan kepentingan publik (umat). Dalam konteks ini, pengambilan keputusan yang diambil juga dilandasi oleh kebijaksanaan yang koheren dengan paham Ahlu Sunnah wal Jama'ah agar sesuai rule model atau *blue prin*. Akibatnya, mendapatkan segala keberkahan dari Allah Swt. Selain itu, dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang tertuang dalam NDP, misalnya setiap anggota dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia harus dapat mengamalkannya secara inheren. Karena, anggota dan kader PMII ini dikenal sebagai generasi muda muslim. Dalam bahasa lain, sebagai generasi muda muslim, anggota dan kader PMII harus

5 Lih. Q.S Al-Baqarah, 2: 143)

mampu beradaptasi secara cepat dalam merespons berbagai hal, termasuk perkembangan digitalisasi.

Sementara itu, dalam konteks lainnya, misalnya, sebagai anggota dan kader yang juga disebut sebagai pembela bangsa dan penegak agama ini juga harus aktif mengawal isu-isu nasional maupun lokal. Artinya selalu memimpin dan memprakarsasi berbagai tema keputusan politik minimal secara gradual agar menjadi kompas bagi pemuda maupun mahasiswa yang lainnya. Tak hanya itu, sudah selayaknya sebagai mahasiswa dan pemuda yang memiliki peran sangat signifikan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara ini perlu memerhatikan berbagai isu-isu aktual, termasuk merespons isu-isu lingkungan, misalnya. Karena, selama ini warga pergerakan hanya terfokus pada satu sektor saja, sedangkan sektor yang lainnya teralienasi dari diskursus ini.

Dalam kaitan tersebut, bahkan secara eksplisit sangat relevan dengan nilai-nilai yang ada dalam Nilai Dasar Pergerakan yang mana memuat relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan yang terakhir bagaimana upaya menjaga kohesivitas dengan alam. Dengan demikian, menjaga ekosistem alam artinya kita sedang menjaga peradaban. Di tengah arus modernisasi saat ini, tentunya dalam menjaga iklim alam ini tentu membutuhkan perhatian bersama, agar sebagai warga pergerakan kita dapat menjaga alam ini dengan baik. Pada saat yang sama, alam terjaga sudah barang tentu akan berimplikasi terhadap kualitas tumbuhan, hewan, dan seterusnya.

Hal ini bisa dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai elemen. Pasalnya, untuk menjaga ekosistem peradaban tidak bisa dilakukan secara personal. Tapi, bisa dimulai dari diri sendiri, yang sewaktu-waktu harakah tersebut juga bisa menciptakan *trigger* bagi anggota, kader atau bahkan sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran personal baik secara kesalehan sosial maupun spiritual sebelum dapat menyadarkan kesadara publik secara umum. Dengan menjaga lingkungan dan menjaga peradaban, secara perlahan kita mulai menerapkan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam spirit dasar pergerakan.

Pada dasarnya, selama ini, memang belum berjalan secara maksimal. Akan tetapi, secara gradual dan intensif, hal ini juga seyogyanya perlu direfleksikan kembali, agar sebagai warga pergerakan tidak hanya fokus pada satu sektor atau bidang tertentu saja. Anggota dan kader PMII harus ambil peran di mana pun berada. Oleh karena itu, tingkatkan kemampuan, mempertajam pemikiran, dan menjaga komunikasi dengan baik dengan siapa pun. Artinya, di era disruption ini kita perlu melakukan kolaborasi di antara berbagai elemen, agar cita-cita dapat segera terwujud dengan baik.

B. Sejarah dan Dinamika Perkembangan Aswaja di Indonesia

Sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, bahwa Sunni juga dikenal sebagai madzhab Islam atau dalam aliran Islam yang eksis dan dominan secara historis. Oleh karena

itu, secara historis tentu berbicara perkembangan dinamika aswaja tentu sangat komprehensif sekali. Dengan demikian, uraian ini akan mencoba membatasi dalam ruang lingkup diskursus dinamika perkembangan aswaja di Indonesia.

Semula, hal ini dimulai saat perdagangan antara warga pribumi dan para saudagar yang berasal dari Arab, Persia, India, dan Cina. Dalam kerangka ini kaum Sayid yang berasal dari Hadramaut (Hadrami) mengambil peran penting dalam membangun model keberagamaan penduduk nusantara, karena selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam dan membangun tradisi. Mereka ini umumnya menganut madzhab Syafi'i dan mendominasi corak keIslaman pesisir Samudera Hindia (Alatas, 2010: xxxi).

Dalam studi *scholar*, misalnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ismail (2004: 131-134) bahwa paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah di kalangan NU juga sudah tidak lagisempit, isolatif, tertutup apalagi ekslusif, melainkan telah menjadi "faham terbuka" yang harus menerima pikiran-pikiran dari luar yang mengayakan.[6] Lebih lanjut, organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal juga sebagai kompas aswaja di Indonesia ini telah berupaya agar tidak terlalu *concern* terhadap perkembangan politik praktis. Artinya, lebih mengutamakan harakah dalam berbagai sektor yang sangat esensial, seperti harakah sosial-keagamaan dan seterusnya. Karena, ketika organisasi kemasyarakat yang

6 Faisal Ismail, *Islam and Pancasila: Indonesia Politics 1945-1995* (Jakarta: alitbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2001).

berbasis keagamaan, seperti NU, hanya fokus pada pola politik praktis, tentu hal ini mengandaikan absennya dalam sejumlah gerakan sosial.

Sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan, Nahdlatul Ulama tentunya memiliki berbagai prospek yang hendak akan dicapai, termasuk yang berada dalam *circle* yang sama seperti GP Ansor, IPNU, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam mengembangan organisasi yang modern, kohesif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan peradaban kontemporer. Jadi, dibutuhkan akselerasi yang signifikan untuk mengaktualisasikan risalah-risalah aswaja ini di berbagai sektor, dalam konteks mahasiswa, tentunya risalah-risalah ini juga harus mampu mengeksplorasi kebutuhan yang diharapkan oleh para mahasiswa secara mutakhir.

Bahkan, menurut *scholar* yang sama, dalam perkembangan pemikiran keagamaan, kedua kelompok ini telah menerima Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat final.[7]

Secara historis, aswaja ini dalam konteks Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga dapat dikatakan sebagai metode berfikir *(manhaj al-fikr)* dan metode bergerak *(manjah al-harakah).* Di tengah aktivitas pertarungan ideologi yang semakin massif, dibutuhkan komitmen bersama dalam menciptakan *mutual understanding, mutual trust, dan mutual commitment* dalam mewujudkan prinsip dan nilai-

7 Ibid.

nilai yang terkandung dalam aswaja. Dalam setiap rezim pemerintahan di Indonesia, aswaja tentu memiliki peranan yang signifikan dalam menciptakan stabilitas kebangsaan, komit terhadap pembangunan, terutama bagaimana dapat mengikis kesenjangan. Artinya, dapat merambah kepada elemen kesejahteraan bagi warga masyarakat.

Tak hanya itu, dalam perkembangannya, muncul berbagai gerakan radikalisme, terorisme, dan seterusnya yang sewaktu-waktu dapat mengganggu stabilitas sosio-politik di Indonesia. Dengan demikian, hal ini memerlukan berbagai langkah cepat dan tepat, seperti, langkah preventif agar tidak terjadi gerakan-gerakan tersebut.

C. Rekonstruksi Pemikiran Aswaja Kontemporer

Sebagai suatu metode berpikir dan metode bergerak, aswaja tentunya memiliki berbagai *opportunity* dan hambatan dalam proses transmisi risalah ini dalam ruang publik, termasuk bagaimana menghadapi paham aswaja ini di tengah terisolasinya dari ruang publik secara perlahan.

Akibatnya, publik tidak memiliki pedoman yang *ajeg* dalam menajalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, paham aswaja mendapatkan *preassure* yang luar biasa, baik dari intern maupun ekstern. Oleh karena itu, agar tetap eksis di tengah hegemoni isme-isme lainnya, maka diperlukan suatu sikap yang konsisten dan persisten dalam mengemban tugas mulia untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini.

Dengan demikian, dibutukan rekonstruksi dalam memahami aswaja dalam konteks perkembangan kontemporer saat ini. Dengan kata lain, anggota dan/atau kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia secara sadar harus mampu melakukan kontemplasi terhadap pemikiran-pemikiran aswaja an-nahdliyah agar mampu merespons segala sesuatu dengan cepat. Ahlus sunnah wal Jama'ah ini muncul dalam sejarah pemikiran dan harakah Islam sebagai jalan tengah, karena sejumlah paradigma, metode berpikir, dan metode bergerak yang dipergunakan berdasarkan realitas empirik dengan bimbingan wahyu.

Sebagai aktor pemerintahan, pemerintah, kelompok Islam, dan *Civil Society Organization (CSO)* yang berbasis Islam juga semestinya dapat menanamkan nilai-nilai ini secara ekstensif kepada khalayak publik, terutama kepada para generasi penerus bangsa, yakni anggota dan/atau kader Pergerakan Mahasiswa Islam dalam konteks ini. Agar terjadi regenerasi secara pemikiran atau bahkan ada kebaruan dalam merespons berbagai upaya dinamika yang terjadi dalam suatu bangsa-negara *(nation-state).* Bahkan, apabila kita tilik dalam konteks *the way of life* Indonesia, yaitu Pancasila juga sangat kentara dengan nuansa nilai-nilai musyawarah, menghormati dan menghargai sesama.

Hal ini juga terafirmasi dari Nilai Dasar Pergerakan (NDP) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang sangat menghormati berbagai makhluk yang ada di alam kosmik ini, termasuk bagaimana melakukan interaksi dengan

manusia, alam, dan dengan Sang Pencipta. Sebagai bagian dari makhluk Allah Swt., semua komponen ini harus taat dan tunduk terhadap perintah dan segala larangan serta aturan lain-Nya.

D. Dinamika dan Tantangan Islam di Indonesia

Secara umum, Indonesia sangat dikenal sebagai sebuah negara-bangsa *(nation-state)* Muslim terbesar di dunia. Dalam bahasa lain, penduduk di Indonesia secara mayoritas ini didominasi oleh penduduk yang beragama Islam, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam konstitusi sebagai negara agama.

Terlepas dari argumen-argumen intelektual sebagian besar rakyat dalam memahami ajaran Islam, baik karena faktor sejarah ataupun kultural, Islam di Indonesia adalah suatu agama yang hidup dan keberadaannya secara substansial sangatlah dibutuhkan, bahkan di satu sisi, seringkali terlibat dalam proses pembangunan kebangsaan, yang kini sedang terlibat dalam proses tranformasi dari posisi kuantitas ke posisi kualitas. Dengan kata lain, Islamisasi di Indonesia bukanlah suatu produk sejarah yang telah rampung, tetapi merupakan proses yang sistemik.

Namun demikian, keberadaanya belum mampu menghiasi peta ruang publik *(public sphere).* Bahkan, hanya dijadikan sebagai objek dalam pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari belum maksimalnya peran yang dilakukan, dan justru terjerembab pada simbolisasi semata atau pada hal yang remeh. Padahal, banyak sekali hal ihwal yang

perlu dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan *(sustainable development).* Dalam kaitan tersebut, menurut Ahmad Syafii Ma'arif, mendedahkan bahwa Islamisasi di Indonesia bukanlah suatu produk sejarah yang telah rampung, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan.[8] Dalam dinamika ini juga terjadi perkembangan yang cukup signifikan di satu sisi, dengan merambahnya berbagai *Civil Society Organization (CSO)* yang berasaskan Islam dan munculnya kehadiran cendekiawan-cendekiawan muslim.

Dalam pandangan Ahmad W, misalnya, mengatakan bahwa salah satu hal yang menonjol adalah munculnya fenomena cendekiawan muslim dan organisasi Islam. Menurutnya, ada beberapa hal yang melandasi adanya kelompok ini, yakni:

a. Makin dirasa pentingnya peran cendekiawan dalam tahapan pembangunan nasional dewasa ini, dengan demikian posisi cendekiawan makin diperhitungkan dibanding masa-masa lampau;
b. Timbulnya kesadaran baru di kalangan cendekiawan Muslim sendiri, kesadaran untuk mengaktualkan potensinya ditengah-tengah keterbelakngan dan ketinggalan ummat; dan
c. Adanya pergeseran atensi (harapan, kepercayaan, minat, perhatian) masyarakat dan pemerintah dari kekuatan sosial politik praktis ke kekuatan-kekuatan

8 Ahmad Syafii Maarif, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante: Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985).

sosial lain, yang diharapkan dapat menunjang kepentingannya.[9]

Dengan kehadiran berbagai kelompok cendekiawan dan organisasi masyarakat yang berbasis Islam diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dalam berbagai sektor dan mampu berperan menjadi aktor utama. Dengan kata lain, seyogianya umat Islam harus selalu memimpin dalam berbagai isu, termasuk dalam pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi, secara praksis riil justru tampaknya kelompok Islam *bak* tanpa memiliki pemimpin yang dapat dijadikan rule model. Akibatnya, umat terseok-seok di aras *grassroots*. Dengan kata lain, umat terseok-seok di tengah samudera dengan derasnya ancaman ombak yang sewaktu-waktu bisa membuatnya karam, karena kehilangan kompas, tidak tahu arah langkah.

Dan, sudah seharusnya dengan kehadiran cendekiawan-cendekiawan muslim dan berbagai organisasi masyarakat yang berbasis Islam ini turut andil memberikan pemahaman kepada publik. Pada saat yang sama, sebagai anggota dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga harus dapat terlibat secara proaktif untuk menciptakan kohesivitas yang ideal.

Meminjam istilah Kuntowijoyo dalam studinya yang mengatakan bahwa perlu diamati bagaimana generasi muda Islam ini sekarang menggunakan metode berpikirnya. Karena, menurut sejarawan, cendekiawan muslim sekaligus sebagai

9 Ahmad W, *Pratiknya, Anatomi Cendekiawan Muslim: Potret Indonesia*, n.d.

budayawan ini karena generasi muda memiliki kesadaran kolektif, respons atau kesaksian zaman dari sebuah generasi yang berada pada usia peralihan dari masyarakat agraris ke zaman industri.[10]

Kehadiran para cendekiawan dan organisasi masyarakat yang berbasis Islam ini harus dapat memberikan kesadaran secara ekstensif kepada umat, karena peran yang diembannya sangat tinggi.

E. Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja

Dalam realitas sosio-politik di Indonesia menunjukkan eskalasi yang signifikan terkait dengan diskursus aswaja. Diskursus ini secara intensif memenuhi ruang-ruang publik, bahkan masing-masing kelompok 'mengklaim' dirinya yang paling benar, dan kelompoknya yang akan masuk Surga-Nya. Klaim-klaim tersebut, seperti, satu kelompok mengklaim sebagai kelompok aswaja dan kelompok yang lain tidak, sehingga dianggap salah.

Menelisik ungkapan yang secara *genuine* hampir selalu menghiasi telinga kita, seperti yang sudah dibahas secara sekilas, misalnya kalimat yang sangat primadona mulai didengungkan, seperti dari 73 golongan yang dijamin masuk Surga-Nya, hanya satu golongan, yaitu golongan Aswaja. Sebagaimana yang sudah didedahkan di awal, bagaimana paham aswaja ini juga memiliki instrumen risalah yang telah mendapatkan jaminan Rasullah Saw., hal ini terkonfirmasi

10 Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (Yogyakarta: IR-CiSoD., 2017).

dari orang-orang yang selalu mengamalkan amaliyah Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Dan menciptakan berbagai mekanisme yang baik dalam mengurai berbagai persoalan kebangsaan, kenegaraan, dan keagamaan melalui al-qur'an, al-Hadits, Ijma, dan Qiyas.

Dalam arus modernisasi tentunya sangat banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh berbagai warga masyarakat atau kelompok, terutama dalam hal ini adalah kelompok Islam. Oleh karena itu, agar tetap sesuai dengan rule model yang ada, maka diperlukan sebuah kerangka yang baik. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat Islam ini juga telah memiliki sejumlah landasan dalam melakukan aktivitas mobilitasnya. Kerangka tersebut telah tercermin dari sejumlah prinsip yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama yang memegang erat paham Ahlussunah wal Jama'aah. Nilai-nilai atau sikap tersebut dapat tercermin dalam prinsip sebagai berikut: pertama, *tawassuth* (moderat); kedua, *i'tidal* (keadilan); ketiga, *tawazun* (seimbang); dan *tasamuh* (toleran).

Sebagai anggota dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sudah semestinya mampu menerapkan prinsip maupun nilai-nilai ini, agar prospek yang diharapkan dapat segera terwujud, terlebih sebagai generasi muda muslim. Selain itu, sebagai warga pergerakan tentunya dituntut untuk selalu berpikir kritis dengan menciptakan transformasi besar melalui peningkatan literatur, kepemimpinan, dan seterusnya. Pendidikan dan

pelatihan juga harus selalu dilaksanakan secara intensif dan ekstensif, agar anggota dan kader dapat dengan mudah memafhumi berbagai agenda besar yang dimilik oleh para pengurus yang ada kota metropolitan ini.

Sebagai pelopor perubahan, generasi muda muslim ini juga perlu meningkatkan dan mengamalkan nilai dan prinsip yang terkandung dalam paham Ahlussunah wal Jama'aah dan Nilai Dasar Pergerakan. Jangan sampai, prinsip dan nilai tersebut hanya sebatas retorika semata atau seremonial belaka. Sebaliknya, sebagai warga pergerakan sudah seharusnya menjadi aktor perubahan, terlebih saat ini di tengah era disruption yagn mahadahsyat. Komunikasi secara berkelanjutan juga perlu dilakukan dengan Nahdlatul Ulama agar dapat memaksimalkan transmisi paham Ahlussunah wal Jama'aah an-nadhliyah di seluruh penjuru peradaban.

TRAVEL
BOARDING PASS
BOARDING PASS
PASSPORT
PARIS

KITAB II

Kerangka Konseptual Aswaja dalam Merawat Lingkungan Hidup
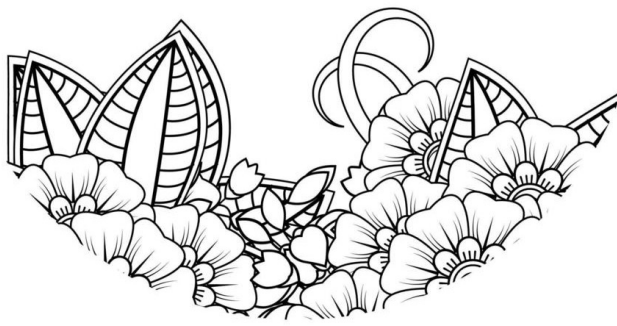
A. Prinsip-prinsip Ekologi Lingkungan

Kesadaran manusia yang lebih menitikberatkan posisinya sebagai Khalifah, akan menyebabkan manusia merasa paling berhak untuk menguasai dan mengeksploitasi alam dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya. Namun manusia seringkali bertindak mengeksploitasi alam melebihi batas kebutuhannya. Tindakan manusia tersebut pada akhirnya menciptakan krisis-krisis global. Krisis ekologi saat ini terutama disebabkan oleh perubahan iklim yang berasal dari Revolusi Industri dari Abad ke-18, ketika bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak mulai digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan energi. Dari waktu ke waktu planet ini telah mengalami tingkat percepatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang cepat sehingga memungkinkan pengembangan mesin yang digunakan untuk menghancurkan hutan seperti kegiatan industri pertambangan yang telah berperan dalam mempercepat terjadinya degradasi lingkungan.

Isu lingkungan merupakan bagian dari krisis global yang sangat serius yang dialami oleh umat manusia sekarang ini. Krisis ini tidak hanya menyangkut masalah lingkungan saja tetapi juga menyangkut berbagai masalah yang semakin kompleks dan multidimensional yang menyentuh setiap

aspek kehidupan, kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, teknologi dan politik. Dari berbagai fenomena degradasi lingkungan yang terjadi baik skala nasional maupun global tidak murni terjadi karena faktor alam semata, tetapi juga akibat pendekatan tata hubungan yang tidak harmonis atau tidak sehat (keserakahan dan tindakan eksplotatif) antara manusia dan alam, situasi inilah yang lebih dikenal dengan istilah krisis lingkungan hidup yang sekarang menjadi isu global.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman seseorang tentang masalah lingkungan hidup menjadi penyebab pokok juga dalam kerusakan lingkungan, selain banyak faktor utama yang mengakibatkan hal itu. Hal ini didukung dengan lemahnya penegakan hukum bagi mereka yang merusak lingkungan dengan skala besar (makro). Manusia dengan segala kegiatan dan tindakannya sudah semakin tidak selaras dengan alam. Dengan keserakahannya mereka memperkosa alam dengan terus menguras energi dan sumber daya alam lainnya yang ada di dalamnya.

Secara prinsip istilah lingkungan menurut Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup merupakan ruang yang ditempati manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik. Hal lain yang berkaitan dengan lingkungan tentu saja ekologi, definisi ekologi menurut Ernst Haeckel pada tahun 1866, seorang Biolog Jerman, ekologi yakni sebagai suatu keseluruhan pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan-hubungan total antara organisme dengan lingkungannya

yang bersifat organik maupun anorganik. Jadi, lingkungan adalah suatu wadah bagi makhluk hidup, baik berbentuk benda, kondisi atau keadaan, yang menjadi tempat makhluk hidup berproses dan berinteraksi. Di samping itu, lingkungan merupakan objek ekologi dan bagian dari ekosistem. Dengan demikian, ekologi, ekosistem dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Meningkatnya krisis ekologi global dewasa ini, telah menjadi sentral isu dunia. Dampak kerusakan lingkungan telah lama dirasakan penduduk di berbagai belahan negara di dunia, tidak hanya negara maju, negara berkembang dan miskin pun ikut merasakan hal serupa. Adanya ancaman akan datangnya bahaya dan bencana yang sewaktuwaktu bisa *meluluhlantahkan* perdaban manusia akan sangat sulit dibendung oleh keserakahan manusia. Isu ancaman global telah membuat prihatin bagi para ilmuwan dan pakar di dunia. Mereka pun menyerukan dengan berbagai isu tentang "kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologi", dengan kemasan isu "pembangunan berwawasan lingkungan tahun 1972 pada konferensi Stockholm (Stockholm Conferency), teknologi ramah lingkungan, anti nuklir,anti polusi dan pencemaran dan anti-illegal loging". Masalah ini mengancam kesejahteraan manusia bahkan kelangsungan hidup, sehingga masalah itu ramai diperdebatkan oleh para pakar dan ilmuwan, kaum politik dan masyarakat umum.

Dalam kutipan artikel pokok-pokok masalah Lingkunggan Hidup, dalam Masalah Kependudukan dan Lingkungan

Hidup: Dimana Visi Islam? Oleh Hardjasoemantri Koesnadi dijelaskan bahwa pandangan manusia, alam menjadi obyek dan manusia menjadi subyek, sehingga lahir sikap dan perilaku manusia serba "manusiasentris" *(anthropocentris),* melihat seluruh isi alam sebagai obyek yang harus dan dapat dieksploitasi untuk keperluan manusia. Tanggung jawab kepada alam menjadi tidak diperhatikan sama sekali. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi timbul karena pelaksanaan program-program sebagai berikut: (1) program industrialisasi, (2) program pertanian, perkebunan dan peternakan, (3) program pertambangan umum, minyak dan gas bumi, (4) program kehutanan, (5) program transmigrasi. Pembangunan sektor ini melahirkan produk yang berguna, akan tetapi juga menimbulkan masalah yang serius.

Di segi lain, ketergantungan masyarakat industri terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan telah menjurus pada teknologi yang merupakan keseimbangan ekologi sehingga merusak lingkungan. Faktanya, selain dampak indutrialisasi, kerusakan lingkungan ini berawal dari sikap mental dan perilaku manusia (industri) yang menempatkan dirinya diluar ekosistem yang diciptakan Allah SWT. Dalam perkembangan teknologi ternyata manusia telah gagal melihat dirinya sebagai bagian dari lingkungan.

Dimensi Etis tentang Keseimbangan Ekologi Lingkungan

Alam dan ekologi (lingkungan hidup) adalah bagian integral dari satu-kesatuan kehidupan di muka bumi ini,

yang tidak bisa dipisahkan dari jagad religius manusia yang bersama-sama mewarisi kehidupan duniawi. konsep ekologi sebagai sebuah displin ilmu, yang mempelajari tentang lingkungan hidup, maka faktor penyeimbang untuk keberlangsungan kehidupan di dunia ini sangat penting. Islam telah memberikan pijakan norma dan etika yang jelas terhadap konsep lingkungan hidup (atau sering disebut alam dalam arti luas). Dengan berbagai tekanan yang berbeda namun umumnya mengandung dimensi moral, perilaku manusia yang sadar dan tanggung jawabnya sebagai manusia terhadap lingkungan hidupnya. Etika lingkungan mengandung konsekuensi komitmen manusia terhadap kelangsungan daya dukung lingkungan ini baik untuk generasi manusia sekarang maupun generasi yang akan datang.Lingkungan hidup bukan semata milik manusia saat ini, namun lingkungan hidup menjadi titipan generasi yang akan datang.

Dalam akselerasinya terhadap lingkungan hidup, yang sekarang sudah pada tahap krisis lingkungan global mulai menoleh kembali pada dimensi etis; etis teologis maupun etis antropologis dalam struktur utuh kerangka dasar struktur bangunan tindakan manusia. Pandangan Islam terhadap etika (khsusunya) dalam kaitannya terhadap lingkungan hidup tercermin dari banyaknya ayat-ayat Allah SWT yang mengajarkan tentang konsep keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, karena dunia adalah sarana menuju kehidupan di akhirat.

Konsep Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Merawat Keseimbangan Ekologi Lingkungan

Di kalangan masyarakat maju terdapat keyakinan bahwa kemajuan teknologi mampu mengatasi masalah lingkungan. Sebagian dari mereka sangat yakin bahwa keterbatasan energi dan sumber-sumber alam dapat digantikan dengan barang-barang sintetis. Kerusakan energi dan sumber-sumber alam sebagai akibat dari sistem eksplorasi yang salah, dapat dicegah dengan sistem baru yang lebih canggih. Demikian pula masalah pencemaran, menurut keyakinan banyak orang, dapat dikontrol atau dikurangi dengan menggunakan metode ilmiah yang mampu mengidentifikasi, membuat klarifikasi dan prediksi dengan akurat, serta menempatkan udara, air dan daratan sebagai pendukung kehidupan manusia.

keyakinan semacam itu ternyata tidak seutuhnya benar, Ada kekhawatiran tentang dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi umat manusia di era global sekarang ini. Kekhawatiran itu memang beralasan, sebab perkembangan IPTEK di segala bidang kehidupan semakin terwujud di alam nyata (dunia). Oleh karena itu kemajuan IPTEK menjadi instrumen manusia, maka seharusnya IPTEK dipergunakan dengan semestinya sesuai dengan kebutuhan manusia dengan mempertimbangkan kelestraian dan keseimbangan alam, baik dalam bidang pertanian, industri, dan sibermatika. Kehadiran teknologi abad modern ini, tidaklah harus ditakuti sejauh teknologi buatan manusia itu

dipegang oleh orang-orang yang beriman, berpengetahuan, mempunyai moralitas dan responsibilitas individu dan sosial sebagai tanggung jawab hamba terhadap Allah yang telah menitipkan seluruh alam raya ini kepada kita semua. Maka dari itu pada Era sekarang ini dalam prinsip ekologi lingkungan adalah bagaimana manusia tetap memahami dirinya sebagai manusia sekaligus sebagai khalifah yang mempunyai moral. Etika, dan martabat dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan alam, kaitannya dengan penggunaan IPTEK sebagai instrumen untuk meraih kebahagiaan dunia.

B. Isu-isu Lingkungan Sumber Daya Lingkungan Wilayah dan Kota

Sebagai negara sedang berkembang, pembangunan wilayah Indonesia secara kontinu dan masif bergerak menuju bersifat kekotaan. Kota memiliki peran penting jika dilihat dari sisi urbanisasi, aglomerasi dan perdagangan. Mengutip *Schragger, R. C. Dalam astikelnya City power Urban governance in a global age* Jika dilihat dari sisi urbanisasi menunjukkan kota sebagai pusat peradaban manusia dimana kota sebagai mesin ekonomi utama menjadi daya tarik manusia untuk hidup di perkotaan. Sisi aglomerasi kegiatan menjadikan kota lebih produktif mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dari sisi perdagangan kota merupakan simpul perdagangan dengan wilayah sekitarnya.

Perkembangan definisi kota mengalami perubahan yang berawal dari definisi sederhana kota berorientasi fisik *(a place*

to live, work, visit, and play) menjadi pengertian yang lebih kompleks sebagai pusat utama ilmu pengetahuan, budaya, inovasi sosial, kemakmuran dan demokrasi serta pusat sejarah dalam lingkup yang lebih luas *(urban triumphalism)* dijelaskan oleh Enni Lindia mayona dalam jurnal yang berjudul Pergeseran Makna Kota Perspektif Lingkungan. Kota sebagai pusat aktivitas telah memberikan pengaruh yang luas, baik pengaruh ke dalam maupun perembetan ke arah luar. Pembangunan ke arah dalam ditunjukkan dengan adanya proses pemadatan bangunan pusat-pusat aktivitas, diantaranya *central bussiness district, civic centre, education centre* dan beberapa kota memperlihatkan mayoritas pembangunannya ke arah budaya, pariwisata maupun kesehatan dan olahraga. Sebagian besar kota yang memiliki arah perkembangan ke dalam telah mempersiapkan perencanaan tata ruang kota secara detail dan komprehensif, sehingga urbanisasi sentripetal tersebut akan memberikan berbagai kemudahan penduduk kota dalam menjalankan berbagai aktivitas mereka.

Berdasarkan perkembangan tersebut menunjukkan kota-kota secara perlahan akan berubah dan bertranformasi tidak hanya pada aspek kapasitas dan gaya hidup masyarakat saja namun yang perlu diperhatikan adalah kota dalam arti ruang yang cukup menarik. Pandangan ruang kota saat ini berorientasi pada *planetary urbanism* dimana kota berada dalam skala ekonomi global namun pada sisi lain terjadi penurunan kondisi lingkungan dan pencemaran yang tidak hanya pada lingkungan perkotaan tetapi juga terjadinya the

global commons dimana kehidupan kawasan lain terancam.

Dalam catatan United Nation tahun 2014 Kota di abad 21 dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi di pusat kota sebesar 66% akibat adanya urbanisasi menyebabkan permasalahan berkembangnya industrialisasi, kemiskinan, permukiman kumuh, konflik suku, masalah kriminalitas dan lainlain. Selain itu, bentuk kota berpengaruh terhadap beban lingkungan yang diberikan serta berkaitan dengan karakter unik secara spasial, perbedaan iklim dan budaya setempat. (Bartuska dalam bukunya *The Built Environment* menyatakan dibutuhkannya *ecological challenges* yang tepat di dalam mengatasi permasalahan lingkungan perkotaan. Pertumbuhan kota yang terus menerus tidak dapat dihindari *(perpetual growth)* dan akan mengancam kehidupan lingkungan manusia, sehingga dibutuhkan solusi ekologi untuk mengatasinya.

Oleh karena itu, di dalam menghadapi tantangan tersebut maka seorang perencana kota khususnya sangat penting untuk memahami bagaimana pergeseran makna kota dikaji dari perspektif lingkungan. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran mengenai pergeseran makna tersebut dari aspek kota dan lingkungan.

Dalam ilmu lingkungan, perencanaan kota merupakan bagian yang harus terintegrasi dengan perencanaan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kota dalam perspektif lingkungan tersebut dianggap sebagai masalah ekologis karena berkaitan dengan kebutuhan dan

sediaan sumber daya alam yang tidak seimbang. Pada konsep city-urban-environmental challenges dibahas mengenai bentuk kota berpengaruh terhadap beban lingkungan yang diberikan. Pergeseran makna kota dapat dilihat berdasarkan pergeseran isu-isu lingkungan perkotaan dan pergeseran studi ekologi lingkungan perkotaan.

Pergeseran makna kota berdasarkan pergeseran isu-isu lingkungan perkotaan terdiri isu *brown* yang berfokus pada upaya perbaikan sanitasi atau kesehatan lingkungan, isu *grey* berfokus pada upaya mengatasi pencemaran industri yang berkembang serta isu green yang berfokus pada deforestasi, penipisan sumber daya, pemanasan global, keanekaragaman hayati, dan polusi. Berdasarkan pergeseran isu-isu tersebut menunjukkan bahwa kota memiliki kontribusi besar terhadap isu-isu lingkungan yang semakin global yang disebabkan oleh tingkat konsumsi sumber daya alam dan aktivitas perkotaan yang tinggi

Pada pergeseran konsep ekologi, awalnya kota dilihat sebagai bentuk lanskap tertentu dan berkembang ke arah kerangka teoritis baru yang memasukkan manusia ke dalam studi ekosistem (McPhearson et al., 2016) dimana kota sebagai ekosistem yang didominasi manusia. Perspektif kota sebagai ekosistem baru mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20.

Kota sebagai ekosistem yang paling didominasi oleh manusia *(human dominated ecosystems)* memiliki tiga pola menurut Niemelä & MacDonnell dalam tulisan

Urban ecology: patterns, processes, and applications yaitu pertama, manusia mendominasi ekosistem bumi sehingga manusia harus diintegrasikan ke dalam suatu model untuk memahami secara lengkap tentang sistem ekologi yang ada. Kedua, pengembangan model sistem ekologi yang lebih realistis akan menentukan keberhasilan dalam menemukan solusi masalah lingkungan. Ketiga, meskipun studi tentang fenomena ekologis di lingkungan perkotaan bukanlah bidang ilmu baru, konsep kota sebagai ekosistem relatif baru untuk bidang ekologi. Perubahan subsistem kota secara parsial dapat merubah tatanan ekosistem kota keseluruhan.

Berdasarkan pergeseran makna kota berdasarkan isu lingkungan dan ekologi lingkungan perkotaan, maka perlu dipahami manusia sebagai pelaku utama yang berpengaruh dalam isuisu lingkungan perkotaan dan perkembangan kota. Pemahaman kota sebagai ekosistem hibrida dari lingkungan alam, lingkungan binaan dan lingkungan sosial sangat penting di dalam pertimbangan proses perencanaan kota. Kombinasi ekosistem yang berbeda menyediakan lingkungan hidup, jasa ekosistem, dan sumber daya alam lainnya yang mendukung tempat tinggal dan kegiatan ekonomi manusia. Mengutip UNU-IAS *Urban Ecosystems Management Group* Ekosistem dapat didefinisikan sebagai *a dynamic complex* dari komunitas makhluk hidup. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan dan pengelolaan yang tepat untuk mempertahankan kualitas hidup kota di masa mendatang. Untuk memahami tindakan dan pengaruh manusia terhadap ekosistem hibrida tersebut penting untuk menggunakan

pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu sosial, perilaku, dan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara akan menghadapi tantangan pembangunan berupa kondisi sumber daya dan kendala ekosistem yang sangat berbeda dari yang telah dialami di bagian dunia lainnya. Para perencana perlu memasukkan pertimbangan lingkungan yang lebih luas dan unik dalam pembangunan perkotaan, tanpa mengabaikan prioritas kondisi saat ini. Pemahaman mengenai struktur dan fungsi kota dalam perspektif ekologi kota menuntut perencana untuk mulai merubah pola pikir dan konsep perencanaan kota. Dalam merumuskan substansi, konsep tersebut tidak hanya terpaku pada pola dan struktur ruang secara fisik semata namun bagaimana mempertimbangkan kaitan antara struktur dan fungsi kota dalam kerangka ekologi lingkungan perkotaan yang unik.

Struktur dan fungsi ekologi kota perlu dipetakan di awal proses berdasarkan zona ekologi, kemudian mengkaji proses interaksi, polapola gangguan yang beragam secara ruang dan waktu. Pada prosedur perencanaan dibutuhkan upaya untuk memahami tindakan dan pengaruh manusia terhadap ekosistem, sehingga penting untuk menggunakan pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu sosial, perilaku, dan ekonomi serta pemahaman mengenai sistem perkotaan berupa dominasi institusi sosial dan budaya. Semakin bertambahnya manusia secara dramatis telah mengubah

ekosistem bumi dengan cara meningkatkan heterogenitas lanskap dan mengubah siklus energi dan material. Pemahaman tentang mekanisme yang menghubungkan proses manusia dan ekologi serta mengontrol dinamika dan evolusinya sangat penting untuk dipertimbangkan.

C. PEMANASAN GLOBAL, ERA DISRUPSI

Persoalan lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalan ini bukan hanya bersifat lokal ataupun translokal, tetapi regional, nasional, dan trans-nasional sampai global. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan terletak di kathulistiwa akan sangat dipengaruhi oleh adanya ancaman krisis lingkungan terutama pemanasan global dan Krisis iklim. Secara umum, permasalahan yang akan timbul adalah akibat dari meningkatnya suhu bumi disebabkan oleh pemanasan global sedangkan secara regional dan nasional utamanya dari perubahan iklim. Hal yang perlu mendapat perhatiun serius dampak dari perubahan iklim yang berupa dampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, politik, kekeringan, banjir, dan tanah longsor serta kenaikan permukaan laut.

Secara umum, pemanasan global bermula dari Revolusi Industri yang dimulai sejak akhir abad ke-18. Revolusi industri adalah perubahan pola produksi yang dulu menggunakan mesin dan teknologi (industri). Revolusi industry dianggap titik balik utama dalam sejarah yang ditandai dengan pergeseran dunia dari ekonomi agraris dan

kerajinan tangan menjadi ekonomi yang didominasi oleh industry dan manufaktur mesin. Kondisi ini menghasilkan volume dan ragam barang produksi pabrik yang lebih besar serta peningkatan standar hidup bagi banyak orang terutama untuk kelas menengah dan atas. Pada abad tersebut dimulainya revolusi industri antara lain dengan dibuatnya pabrik-pabrik, pembangkit listrik, kendaraan transportasi dan pertanian. Dua ratus tahun kemudian, negara-negara industri baru bermunculan baik di Eropa, Amerika bahkan di Asia. Tujuan revolusi industri ini adalah untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, karena penggunaan mesin dianggap lebih efisien daripada menggunakan tenaga manusia. Industri memang membuat wajah dunia tampak semakin maju, misalnya kendaraan bermotor sebagai salah satu produk industri. Namun di sisi lain berdampak negatif terhadap lingkungan hidup manusia. Dibalik kemajuan yang diimpikan melalui revolusi industry ada masalah yang timbul yaitu pemanasan global. Hal tersebut karena setiap mesin yang digunakan akan menghasilkan gas buang dari hasil pembakaran yang menimbulkan pencemaran udara.

Dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yang menekankan pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic dan lainnya yang dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan semakin masifnya penggunaan Internet of Thing (IoT) telah mendistrupsi beragam sendi kehidupan manusia. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya peningkatan volume data, komputasi konektivitas, analisis kecerdasan bisnis yang

pada akhirnya menuntut pula peningkatan kecerdasan digital. Konsep Revolusi Industri 4.0 yang tengah melanda dunia telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang revolusioner berbasis penerapan teknologi terkini, memunculkan cyber-physical-system, Internet of Thing (IoT), Big Data, dan aneka layanan yang memanfaatkan IT. Modernisasi tak sepenuhnya membawa berkah bagi semua warga planet bumi. Ada banyak derita akibat struktur pengetahuan berteknologi maju dan tinggi. Tak ada keraguan atas itu sehingga janji modernitas tak menjadi berkah bagi semesta jaringan ekosistem. Penggunaan teknologi yang semakin pesat tentunya diperlukan energi dalam sistem pengoperasiannya, diantaranya dari sumber energi dari berbahan fosil (minyak bumi, gas bumi dan batubara) energi yang tidak ramah lingkungan mengakibatkan meningkatnya pencemaran dari emisi gas buang yang meningkatkan efek Gas Rumah Kaca dan mempengaruhi pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Shierry Weber Nicholsen dalam pengantar bukunya The Love of Nature and the End of the World, mengatakan: "bahwa di luar ancaman perang nuklir, maka krisis lingkungan merupakan ancaman terbesar yang dihadapi umat manusia secara kolektif dewasa ini."

Pada dasarnya Masyarakat sendiri masih buta terhadap masalah pemanasan global (global Warming) dan perubahan iklim serta akibat yang ditimbulkannya. Demikian pula dampaknya belum diperkirakan dengan tepat Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat awam belum memiliki bayangan dan belum dapat memahami permasalahan dampak pemanasan global dan perubahan iklim terhadap

kehidupannya.

Hasil Kajian Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) dan World Climate Programme (WCP) dalam sidang Second World Climate Declaration dalam sidang Second World Climate Confference (SWCC) tahun 1990 di Geneva dan dimuat Ministerial Declaration diramalkan bahwa dalam 100 tahun mendatang akan terjadi peningkatan suhu udara dibumi sebesar 2 derajat sampai 5 derajat Celcius. Pada tahun 1990-2005 terjadi kenaikan suhu bumi antara 0,13 sampai 0,15 derajat Celcius menurut pernyataan IPCC. Dengan demikian apabila tidak dilakukan usaha pencegahan (preventif) maka pada tahun 2050-2070 diperkirakan suhu bumi meningkat sekitar 4,2 derajat Celcius. Efek meningkatnya suhu bumi dalam kurun beberapa waktu ini menyebabkan terjadinya krisis iklim perubahan suhu ekstrem, curah hujan tinggi, tekanan udara, kelembaban udara, laju arah angin, kondisi awan dan radiasi matahari.

Menurut Fadliah dalam buku *Pemanasan Global, Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi*, penyebab pemanasan global adalah sebagai berikut

1. Efek rumah kaca

   Meningkatnya suhu permukaan Bumi tak lepas dari fenomena yang satu ini. Secara umum, efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer dalam mempertahankan suhu udara panas.

   Pada mulanya, efek rumah kaca berfungsi meminimalkan suhu dingin pada Bumi. Akan

tetapi, dalam jumlah berlebih, efek rumah kaca dapat mengganggu keberlangsungan hidup seluruh makhluk di Bumi.

Meningkatnya efek rumah kaca tak lepas dari aktivitas manusia, seperti penggundulan hutan, penggunaan zat kimia berlebih, dan sebagainya.

Melansir laman Sumber Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejak terjadinya revolusi industri, gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida, metana, dan sebagainya merupakan penyebab meningkatnya konsentrasi efek rumah kaca.

Dengan begitu, makin berkembangnya aktivitas manusia membuat kondisi lingkungan makin tak ramah bagi kelangsungan hidup makhluk lainnya di Bumi, terkhusus hewan dan tumbuhan.

2. Menipisnya lapisan ozon

   Selain efek rumah kaca, penyebab terjadinya pemanasan global adalah semakin menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Seperti yang diketahui bahwa ozon merupakan komponen atmosfer yang menyerap radiasi ultraviolet yang sifatnya berbahaya.

   Sayangnya, keberadaan ozon di atmosfer tersebut semakin menipis seiring waktu. Adapun penyebab hal itu terjadi, yakni penggunaan zat chlorofluorocarbon (CFC) yang tak luput dari aktivitas manusia.

3. Variasi matahari

   Meningkatnya aktivitas matahari pada lapisan stratosfer juga menimbulkan terjadinya efek rumah kaca. Ilmuwan dari Duke University menyebutkan bahwa matahari diperkirakan telah berkontribusi terhadap 45 hingga 50 persen terjadinya peningkatan temperatur rata-rata global selama periode 1900 hingga 2000.

4. Efek balik

   Penyebab lain dari pemanasan global adalah efek balik yang dihasilkannya, seperti pada penguapan air. Seiring pemanasan yang terus berlanjut, uap air di udara bertambah hingga mencapai suatu kesetimbangan konsentrasi uap air.

   Kondisi tersebut menyebabkan efek rumah kaca yang dihasilkan lebih besar dibandingkan akibat yang ditimbulkan gas karbon dioksida.

Efek pemanasan global antara lain akan terjadinya kenaikan permukaan air laut sampai 90cm yang mengakibatkan beberapa hal seperti terjadinya rob, menghambat pertumbuhan dan mematikan biota laut serta merusak terumbu karang. Dampak negative dari pemanasan global lainnya antara lain akan menyebabkan penurunan populasi biota laut termasuk ikan dan hasil laut lainnya. Timbulnya rob yang akan menenggelamkan Sebagian kota pinggir pantai yang kesemuannya itu akan berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemanasan

Global akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Sedangkan perubahan iklim akan memberikan dampak negative berupa perubahan pola hujan, timbulnya penguapan, terjadinya, air limpasan dan perubahan kelembaban tanah. Dampak negative akibat perubahan iklim tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan produktivitas hasil pertaninan dan perkebunan yang mengakibatkan terjadinya penurunan ketahanan pangan. Kerusakan lingkungan tersebut disebabkan oleh polusi udara, limbah, dan aktivitas lain yang berisiko merusak keseimbangan lingkungan. Jika tak segera ditangani dengan serius, dampak yang ditimbulkan akan semakin memperburuk kondisi lingkungan sekitar. Lebih dari itu, fenomena pemanasan global dapat mengancam keberadaan makhluk hidup lainnya.

Dikutip dari buku Analisis Kesehatan Lingkungan Akibat Pemanasan Global, H.J Mukono menerangkan Pemanasan global dan perubahan iklim dapat juga berpengaruh terhadap Kesehatan masyarakat dengan manifestasinya berupa penyakit, baik penyakit vector born desease (Malaria dan demam berdarah) dan water/food born desease (diare, disentri, tifus, dan, cholera) selain itu karena curah hujan yang tidak teratur dapat pula menyebabkan terjadinya wabah hama dan penyakit tanaman, apabila curah hujan terlalu tinggi maka akan menyebabkan pula terjadinya banjir. Pemanasan global dan perubahan iklim selain menjadi masalah nasional, sudah pula menjadi perhatian dunia.

Senada dengan hal teresebut Kutipan laman resmi

ICCTF (Indonesia Cilmate Change Trust Fund) menyebutkan Negosiasi iklim pada 2 Desember hingga 15 Desember 2019 ini merupakan yang terlama dalam sejarah 25 tahun Pertemuan Para Pihak-Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP-UNFCCC). Delegasi dari hampir 200 negara bergulat selama lebih dari 40 jam tambahan, setelah dua minggu dari waktu yang direncanakan habis. Perundingan iklim di Madrid gagal menyepakati peningkatkan target penurunan emisi global, merumuskan skema perdagangan karbon dan transfer teknologi, hingga pendanaan bagi negara-negara terdampak. Namun, kegagalan global ini tak harus melemahkan mitigasi dan adaptasi kita, karena bagaimanapun dampak perubahan iklim telah datang, bahkan semakin cepat dan kuat.

Kegagalan disepakatinya tentang perubahan iklim menemui jalan buntu, tidak lantas membuat Indonesia mengabaikan kewajiban penurunan emisi. Indonesia sendiri sudah memiliki target pengurangan emisi, bahkan perencanaan pembangunan jangka panjang rendah karbon yang harus diwujudkan.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (http://ditjenppi.menlhk.go.id/) dijelaskan bahwa pengendalian iklim di Indonesia memerlukan sinergisitas antara kebijakan yang dilakukan oleh internasional.

Kebijakan yang dibuat ditingkat internasional kemudian diterjemahkan dan dibuat kerjangka kerja untuk perbaikan

iklim secara nasional. Untuk program penanganan perubahan iklim di Indonesia sendiri meliputi tiga pilar utama yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial. Indonesia mengambil beberapa kebijakan dan upaya untuk melakukan perbaikan iklim dunia di antaranya adalah :

1. Mengurangi jumlah kendaraan pribadi dengan bahan bakar minyak dan mengalihkannya ke kendaraan dengan tenaga listrik
2. Melakukan berbagai kebijakan untuk pemulihan hutan di Indonesia untuk mengembalikan fungsi hutan
3. Menerapkan kebijakan untuk reduce, reuse, dan recycle

Selain itu salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani perubahan iklim adalah meningkatkan sumber pendaan untuk mengatasi dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim.

Dijelaskan juga pada laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN terus menjadi alat yang sangat penting untuk mendanai program mitigasi dan pencegahan peruhan iklim di Indonesia. salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan penerbitan surat utang negara atau sukuk dalam prohram mitigasi perubahan rumah kaca atau dikenal sebagai green bonds.

Permasalahan pemanasan global dan dan perubahan iklim merupakan isu lingkungan yang secara ideal harus ditangani dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat terkait. Masyarakat yang beresiko terkena dampak pemansan

global dan berikan diberi informasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka menghadapi dampak negative.

D. Infrastruktur Hijau

Pembangunan kawasan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta sebagai suatu kegiatan dapat mempengaruhi dan membawa dampak terhadap lingkungan serta alam sekitarnya. Kecenderungan peningkatan arus urbanisasi di kawasan perkotaan di berbagia kota di Indonesia, termasuk pula kota Semarang sebagai daerah tujuan masyarakat urban, secara umum memunculkan berbagai permasalahan kurangnya ketersediaan berbagai fasilitas layanan kebutuhan hidup primer masyakarat, terutama masalah pemukiman dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yaitu berbagai fasilitas transportasi, penurunan kualitas lingkungan perkotaan serta belum efektif dan efisiennya pengaturan penatagunaan lahan dan tata ruang *(land and space used plan regulation)*. Berangkat dari realitas permasalahn tersebut diatas maka fokus studi pada artikel ini adalah apa urgensi dari ketersediaan ruang terbuka hijau publik dalam perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan.

Kontradiksi Daya Tarik Kota: Peningkatan Urbanisasi dan Kendala Ketersediaan Fasilitas Publik

Kota sebagai pusat kegiatan industri, pedagangan dan penyediaan jasa serta pusat aktifitas pemerintahan,

merupakan tumpuan hidup bagi masyarakat daerah sekitar perkotaan *(hinterland).* Konsentrasi kegiatan pembangunan dan aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan di Indonesia yang merupakan karakteristik serta kecenderungan di kota-kota di dunia ketiga. Tingkat pertumbuhan kawasan perkotaan ini berdampak pada kecenderungan peningkatan arus urbanisasi yang semakin tak dapat diantisipasi oleh pemerintah kota tujuan masyarakat urban tersebut.

Adanya sentralisasi kegiatan ekonomi yang selama ini dilakukan sebagai suatu kebijakan pemerintah, kegiatan ekonomi menjadi berpusat di perkotaan dengan lebih dominan pada pengembangan sektor industri, sehingga kesempatan tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaaan dengan sendirinya bergeser kea rah yang berlawanan dengan kondisi *factual* dalam masyarakat, yaitu tenaga kerja yang semula sebagian besar bekerja di sector pertanian bergerak memasuki kegiatan ekonomi yang baru, yaitu sector industri. Demikian pula terjadinya urbanisasi di kota-kota besar di Indonesia bukan karena adanya permintaan tenaga kerja di wilayah perkotaan, tetapi karena adanya tekanan hidup yang berat di daerah pedesaan sehingga memaksa mereka bermigrasi ke kota tanpa memiliki bekal ketrampilan yang memadai.

Tingkat urbanisasi di kawasan perkotaan di negara-negara dunia ketiga antara lain desebabkan antara lain oleh adanya perbedaan elastisitas output dari tenaga kerja di pedesaan dan perkotaan, perbedaan upah yang rentangnya

cukup signifikan serta disparitas perbedaan harga barang produksi di pedesaan dan perkotaan, sehingga selama kawasan perkotaan sebagai satu-satunya harapan penduduk pedesaan untuk memperoleh harapan hidup, maka arus urbanisasi merupakan salah satu pilihan mereka, sehingga semakin mempercepat peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk kawasan perkotaan.

Kecenderungan peningkatan arus urbanisasi di kawasan perkotaan di berbagia kota di Indonesia, termasuk pula kota Semarang sebagai daerah tujuan masyarakat urban, secara umum memunculkan berbagai permasalahan kurangnya ketersediaan berbagai fasilitas layanan kebutuhan hidup primer masyakarat, terutama masalah pemukiman dan fasilitasfasilitas publik lainnya yaitu berbagai fasilitas transportasi, penurunan kualitas lingkungan perkotaan serta belum efektif dan efisiennya pengaturan penatagunaan dan peruntukan lahan *(land used)* dan tata ruang.

Arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang semakin pesat pertumbuhannya, mengakibatkan naiknya permintaan akan kebutuhan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas penduduk berupa pemukiman/perumahan, air minum, listrik, jalan-jalan, sarana transportasi kota, telepon, kesehatan, pendidikan, pasar, pencegahan bahaya kebakaran, saluran air hujan dan limbah, sarana pembuangan sampah, dan sebagainya yang harus disediakan oleh pemerintah kota setempat.

Park dan Burgess menyatakan bahwa tekanan arus

urbanisasi yang melonjak begitu cepat telah membawa akibat terhadap pengaturan tata ruang kota yang cenderung konsentrik dan memusat, sehingga tidak saja menyebabkan kelompok masyarakat marjinal semakin terdesak ke daerah pinggiran kota atau pemukiman kumuh tetapi seringkali masyarakat miskin kota harus berpuas diri dengan berbagai fasilitas publik yang sangat minim serta jauh dari berbeda dengan warag masyaraakat kota yanag kemampuan ekonominya tergolong kuat. Sementara pada sisi lain, kecenderungan penyediaan fasilitas pemukiman cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi dengan membangun kawasan perumahan/ pemukiman bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan keuangan yang tinggi.

Pembangunan perumahan di kawasan perkotaan mempunyai implikasi terhadap kondisi lingkungan dan perubahan fungsi dan peruntukan tanah, bahkan secara ekstrim mampu menggusur ruang dan lahan yang sesungguhnya merupakan bagian utama dan jantung kota. Unsur-unsur yang menjadi penyeimbang bagi interakasi kehidupan antara masyarakat dengan lingkungan sosial, budaya serta ekosistem kawasan perkotaan, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang bersifat komprehensif dan lintas sektoral, baik dari segi manajemen, penataan ruang, ekonomi, sosial dan politik.

Ketersediaan ruang publik dan lahan terbuka hijau bagi pembangunan perumahan di di suatu kawasan perkotaan

tidak cukup berhenti pada satu perencanaan dan realisasi pengambilan keputusan saja tetapi juga memerlukan perencanaan dan penyediaan berbagai fasilitas hunian lainnya, seperti sarana pendukung transportasi, jalan raya, air minum, listrik, telepon, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan publik lainnya secara memadai harus disediakan pula. Pemerintah harus pula mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat perubahan tata ruang dan kondisi alam dikawasan yang telah berubah fungsi dan peruntukannya menjadi kawasan terbangun.

Dalam kaitan dengan pembangunan perkotaan, ketersediaan ruang publik dan lahan terbuka hijau sebagai satu kesatuan dan bagian integral bagi kehidupan warga masyarakat kota pada dasarnya merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kota dalam rangka mewujudkan kota layak huni; menanggulangi masalah kemiskinan dan kerawanan sosial; memperkuat fungsi internal dan eksternal kota, serta mengupayakan sinergi pembangunan perkotaan. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang direncanakan dan dibuat oleh pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan kota dalam penyediaan prasarana, sarana kota, pelayanan umum, meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan, berkurangnya masalah kemiskinan dan kerawanan sosial, serta meningkatnya penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana penghubung perkotaan dan pedesaan.

Emil Salim sebagai pakar dan mantan Menteri Lingkungan pada beberapa peroide pemerintahan, menyebutkan bahwa pengaruh pembangunan kota terhadap kondisi lingkungan hidup dan masyarakat pemukiman dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu pertama, bahwa pembangunan kota mengubah kondisi dan keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia, sehingga keadaan lingkungan alam sulit dipertahankan dalam kondisi dan bentuk aslinya. Kedua, perubahan kondisi sosial masyarakat yang hidup di kota. Dengan adanya perubahan lingkungan dalam masyarakat kota mengakibatkan mereka sulit untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan mereka sendiri seperti kebutuhan air minum, transportasi, pelayanan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya.

E. Ekologi dan Pengetahuan Lingkungan Ummat

Krisis lingkungan atau yang dikenal sebagai krisis ekologi semakin hari semakin meluas. Hal ini menuntut kepedulian kita selaku manusia yang mengemban peran sebagai khalifah di bumi untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah kerusakan lingkungan yang lebih massif. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa dukungan dari berbagai sumber daya yang ada di lingkungannya. Namun, kesadaran akan pentingnya melestarikan dan melindungi alam dinilai masih kurang. Pendidikan lingkungan hidup diharapkan dapat menjadi suatu wahana untuk mengedukasi masyarakat umumnya dan peserta didik pada khususnya untuk lebih memahami fenomena krisis lingkungan global dan

menumbuhkan sikap untuk lebih peduli pada lingkungan, dengan menginternalisasikan nilai-nilai agama.

Membangun semangat keagamaan berbasis ekologis harus dilakukan secara serentak dan berkelanjutan pada semua level dan komposisi masyarakat khususnya ummat Islam, mengingat bahwa krisis ekologi itu berdampak universal. Memahamkan kembali peran manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga dan mengelola alam serta konsekuensi dari merusak lingkungan ditinjau dari perspektif Islam diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga, mengelola secara bijaksana dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya.

Etika Lingkungan Menurut Islam

Dalam pandangan Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan atau relasi yang sangat erat. Konsep ekologi telah dikembangkan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup serta interaksi berbagai komponen di dalamnya.

Pada hakekatnya, alam dan seluruh isinya mempunyai fungsi dan manfaat dalam kehidupan dunia ini seperti ditegaskan Allah dalam Surat Ar Rahman ayat 10: "Dan Dia telah menghamparkan bumi untuk semua makhluk-Nya"

Maka Allah menciptakan makhluk hidup yang terdiri dari manusia, binatang, dan tumbuhan sebagai serangkaian ekologi dan membentuk suatu ekosistem yang saling

mempengaruhi untuk keberlangsungan hidupnya. Konsep penciptaan alam semesta lainnya dijelaskan juga dalam QS. Ali Imran: 190-191, Luqman: 20, Al Qashash: 77, dan masih banyak lagi ayat lainnya.

Allah Swt menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian sebagai suatu maha karya yang tanpa celah. Hal ini ditegaskan dalam QS Al Mulk ayat 3-4:

"Dialah (Allah) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangilah pandangan(mu) sekali lagi (dan) sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia (pandanganmu) dalam keadaan letih."

Selanjutnya dalam QS Ar Rahmaan:7 dikatakan: "Dan langit telah ditinggikanNya dan Dia telah menciptakan keseimbangan."

Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Gangguan terhadap salah satu komponen lingkungan akan mengubah keseimbangan sehingga dapat mempengaruhi komponen lingkungan yang lain (Harahap, 2015).

Etika lingkungan mengandung konsekuensi komitmen manusia terhadap kelangsungan daya dukung lingkungan ini baik untuk generasi manusia sekarang maupun generasi

yang akan datang. Lingkungan hidup bukan semata milik generasi saat ini, namun merupakan titipan generasi yang akan datang (Syamsudin, 2017).

Konservasi Lingkungan dalam Pandangan Islam

Menurut (Juwita, 2017), upaya untuk mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, dan socialbudaya semata, melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Fiqih lingkungan adalah ketentuan–ketentuan Islam yang bersumber dari dalil – dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.

Sukarni dalam bukunya Fiqih Lingkungan Hidup mengemukakan 3 konsep dasar fiqih lingkungan yaitu (Juwita, 2017):

1. Konsep ri'ayah al-bi'ah sebagai konsep integral ajaran Islam. Konsep ini bila dibawa kedalam fiqh akan bermakna bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran agama Islam. Sebaliknya setiap tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup berarti penistaan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri dan diharamkan secara fiqh.

2. Konsep kewajiban kolektif (fardhu kifayah) dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup.

Sebagai implikasinya penanganan problem lingkungan hidup mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak, terutama ulama', pemerintah, dan masyarakat. Kewajiban-kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkunga secara lestari. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis suatu ekosistem yang didukung oleh fungsi ekologis yang masing-masing komponennya secara wajar berfungsi sehingga memiliki daya dukung lingkungan yang optimum. Keseimbangan ekosistem dalam arti luas meliputi segala gerak dinamika kehidupan, baik dalam dunia fisik maupun social.

Hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hamba tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Swt. Hal ini disebabkan kemampuan manusia dalam mengelola alam bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya tetapi akibat anugerah Allah Swt (Harahap, 2015). Allah telah menundukkan alam ini agar dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini secara eksplisit telah disebutkan dalam Surat Ibrahim ayat 32:

"Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air

hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungaisungai bagimu."

Selanjutnya dalam Surat Az Zukhruf ayat 13 dinyatakan: *"Agar kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan agar kamu mengucapkan, "Maha-suci (Allah) yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya."*

Agama memang memberi penekanan pada etika dan rasa tanggung jawab terhadap alam. Oleh karena itu agama menawarkan kepada manusia agar memberi perhatian terhadap alam dan lingkungan dengan komitmen bahwa alam memiliki dan berada dalam satu tatanan nilai (Maliki, 2011). Beberapa ayat dalam Al-qur'an menegaskan untuk tidak melakukan kerusakan terhadap alam dan lingkungan, diantaranya QS. Al Qoshos:77; Ar Rahmaan: 8, As Syu'ara: 83, Al A'raf: 56 dan Al Ankabut:36. Di sisi lain, Surah Al Baqarah ayat 30 memberikan kewajiban manusia. untuk menjaga lingkungan yang juga sangat terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah (wakil Allah) di muka bumi. Maka manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah amanah yang diberikan Allah SWT (Harahap, 2015). Menurut Syamsudin (2017), sebagai konsekuensi dari seorang khalifah Allah, manusia harus aktif di dunia, memelihara keharmonisan alam dan menyebarluaskan berkah dan karunia.

Dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad SAW. memerintahkan umat Islam untuk tidak menebang pohon selama perang, dan menekankan konservasi lingkungan dan pencegahan kehancuran. Karena itu, melestarikan lingkungan adalah kewajiban agama bagi setiap Muslim. Dalam hadis, menanam pohon, dan menabur benih akan dipandang sebagai amal jariah, sebagai sunnah al-hasanah dengan ganjaran, baik di dunia berupa terjaganya keseimbangan alam, sumber pangan dan papan (untuk kasus lingkungan) serta balasan akhirat.

미사역
미사역

KITAB III

Prospek IKN Nusantara di Masa yang Akan Datang
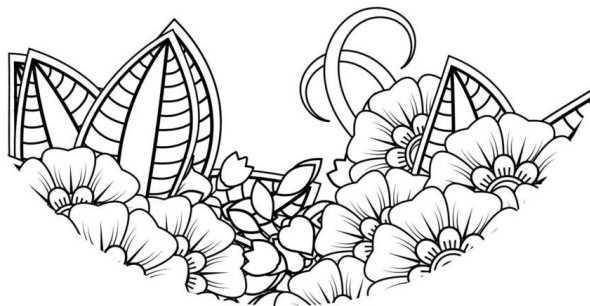
A. Analasis Dampak Lingkungan

Rencana pemindahan ibu kota baru (IKN) ke Kalimantan harus memperhatikan dampak-dampak yang terjadi ke lingkungan. Persetujuan masyarakat setempat dan analisa lebih lanjut tentang rencana serta kegiatan pembangunan tersebut harus diperhatikan agar tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Perjalanan pemindahan ibu kota Negara di beberapa Negara dan memiliki kesuksesan sehabis melakukan pemindahan tersebut tidak bisa serta merta memberitahu kita bahwasanya dengan memindahkan ibu kota akan sukses. Keberhasilan yang diraih tidak lain dengan memperhatikan dampak dari pembangunan tersebut kepada lingkungan dan mahluk hidup di dalam nya. Alasan umum pemindahan ibu kota Negara adalah pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan poliitik, dan pertimbangan geografis. Bencana-bencana alam yang terjadi seperti banjir di DKI Jakarta diharapkan tidak terjadi di kota yang ditujukan untuk menjadi ibu kota Negara yang baru. Perlu diperhatikan bencana-bencana yang telah atau sudah melanda di pulau Kalimantan tidak diperburuk dengan proses pembangunan dalam pemindahan ibu kota tersebut.

Ibu kota dalam KBBI adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu Negara, tempat dihimpun unsur

administratif, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ibu kota Negara atau *Capital City* atau *political capital,* berasal dari bahasa latin *caput* yang berarti kepala (*head)* dan terkait dengan kata *capital* yang terkait dengan bangunan dimana dilakukannya pusat pemerintahan utama. Jakarta sudah menjadi ibu kota Indonesia sejak ditetapkannya ibu kota Negara melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta raya tetap sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Pada bulan April Tahun 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota Negara ke luar pulau jawa. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019, pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo bahwasanya ibu kota akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Alasan Pentingnya Pemindahan Ibu Kota Negara

Mengutip dari Kompas.com, dalam paparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), disampaikan sejumlah alasan mengapa pulau jawa tidak dipilih lagi sebagai lokasi ibu kota Negara. "setidaknya ada empat alasan yang mendasari, 1. Penduduk jawa terlalu padat, 2. Kontribusi ekonomi terhadap PDB, 3. Krisis ketersediaan air, 4. Konversi lahan dijawa mendominasi." Kalimantan Timur merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah ke-4 Se-Nusantara.

Ibu kota provinsi adalah Samarinda, sedangkan Kalimantan Timur sendiri terkenal akan hasil tambangnya seperti minya, gas alam serta batu bara. Kota yang tengah berkembang di Kalimantan Timur adalah Kota Balikpapan dan Samarinda. Salah satu teluk yang terkenal di Kalimantan Timur teluk Balikpapan. Teluk tersebut telah menjadi tempat masyarakat sekitar melakukan kegiatan mata pencahariannya. Teluk Balikpapan sendiri telah mengalami bencana yang telah melandanya, salah satu diantaranya adalah tumpahnya minyak di teluk Balikpapan pada Tahun 2018 yang diakibatkan oleh patahnya pipa penyalur minyak mentah dari terminal lawe-lawe di saluran pipa antara Penajam Paser Utara (PPU) dan kilang pertamina Balikpapan. Tumpahan minyak tersebut memiliki dampak tersendiri bagi segi biologi serta perekonomian masyarakat setempat. Seperti contoh tanaman Mangrove dengan perkiraan luas 34 hektare di kelurahan karingau, satu ekor pesut mati, budidaya kepiting gagal panen, empat kawasan terumbu karang rusak dan lima kawasan padang lamun terancam mati.

Tidak hanya dampak bagi ekosistem saja tetapi ada juga dampak bagi manusia, ialah masyarakat di sekitaran tumpahan minyak mengeluh mual dan pusing akibat bau minyak yang menyengat da nada 5 orang nelayan tewas akibat kapal terbakar, satu kapal kargo ikut terbakar, serta sebanyak 162 nelayan terancam tidak bisa melaut dan masyarakat Balikpapan dan Panajam Paser Utara (PPU) terancam sulit untuk mendapatkan air bersih.

Rancangan dan Pertimbangan Pemindahan Ibu Kota Negara

Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus memperhatikan perlindungan lingkungan sebagai bagian paling utama dari pertimbangan-pertimbangan yang ada. Hal tersebut beralasan karena tingkat polusi udara di Jakarta sangat tinggi. Tingginya tingkat polusi udara tersebut makin di perparah dengan temuan bahwa *Work From Home (*WFH), yang dilakukan ditengah pandemi covid-19 ini belum cukup mengurangi polusi udara di koata Jakarta.

Polusi tersebut menjadi perbincangan tersendiri karena ditakutkan pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan hanya memindahkan masalah lingkungan berupa polusi tersebut ke wilayah ibu kota Negara baru, sementara bencana lingkungan yang sudah terjadi di dekat wilayah ibu kota baru seperti banjir yang pernah terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 di samarinda belum bisa ditangani dengan baik.

Teluk Balikpapan merupakan sebuah teluk kecil di Indonesia. Teluk Balikpapan terletak di barat selat Makassar. Atau sekitar barat daya dari Samudera pasifik. Teluk Balikpapan sendiri terletak di 3 wilayah pemerintahan, yaitu Pemerintahan Kota Balikpapan, Pemerintahan Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Paser. Perairan teluk Balikpapan memiliki banyak biota laut, seperti alga, ikan, terumbu karang, dan sebagainya.

Teluk Balikpapan sendiri memiliki komunitas yang fokus terhadap teluk Balikpapan. Komunitas ini terbentuk karena

keprihatinan serta kepedulian mereka melihat keadaan dan kondisi teluk Balikpapan. Beberapa cara untuk menjaga kelestarian dan mengangkat teluk Balikpapan ialah dengan membuat film dokumenter. Film dokumenter dipilih sebagai sarana untuk menyadarkan masyarakat karena film tersebut dapat menampilkan kejadian yang sebenarnya di lapangan, serta film tersebut menampilkan konten audio dan visual untuk membuat penontonya merasa berada dalam keadaaan yang di gambarkan di film dokumenter tersebut.

Teluk Balikpapan ialah teluk kecil di Kalimantan Timur yang menyimpan keberagaman hayati dan memiliki potensi wisata yang tinggi. Berbagai obyek vital nasional ataupun sarana produksi ekonomi kerakyatan sudah lama berlangsung dan menumpu dikawasan ini. Sudah seharusnya kawasan teluk Balikpapan ini menjadi situs yang harus di jaga. Namun, seiring berjalannya kegiatan tersebut berlangsung di kawasan teluk Balikpapan, maka tidak dipungkiri adanya kegiatan yang merusak alam dan menganggu masyarakat terutama nelayan. Nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat yang paling merasa dirugikan jika kerusakan alam terjadi di teluk Balikpapan karena nelayan hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan di teluk Balikpapan.

"kawasan Teluk Balikpapan saat ini merupakan kawasan vegetasi mangrove terbanyak. Berdasarkan perda nomor 5 tahun 2006 tentang rencana tata ruang kota Balikpapan periode 2005-2015, itu memang menjadi kawasan lindung.

Artinya secara utuh hubungan secara holistiknya menjaga teluk Balikpapan tetap lestari". Pernyataan tersebut di kemukakan Ibu Rosmarini yang mewakili Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Penyaluran bahan baku untuk keperluan pemindahan Ibu Kota Negara yang menggunakan kapal juga melintasi Teluk Balikpapan. Masalah lingkungan terkait kapal-kapal melintas di teluk Balikpapan adalah batu bara yang tidak sengaja jatuh ke laut dari kapal tongkang atau kapal pengangkut batu bara yang melintas. Hal tersebut tentunya perlu adanya konsentrasi tersendiri karena intensitas kapal yang melintas Teluk Balikpapan akan dipastikan bertambah oleh kapal-kapal pengangkut bahan keperluan pembangunan ibu kota baru. Diharapkan kapal-kapal tersebut tidak menjadi masalah baru yang akan menimbulkan limbah karena bahan yang di bawanya tidak sengaja jatuh ke perairan Teluk Balikpapan.

Selain limbah yang jatuh ke Teluk Balikpapan, pemindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan Timur akan mengambil jatah ruang orang-orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan yang hidupnya bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan di Teluk Balikpapan.

Dikatakan mengambil jatah ruang karena Teluk Balikpapan telah menjadi jalur lalu lintas kapal tongkang batu bara dan ditambah dengan jalur logistik keperluan kebutuhan pembangunan ibu kota baru. Pengembangan ibu kota baru harus dipastikan tidak menggunakan kawasan lindung atau

cagar alam, karena akan menyebabkan deforestasi tambahan dan ancaman terhadap hewan langka Kalimantan seperti orangutan serta satwa lautnya yakni pesut.

Kegiatan eksploitasi oleh korporasi ialah salah satu menjadi sumber utama dari permasalahan yang muncul dikawasan Teluk Balikpapan. Pertumbuhan korporasi di Indonesia terhitung dalam kurun waktu yang singkat dapat meningkat tajam disebabkan oleh karakternya yang sangat ekspansif dan mencakup keseluruhan bidang bisnis sehingga memiiki kemampuan untuk memperoleh laba yang besar dan berkelanjutan. Tetapi, dalam mengolah sumber daya alam dilapangan saat ini lebih memprioritaskan dalam meraup keuntungan sebanyak banyaknya tanpa pertimbangan untuk persfektif lingkungan dan sosial.

Tantangan Pemindahan Ibu Kota Baru

Pembangunan ibu kota Negara juga memberi tantangan yang cukup besar terhadap jumlah manusia yang terkena dampak rencana tersebut, diantaranya besarnya jumlah manusia yang terkena dampak, luasnya penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak itu berlangsung, sifat komulatif dampak dan berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Untuk menghilangkan kemungkinan pencemaran, dokumen yang terdapat di dalam amdal harus dilakukan secara penuh. Artinya setiap tahap yang ada didalam amdal harus di susun secara cermat sesuai dengan situasi dan

kondisi yang sebenarnya di lapangan. Selain itu, aspek fundamental yang perlu diberikan perhatian khusus adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah pengelolaan limbah, sehingga akan terwujud adanya keadilan antar generasi. Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan kepunahan jenis dari keberagaman hayati diperlukan pencegahan dini.

Tantangan-tantangan yang telah dipaparkan mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi di IKN nantinya harus ketatnya regulasi tentang pelanggaran kegiatan yang berhubungan dengan dampak kepada lingkungan. Proses pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan diharapkan memiliki kisah sukses seperti Negara-negara lain di dunia, yang lebih dulu memindahkan ibu kota negaranya. Banyaknya masalah terutama masalah lingkungan di Kota Jakarta seperti tingkat polusi nya yang tinggi diharapkan tidak terjadi di Kalimantan nantinya. Karena Kalimantan sendiri sudah memiliki ancaman polusi udaranya sendiri yaitu potensi kebakaran hutan dan lahan gambut. Potensi dampak ancaman lingkungan yang timbul harus di minimalisir guna agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

B. Konservasi Lingkungan

Disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Republik Indonesia, maka pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru ke wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, kalimantan Timur telah memiliki dasar hukum dan politik

yang kuat. Dalam proses pembangunan IKN Nusantara, diperkirakan akan menimbulkan beberapa masalah lingkungan. Beberapa permasalahan itu di antaranya adalah ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara akan menerapkan konsep *smart city* dan *forest city.* Konsep *forest city* yang diusung dalam pembangunan Ibu Kota Baru menargetkan 75% tutupan hijau. Selain itu, Masterplan Pembangunan IKN dan KLHS KLHK salah satunya merekomendasikan perbaikan dan pemulihan tutupan lahan di lansekap IKN dengan melakukan revitalisasi ruang terbuka hijau dari jenis-jenis hutan dataran rendah asli Kalimantan melalui kegiatan rehabilitasi.

Strategi Pemanfaatan Lahan Baru

Salah ide perbaikan dan pemulihan tutupan lahan di kawasan IKN adalah pembangunan miniatur hutan dipterokarpa. hutan Dipterokarpa merupakan hutan dari Jenis tanaman asli Kalimantan seperti yang memiliki batang yang kokoh, tinggi yang menjulang dan tajuk yang lebar bernilai ekonomi tinggi. Pembangunan miniatur hutan dipterokarpa akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kawasan IKN Nusantara baik secara politik, ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk memewujudkan hal tersebut

perlu dilakukan beberapa strategi seperti:1) Mengikuti strategi khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan KPI (*Key Performance Indicator)* ;2) Strategi pencarian sumberdaya bibit dan persemaian; 3) Strategi penanaman miniatur hutan dipterokarpa pada lansekap IKN Nusantara.

Pendefinisian *Forest City* untuk pembangunan IKN akan berbeda dengan konsep *Forest City* yang selama ini sudah berkembang di beberapa negara pada contoh sebelumnya. Hal ini karena lokasi IKN yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi sehingga dalam perencanaan dan pembangunannya perlu difokuskan pada upaya untuk mempertahankan dan merestorasi hutan.

Penerapan konsep *Forest City* di IKN tidak seperti contoh penerapan konsep tersebut di kota lain yang menghutankan kembali kotanya yang telah terbangun dengan penyediaan RTH. Namun, pendefinisian ini tetap merujuk pada beberapa hal atau ciri yang telah dikembangkan seperti dominasi vegetasi hutan, dan tutupan pohon yang luas karena masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan IKN. Oleh karena itu, definisi *Forest City* yang lebih sesuai untuk rencana pembangunan kota baru di Wilayah IKN adalah sebagai berikut: "Kota hutan yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan dan dengan pendekatan lanskap yang terintegrasi untuk menciptakan kehidupan

yang berdampingan dengan alam".

Di dalam konsep pembangunannya, *Forest City* akan dirancang sesuai kondisi alam untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam, dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya memaksimalkan penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati, serta pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Konsep *Forest City* secara lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan Prinsip, Kriteria dan Indikator. Prinsip *Forest City* adalah asas atau pokok dasar yang menjadi acuan dalam Konsep *Forest City* yang mengacu kepada pembangunan kota yang dapat mempertahankan fungsi ekologis hutan dan tujuan pembangunan dalam konsep *Forest City* lainnya seperti penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Prinsip ini merupakan payung perumusan Kriteria dan Indikator. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang dapat juga dikatakan sebagai standar untuk mencapai kondisi ideal atau standar untuk mengetahui/menilai apakah kemajuan yang dicapai dapat memenuhi Prinsip. Sedangkan indikator merupakan komponen atau variabel yang mencerminkan atau mengindikasikan situasi atau kondisi yang diperlukan oleh kriteria.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 telah merumuskan beberapa prinsip *Forest City* untuk perencanaan Calon Ibu Kota Negara sebagai rekomendasi dari hasil KLHS *Rapid Assessment* yang meliputi Volume 4 No. 1. Berbasis pengelolaan DAS; 2. Memiliki jaringan ruang hijau yang terstruktur; 3. Memanfaatkan sekitar 50 persen wilayah untuk dikembangkan; 4. Konsumsi air harus sangat efisien; 5. Beban pemenuhan konsumsi penduduk rendah; 6. Memiliki kualitas udara yang baik dan suhu udara rata-rata sejuk; 7. Memiliki kualitas air permukaan yang baik; 8. Melindungi habitat satwa; 9. Memiliki kualitas tutupan lahan yang baik dan terevitalisasinya lansekap "Hutan Hujan Tropis". Prinsip *Forest City* yang telah disusun oleh KLHK tersebut dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pembangunan Wilayah IKN secara keseluruhan, seluas 256.000 ha.

Namun, untuk menerapkan prinsip tersebut dalam pembangunan kota perlu disesuaikan kembali agar penerapannya tepat pada konteks kota maupun perkotaan dan dapat menjadi contoh untuk penerapan Konsep *Forest City* di kota lain. Selain itu, prinsip *Forest City* harus mengacu kepada visi pembangunan IKN menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, serta benchmarking dari beberapa kota yang menerapkan *Forest City*. Beberapa prinsip *Forest City* untuk Kawasan IKN seluas 56.000 Ha.

C. Sikap Parpol Terhadap Pemindahan Ibu Kota

Dimuatnya Rancangan Undang-Undang tentang

Ibu Kota Negara dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 memunculkan kembali polemik terkait pemindahan ibu kota negara. Jika sebelumnya isu yang dilontarkan para penentang kebijakan ini adalah isu regulasi, anggaran, dan lingkungan, maka isu saat ini berubah menjadi pandemi Covid-19.

Pemerintah diminta untuk fokus memikirkan penanganan pandemi Covid-19 daripada memindahkan ibu kota. Ditetapkannya kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai prioritas tahun 2021 telah menimbulkan polemik. Tiga fraksi dari sembilan fraksi di DPR RI, yakni Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN mengritik rencana pembahasan RUU di tengah pandemi. Fraksi Demokrat berpendapat bahwa pembangunan IKN harus ditunda karena menyedot anggaran yang besar. Pemerintah seharusnya fokus menggunakan anggaran untuk penanganan Covid-19 (bbc.com, 26 Maret 2021). Namun, pemerintah melalui Kepala Bappenas menjawab bahwa anggaran pemindahan ibu kota 99 persen berasal dari swasta.

Sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan IKN menggunakan skema APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan melalui pihak swasta. Pemerintah juga berpendapat bahwa pembangunan IKN dapat menjadi penggerak ekonomi dan bermanfaat memulihkan ekonomi warga yang anjlok akibat pandemi. Bertentangan dengan pendapat itu, peneliti INDEF menilai bahwa proyek pembangunan IKN tidak urgen. Pemulihan

ekonomi dapat dilakukan melalui pemerataan ekonomi di berbagai daerah dan tidak harus dengan memindahkan IKN.

Mengingat bahwa DPR RI dan pemerintah telah menetapkan RUU IKN sebagai prioritas RUU tahun 2021, sementara pihak yang menentang menjadikan alasan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menunda pembahasan RUU IKN, menjadi menarik untuk melihat masa depan pembahasan RUU IKN. Kebijakan untuk memindahkan IKN telah lama digagas, bahkan sejak pemerintah Hindia Belanda. Namun, secara serius wacana itu baru disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo meminta izin dan dukungan dari DPR RI dan rakyat Indonesia untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan (kompas.id, 4 April 2021).

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden mengumumkan keputusan pemerintah memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini merupakan hasil kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2016. Ada lima pertimbangan yang dijadikan alasan pemilihan kedua wilayah tersebut, yaitu (1) risiko bencana di kedua wilayah itu jauh lebih minim dibandingkan wilayah lain di Indonesia; (2) lokasi terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia; (3) lokasi berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda; (4) infrastruktur yang relatif lengkap; (5)

tersedia lahan 180 ribu hektare yang dikuasai pemerintah Selanjutnya rencana pemindahan IKN dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam lampiran Perpres tersebut dinyatakan manfaat pemindahan IKN, antara lain memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; mendorong pemerataan pembangunan ke luar Jawa, dan reorientasi pembangunan dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris, sehingga mengurangi beban Pulau Jawa.

Secara umum, Bappenas mengemukakan bahwa pemindahan IKN tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan, namun juga berdampak pada pemerataan ekonomi nasional. Untuk dapat mewujudkan berpindahnya IKN, sejak 17 Desember 2019 pemerintah telah memasukkan RUU tentang Ibu Kota Negara ke dalam Prolegnas. Menurut Bappenas, ada 43 peraturan perundang-undangan yang harus direvisi atau dicabut terkait pemindahan ibu kota negara, yang terdiri atas undang-undang, peraturanpemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Bappenas melihat kemungkinan dilakukannya pendekatan *Omnibus Law* dalam merespons persoalan regulasi dalam pemindahan ibu kota negara.

Kebijakan memindahkan IKN merupakan sebuah kebijakan publik untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi DKI Jakarta. Kebijakan publik tersebut

membutuhkan formal otorisasi dalam bentuk undang-undang, tidak hanya sebuah keputusan pemerintah atau sebuah program kegiatan semata.

Polemik yang muncul dalam penyusunan kebijakan publik merupakan hal yang wajar, karena banyaknya aktor yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Aktor yang terlibat biasanya memiliki berbagai kepentingan yang harus dipertemukan. Aktor yang menentang RUU IKN mengemukakan persoalan pada aspek regulasi dan anggaran.

Dalam perspektif regulasi, sebelum ada UU IKN, pemerintah tidak boleh melakukan aktivitas pembangunan dalam rangka pemindahan IKN. Terkait anggaran, pembangunan IKN harus menggunakan APBN, tidak boleh dari pihak swasta, karena menyangkut kedaulatan Negara. Untuk keberhasilan implementasi kebijakan, penting untuk memastikan tahap formulasi kebijakan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yaitu memperhatikan seluruh suara para aktor. Tahap formulasi merupakan fase kritis dari sebuah proses kebijakan. Formulasi kebijakan yang buruk akan menghasilkan kegagalan dalam implementasi.

Fase formulasi ini terdiri atas agenda setting (pengenalan masalah); proposal terhadap solusi; dan pilihan solusi. Rencana IKN sudah mulai dikaji sejak tahun 2016 dan baru muncul ke publik pada Agustus 2019. Tampak bahwa proses pemindahan IKN kurang dibicarakan dalam ranah publik.), berita mengenai IKN lebih searah dari pemerintah.

Bahkan, proses partisipasi publik dalam membahas persoalan IKN dikhawatirkan bersifat semu. Hal ini ditandai dengan proses penentuan lokasi, di mana masyarakat setempat tidak dilibatkan, namun hanya diinformasikan saja. Sekalipun tokoh masyarakat menerima dengan baik rencana pemindahan IKN ke wilayahnya, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemindahan IKN ke Kalimantan justru akan merusak ekosistem dan berdampak pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya di tanah tempat IKN baru. Informasi searah dari pemerintah tampaknya juga terjadi di ranah politik. DPR RI bersikap menunggu masuknya RUU IKN dari Presiden, sehingga sekalipun sudah dimuat dalam prioritas tahun 2020, naskah RUU IKN beserta naskah akademik tidak kunjung dikirimkan ke DPR RI.

Sementara itu pemerintah sudah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka pemindahan IKN, seperti mengadakan sayembara desain tata kota IKN yang baru; penentuan dewan penasihat; penentuan konsultan asing; rekrutmen pegawai khusus pemindahan IKN; hingga mencari investor (Hamdani, 2020:44). Pada tahun 2020 pemerintah telah melaksanakan tiga agenda besar pemindahan IKN, yakni penyusunan dan penyelesaian rencana induk; penyusunan kajian lingkungan hidup strategis; serta penyusunan dan penetapan rencana tata ruang

Pada Semester I Tahun 2021, pemerintah juga telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem; pengadaan lahan untuk akses jalan dan sarana

prasarana; perencanaan teknis dan studi kelayakan detail engineering design (DED) kawasan, dan penyiapan KPBU. Selanjutnya pada semester II Tahun 2021 akan dilakukan pembangunan sarana prasarana sumber daya air dan energi; *ground breaking* pembangunan; pembangunan bangunan strategis dan sarana prasarana dasar penunjang; dan pembangunan infrastruktur transportasi.

Boleh jadi sikap pemerintah ini diambil karena adanya pendapat Mahfud MD sebagai ahli hukum tata negara yang menyatakan bahwa berdasarkan hukum tata negara. Presiden memiliki hak dan kewenangan membuat kebijakan untuk memindahkan IKN. Oleh karena itu, Presiden dapat mengambil semua tindakan terkait pemindahan IKN, dan undang-undang dibutuhkan pada saat semuanya sudah siap dipindahkan. Namun, sikap ini justru akan menimbulkan polemik yang mengganggu implementasi sebuah kebijakan.

Setelah pembicaraan mengenai IKN vakum selama setahun, seiring dengan pandemi Covid-19, isu mengenai IKN kembali diangkat setelah masuknya RUU IKN dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Kalangan DPR RI yang tidak setuju mengemukakan persoalan situasi pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menunda pembahasan RUU IKN. Anggaran untuk pembangunan IKN sebaiknya dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Demikian pula pendapat kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa berbagai manfaat yang diperoleh dari pemindahan IKN dapat ditempuh dengan cara lain.

Pemerintah diminta tetap fokus mengatasi pandemi Covid-19. Bagi pemerintah, persoalan yang dikemukakan pihak-pihak yang tidak sepakat untuk membahas RUU IKN dapat dijawab dengan mudah. Terkait regulasi, pemerintah optimistik bulan Mei 2021 sudah akan mengirimkan draf RUU dan naskah akademik IKN.

Menyangkut anggaran, pemerintah akan membebankan 99 persen pembiayaan pembangunan IKN pada dana swasta, meskipun sebelumnya Bappenas menyatakan proyek pembangunan IKN akan menelan biaya hingga Rp466,98 triliun dengan pembiayaan menggunakan skema APBN Rp91,29 triliun; KPBU Rp252,46 triliun; dan pihak swasta Rp123,23 triliun. Terkait lingkungan, Kepala Bappenas menyampaikan bahwa aspek lingkungan juga merupakan elemen utama dalam pembangunan IKN. Terakhir, Kepala Bappenas menyampaikan bahwa kesuksesan menghadapi pandemi Covid-19 menjadi salah satu prasyarat yang harus dipenuhi agar pembangunan IKN dapat Melihat proses formulasi 28 kebijakan IKN di atas, dapat dikatakan bahwa masih terdapat persoalan dalam proses formulasi yang dapat menghambat implementasi IKN nantinya. Kekhawatiran berbagai pihak dijawab dengan jawaban yang tidak konsisten oleh pemerintah. Hal ini justru menimbulkan pandangan negatif terhadap rencana pemindahan IKN.

D. Civil Society dalam IKN Nusantara

Kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan adalah sebuah cermin yang menjadi patokan apakah suatu

sistem demokrasi dalam masyarakat tertentu sudah berjalan atau tidak. Oleh sebab itu, negara yang menganut sistem demokrasi harus mampu menjamin kebebasan masyarakat sipil untuk berserikat, membentuk sebuah kelompok, dan mengeluarkan pendapat, serta kebebasan pers sebagai salah satu upaya berjalannya demokrasi.

Salah satu kontribusi tersebut adalah ide mengenai munculnya ibu kota negara Indonesia yang disinyalir mempunyai dampak positif dan negatif. Kontribusi tersebut adalah bukti pelaksanaan kekuasaan sipil yang mesti diakomodir sebagai pembeda antara negara sistem demokrasi dan negara yang otoritarian.

Di Indonesia salah satu representasi dari civil society adalah munculnya berbagai organisasi non pemerintah. Organisasi tersebut bersifat mandiri dan tidak menggantungkan kebutuhannya kepada pemerintah. Dibentuknya kelompok civil society dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen sejumlah warga negara yang peduli terhadap persoalan ekonomi, sosial, dan positif. Demokrasi dan civil society ibarat dua sisi mata koin yang sama. Dua-duanya tidak dapat dipisahkan karena memiliki kekuatan aktif dalam mengontrol sebuah negara.

Apakah Indonesia telah memenuhi substansi demokrasi dalam kasus pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang sesuai dengan prosedur demokrasi dominan? Terjemahan kontestasi politik dan pelembagaan demokrasi "*will of all*" dan "*common good*" dapat dianalisa dalam peristiwa ini.

Dalam laporan penelitian prioritas nasional (Maftuchan & dkk, 2021) Rizal Sukma menegaskan bahwa yang berlangsung di Indonesia masih "*defective elections, resilient democracy*", sementara Ben Bland berpendapat "*resilient elections, defective democracy*". Masing-masing dari pendapat tersebut memang memiliki alasan dalam melakukan penilaian. Akan tetapi jelasnya, dalam berbagai tekanan gelombang sosial dan politik, Indonesia mempunyai proses yang lebih maju jika dibandingkan dengan beberapa negara yang terdapat di Kawasan ASEAN, bahkan negara Arab yang memang notabene negara monarki.

Keberadaan mayarakat tidak hanya berkontribusi dalam memperkuat *check* dan *balances*, namun juga berperan dalam proses pelaksanaan agenda pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Inilah salah satu indikasi berjalannya demokrasi substantif yang memastikan demokrasi berjalan tidak hanya ditentukan oleh "hajat demokrasi", namun juga semua elemen aktor.

Bentuk konsistensi pemerintah dalam demokrasi adalah membentuk UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemindahan ibu kota negara. Bahkan pembahasan partisipasi tersebut dituangkan dalam bab khusus, yang mempersilakan masyarakat turut berperan aktif dalam pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.

Analisa Pemindahan Ibukota Negara (Hutasoit, 2018) ada beberapa alasan wacana pemindahan ibu kota muncul,

diantaranya adalah :

1. Pindahnya ibu kota maka secara otomatis kantor presiden dan kantor pemerintahan juga akan pindah ke ibu kota baru. Bisa jadi Jakarta menjadi pusat bisnis dan keuangan.
2. Pemindahan hanya berlaku sebagai tempat pusat pemerintahan, sedangkan ibu kota tetap di Jakarta, maka proses politik menjadi sederhana dan domain pemerintah. Contoh Malaysia ibu kota tetap Kuala Lumpur, namun pusat pemerintahan dipindah ke Putra Jaya.

Dengan diresmikannya ibu kota negara yang kemudian dinamai Nusantara, menjadi tanda bagi masyarakat sipil Indonesia ikut serta dalam pembangunan baik secara sosial dan politik maupun jangkauan tempat.

Setidaknya ada tiga komponen inti civil society (Argenti, 2018), yakni otonomi, akses masyarakat, dan arena public terbuka. Otonomi artinya masyarakat yang terlepas dari segala apapun pengaruh negara, sepenuhnya harus bersumber dari masyarakat itu sendiri baik kegiatan dan kemandirian. Komponen kedua adalah setiap warga negara baik individua tau kelompok harus mempunyai akses terhadap aktor dalam pemerintahan untuk melakukan partisipasi politik. Apakah menyampaikan aspirasi, menulis ide di media massa, bahkan unjuk rasa menyampaikan pendapat. Komponen terakhir adalah arena publik, di mana masyarakat selain dapat mengatur dirinya sendiri, juga tersedia ruang publik untuk masyarakat mengembangkan dirinya secara maksimal dalam segala aspek kehidupan dan

lepas dari campur tangan negara.

E. Tantangan dan Peluang dalam IKN Nusantara

Penetapan Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Raya Tetap sebagai ibukota yang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga sebagai pusat bisnis. Keadaan tersebut menjadi daya tarik, sehingga menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia mencari mata pencaharian.

Akibatnya, urbanisasi terjadi secara besar-besaran. Masyarakat menganggap Jakarta sebagai kota primadona yang mampu menghantarkan kesejahteraan hidup. Lama kelamaan Jakarta semakin padat. Kemudiaan antisipasi padatnya kota, Presiden Soeharta menerapkan sistem transmigrasi dalam upaya pemerataan jumlah penduduk dan ekonomi di Indonesia. Upaya ini masih berjalan hingga saat ini.

Sejak muncul wacana mengenai pemindahan ibu kota negara baru yang kemudian dinamai Nusantara, pemerintah Indonesia tidak lepas dari kritikan dari sebagian besar masyarakat. Masih banyak yang belum siap dengan kondisi pemindahan. Berbagai spekulasi muncul tentang dampak positif dan negatifnya. Positifnya, ada yang menganggap ini adalah langkah besar yang harus didukung, akan terjadi pemerataan ekonomi, keadilan jarak tempuh, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari sisi negatifnya, ada yang

berpendapat tentang masalah hutan tropis yang terancam, masyarakat Kalimantan yang belum siap, dan alasan lainnya.

Seorang pakar perencanaan kawasan urban (Hutasoit, 2018), mengemukakan bahwa sebenarnya permasalahan klasik yang sudah lama membelit Jakarta bisa diselesaikan tanpa pemerintah harus memindahkan ibukota. Solusinya adalah perlu pembenahan infrastruktur yang menjadi fakto penyebab terjadinya kemacetan Panjang, banjir, kepadatan penduduk, dan bangunan.

Pemindahan IKN bukan seperti membalikkan telapak tangan. Muncul ide, lalu langsung eksekusi. Banyak tantangan yang harus menjadi kajian baik internal maupun eksternal dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan memang sangat perlu ditinjau dari aspek lingkungan. Begitupun dengan persetujuan masyarakat setempat yang harus diperhatikan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kesuksesan beberapa negara telah berhasil memindahkan ibu kota tidak serta mesta menjadi sinyal bahwa jika kita memindahkan ibu kota, maka negara juga akan ikut sukses. Alasan yang sangat umum adalah pertimbangan sosial ekonomi, politik, dan pertimbangan geografis. Yang perlu ditinjau juga adalah bencana alam seperti banjir di Jakarta diharapkan tidak terjadi di ibu kota negara baru. Walaupun kita tahu, Pulau Kalimantan sudah mengalami banyak tumpahan kebocoran muatan kapal-kapal yang melintas (Parwata, 2020). Hal ini berpotensi akan semakin tinggi jika pemindahan ibukota

sudah mulai melakukan proses pembangunan. Tentu kuantitas kapal yang melintas akan semakin banyak untuk mengangkut bahan keperluan proses pembangunan.

Isu lingkungan yang menjadi salah satu perhatian utama pembangunan IKN Nusantara juga disorot oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Nur H. Rahayu memprediksi potensi dampak lingkungan yang akan mengganggu biodiversitas, kualitas lanskap wilayah, turunnya stok karbon hutan, pencemaran limbah, sampah, ketersediaan air, dan sistem drainase. Terlebih kawasan IKN dikelilingi oleh ekosistem esensial dan kawasan lindung yang tidak hanya memerlukan esktra hati-hati, namun juga perlu mempertahankan fungsi dan peran ekologi kawasan IKN di Kalimantan. Maka dari itu perencanaan pembangunan IKN harus disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana penyusunan masterplan IKN.

Selain tantangan, tentu ada peluang yang akan Indonesia dapatkan. Banyak pakar menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara akan mendorong investasi ke ibu kota dan provinsi di sekitarnya (Malisan & dkk, 2022). Investasi tersbeut akan meningkatkan output beberapa sektor seperti jasa penggerak perekonomian dan perdagangan antar wilayah dan provinsi. Hal ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dengan tujuan pemerataan ekonomi, pembangunan, pengembangan SDM. Berdasarkan kondisi

Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia, maka tentu produktivitas pembangunan harus ramah lingkungan dan mempertahankan lingkungan Kalimantan.

Peluang tersebut di atas bisa dilakukan dengan penerapan dua konsep. Yakni smart city, smart mobility dan pengembangan Pelabuhan (smart port).

Dewasa ini, era teknologi tidak bisa kita hindari. Dalam skup pertanian saja sudah menggunakan teknologi yang memungkinkan seorang petani tidak harus datang ke ladang atau ke kebun untuk memastikan tanamannya tumbuh subur dan terjaga asupan air. Tentu perkembangan teknologi ini perlu diintegrasikan dalam pembangunan wilayah ibu kota baru yang memadukan antara teknologi dalam tata Kelola sehari-hari dan efisiensi pelayanan publik. Peningkatan ini ditargetkan kebutuhan dasar penduduk, 1) perumahan dan layanan yang memadai, aman dan terjangkau, 2) sistem transportasi yang aman, berkelanjutan, dan ramah terhadap anak-anak, Wanita, dan orang cacat, serta lanjut usia.

Pengembangan berikutnya adalah Pelabuhan (smart port) yang berbasis automatisasi dan digitalisasi. Kebutuhan aspek transportasi Pelabuhan tidak lagi dinilai sebagai tempat bongkar pasang barang. Sebagai negara maritim, kebutuhan ini harus disesuaikan dan dikembangkan menjadi smart port yang terintegrasi dengan smart city.

F. Nawa cita, Lingkungan, dan Komitmen Bersama

Istilah nawa cita adalah Bahasa atau kata yang diserap

dalam Bahasa Indonesia yang berarti *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, dan keinginan).

Salah satu poin dari nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka kesatuan. Ditetapkannya IKN Nusantara di kawasan Kalimantan adalah wujud dari komitmen nawa cita tersebut.

Agenda pemindahan ibu kota adalah agenda kunci untuk menata Indonesia menjadi negara yang lebih baik, selain diiringi oleh agenda-agenda strategis lainnya. Pemindahan ini adalah jalan untuk menata perekonomian nasional yang tumbuh dengan kualitas, pemanfaatn sumber daya alam, daya dukung lingkungan dan SDM yang efisien.

Secara geografis (Hutasoit, 2018) pengertian kota dimaksud sebagai sebuah tempat yang penduduknya padat, rumah berkelompok, dan mata pencaharian bukan sebagai petani. Maka dari itu, pemanfaatan desain smart city diterapkan di ibu kota negara baru untuk menghindari ancaman salah tata kelola. Kesalahan tersebut misalnya ketidak mampuan pemerintah dalam mengantisipasi ancaman alam yang semakin meningkat, perubahan iklim, penurunan permukaan tanah akibat pembangunan yang eksploitatif terhadap tanah dan sumber daya air.

Komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah simbolis mengumpulkan tanah dan air yang berasal dari 34 provinsi yang sarat akan makna sebagai komitmen bersama. Dengan penyatuan tanah dan air tersebut di IKN

Nusantara diharapkan bukan hanya sebagai simbol semata, tapi juga mengingatkan kepada seluruh wilayah Indonesia bahwa ada 1 kawasan yang harus dijaga Bersama, yaitu Nusantara.

G. Nasib Jakarta Setelah Tidak Lagi Menjadi Ibu Kota

Sebagaimana telah disebutkan di paragraf sebelumnya, runtut perjalanan Jakarta sebagai ibu kota bukanlah perjalanan yang mudah. Jakarta adalah ibu kota yang memeliki peran sebagai pusat negara dan pemerintahan yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Ditetapkannya kawasan Kalimantan menjadi ibu kota negara baru yang dinamakan Nusantara bukan akhir bagi Jakarta untuk terus gemerlap sebagai kota metropolitan di Indonesia. Hemat penulis, keberadaan Indonesia akan sama seperti negara-negara lain yang sudah lebih dahulu membedakan antara kawasan pemerintahan dan pusat kawasan perekonomian. Bahkan di beberapa negara besar seperti China dan Rusia sudah membagi wilayah negaranya tidak hanya kawasan ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga menetapkan kawasan khusus penelitian, kawasan teknologi dan informasi, kawasan industri, dan masih banyak lagi.

Hal tersebut tentu berbeda dengan Indonesia yang masih menjadikan Jakarta sebagai pusat dari semua aspek. Makan tidak heran jika penduduk Indonesia memusatkan Jakarta sebagai kawasan keberhasilan dalam mencari nafkah, karir dan lain sebagainya.

Padatnya Jakarta semakin terseok-seok dengan berbagai program yang memaksa untuk bermukim di ibu kota ini. Muncul wacana reklamasi beberapa pulau untuk mengantisipasi potensi banjir dan kawasan penduduk Jakarta.

Penulis berpikir jika Jakarta mutlak sebagai pusat perekonomian Indonesia dan Nusantara adalah pusat pemerintahan.

KITAB IV

Paradigma Politik Islam
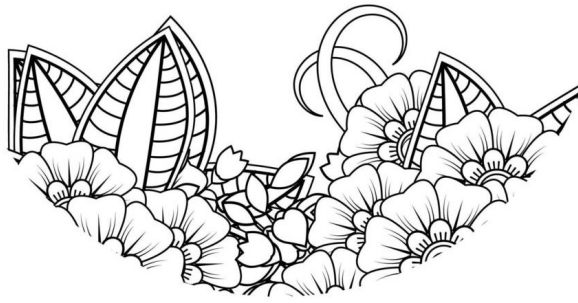
A. Negara dalam Perspektif Islam

Allah SWT Menciptakan Jin dan Manusia untuk beribadah kepada-Nya. Dalam upaya menjalankan ibadahnya, baik ibadah dalam bentuk penghambaan kepada Allah maupun ibadah dalam bentuk muamalah kepada sesama makhluk-Nya, manusia sebagai makhluk yang lemah tentu saja membutuhkan sebuah tempat yang aman untuk menjalankan rutinitas ibadahnya. Islam sebagai agama yang selamat dan memerintahkan umatnya untuk terus menjaga keselamatan di dunia dan akhirat memerintahkan pendirian negara sebagai bentuk ikhtiar menjaga keselamatan jiwa.

Allah SWT berfirman dalm QS. Al-Hujurat Ayat 13.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Meskipun terdapat dalil yang memerintahkan pendirian sebuah negara, tetapi tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang bentuk atau tata cara dalam menjalankan sebuah negara. Nabi Muhammad SAW hanya memberikan contoh dalam Piagam Madinah, bahwasanya dalam menjalankan sebuah negara haruslah dapat merangkul semua pihak dan saling menghargai antar sesama masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada penjelasan lebih detail terkait tata cara bernegara, tetapi secara konsep dapat disimpulkan bahwa konsep bernegara haruslah memuat nilai-nilai kebaikan dan keadilan.

Namun dalam menentukan sesuatu yang dikatakan baik dan adil tersebut tentu saja setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing. Maka untuk menjaga objektivitas dan menyatukan setiap perspektif, Allah SWT memerintahkan untuk bermusyawarah وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Ali-Imran/3 : 159). Sehingga dari musyawarah tersebut bisa disepakati bagaimana tata cara bernegara, yang kemudian kesepakatan itu menjadi sebuah aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Daar Al-Islam atau Daar As-Salam?

Hingga saat ini konsep negara masih menjadi perdebatan di kalangan umat muslim. Hal ini pula lah yang menyebabkan adanya kelompok-kelompok yang menginginkan berdirinya negara islam, dimana negara harus menjadikan Al-qur’an

dan Hadist sebagai sumber hukum utamanya. Sementara pada realitasnya, di dunia ini tidak hanya terdapat satu agama saja (islam), sehingga apabila dalam suatu negara hanya menggunakan hukum salah satu agama, tentu saja akan menuai pro dan kontra, khususnya dari pemeluk agama lain yang berbeda.

Daar al-islam dan daar as-salam, masing-masing terdiri dari dua kata. Kata daar berasal dari kata dasar *dāra, yadūru, dawran,* makna kata kerjanya adalah berputar, berkeliling, menyesuaikan. Atau jika diubah dengan bentuk *tadawwara*, bermakna menjadikan bulat. Kemudian jika berubah menjadi *dāran* dengan bentuk pluralnya *ad-diyār* bermakna rumah, negara, wilayah, dan bermakna untuk menyebut dunia atau akhirat.

Menurut istilah, kata *daar* merupakan suatu tempat yang di dalamnya terdapat halaman dan bangunan. Dari pengertian inilah kata daar ini ditafsirkan sebagai wilayah atau negara. Sedangkan kata *al-Islām* atau *as-Salām sendiri*, masing-masing berasal dari dasar kata yang sama, yaitu dari kata *salima, yaslamu, salman*. Bentuk masdarnya bisa *Salamun* atau *as-Salam* maupun *as-Salâm* dengan menggunakan mad setelah lam. Maknanya pun beragam diantaranya yaitu damai, sejahtera, hormat, tunduk, berserah, dan lain-lain.

Daar al-Islam pada makna yang sebenarnya adalah semua negara yang di dalamnya terdapat hukum-hukum islam atau yang penduduk muslimnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam. Daar al-islam merupakan negara yang semua atau

sebagian besar penduduknya terdiri dari kaum muslimin, semua negeri yang dikuasai dan diperintah oleh kaum muslimin walaupun sebagian penduduknya tidak terdiri dari kaum tersebut. Di sisi lain, meskipun negara yang diperintah dan dikuasai oleh non muslim selama kaum muslimin yang berada di didalamnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam, hal tersebut juga termasuk daar al-islam.

Daar al-islam dan daar as-salam sebetulnya memiliki makna yang sama, namun pada realitasnya dalam menafsirkannya umat muslim memiliki perbedaan. Sehingga, ada sebagian kelompok yang berpendapat bahwa daar al-islam adalah negara islam, dimana negara tersebut harus menggunakan hukum islam dan dipimpin oleh pemimpin muslim. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa daar al-islam lebih tepat disebut daar as-salam yang berarti negara damai, dimana hukum yang berlaku pada negara tersebut tidak harus menggunakan sumber-sumber keagamaan, tetapi pada substansinya tetap sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub di dalam Al-qur'an.

B. Relasi Agama dan Negara dalam Islam

Konsepsi tentang relasi agama dan negara sampai saat ini masih mengalami perdebatan diantara pakar-pakar islam. Pada mulanya, persoalan tentang relasi agama dan negara diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mushthafa Kemal Pasya, yang puncaknya ditandai dengan penghapusan khilafah dan diikuti dengan pencabutan Islam sebagai agama resmi negara, serta

penghapusan syariat sebagai sumber hukum tertinggi negara. Akhirnya, Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan antara urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan.

Secara terminolog, agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Mahakuasa, serta taat kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya. Sementara negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, serta mempunyai kesatuan politik dan berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Agama dan Negara adalah dua hal yang berbeda, namun sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab agama dan negara bersifat simbiosis mutualisme, dimana agama membutuhkan negara sebagai media untuk memperluas dakwahnya, sementara negara membutuhkan agama sebagai salah satu sumber pengambilan hukum dan aturan yang berlaku pada wilayah tersebut.

Ibn Khaldun berpendapat bahwa agama memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan sebuah negara. Ia melihat agama berperan menciptakan solidaritas dikalangan rakyat dan solidaritas akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, sehingga perhatiannya akan lebih terarah pada kebaikan dan kebenaran. Dengan agama

pula tujuan solidaritas menjadi satu. Sehingga ketika agama dapat menyatukan sebuah solidaritas, maka akan dengan mudah mengakomodir masyarakat untuk membentuk sebuah negara.

Menurut J. Philip Wogemen, secara garis besar hubungan negara dan agama memiliki tiga pola. Pertama yaitu pola teoraksi, dimana agama menguasai negara. Kedua, kebalikan dari teoraksi, yaitu erastianisme, dimana negara mengkooptasi agama. Ketiga, hubungan yang sejajar antara agama dan negara.

Pada hakikatnya islam adalah agama yang mengatur setiap sisi kehidupan, termasuk cara bernegara yang dijelaskan melalui ayat-ayat Al-qur'an yang mengatur tentang etika, sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Tentang relasi antara agama dan negara dalam Islam, menurut Munawir Sjadzali terdapat tiga aliran. Aliran pertama, merupakan aliran yang menganggap bahwa islam adalah agama sempurna yang mencakup segala hal, termasuk masalah negara. Maka dari itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama. Sebaliknya, urusan agama adalah urusan negara.

Aliran kedua yaitu aliran yang menganggap bahwa islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad tidak mempunyai misi mendirikan sebuah negara. Aliran ketiga yaitu aliran yang menganggap bahwa islam tidak mencakup segala-galanya,

tetapi mencakup prinsip dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bernegara.

Tentang relasi agama dan negara, sekitar 1400 tahun silam Nabi Muhammad Saw., telah mencontohkan dengan diusulkannya sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Seperti halnya, Piagam Madinah adalah salah satu perwujudan relasi antara agama dengan negara. Dimana, Piagam Madinah menggunakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-qur'an dalam upaya menyatukan semua agama dan golongan yang berada di Madinah.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia tidak menjadikan Al-qur'an sebagai sumber hukum dalam bernegara. Tetapi pada substansinya, Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi sudah selaras dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-qur'an. Hal ini sesuai dengan bunyi pada Sila Pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Secara tidak langsung Indonesia merupakan negara yang berasaskan ketuhanan. Meski Indonesia tidak pernah menyatakan sebagai negara agama, tetapi pada esensinya Indonesia merupakan negara beragama.

C. Sejarah dan Perkembangan Politik NU

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. NU merupakan organisasi yang turut berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari upayanya melawan pemerintah

kolonial hingga mengisi kemerdekaan dengan cara menjaga Indonesia dan dasar-dasar negara sampai saat ini.

Sejak awal berdirinya, NU merupakan organisasi keagamaan yang fungsi utamanya sebagai wadah perjuangan para ulama untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam.

Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama

Jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyyah (organisasi), ia terlebih dahulu ada dan berwujud jama'ah yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik tersendiri.

Latar belakang berdirinya NU erat kaitannya dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik islam saat itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan. Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham sunni ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun yang sama juga di Indonesia munculah sebuah gagasan yang diberikan oleh KH Wahab Chasbullah kepada KH. Hasyim Asyari untuk mendirikan NU. Hingga dua tahun setelahnya, baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama dan mendirikan NU pada tahun 1926.

Berdirinya Nahdlatul Ulama sendiri tidak terlepas dari sebuah tujuan mulia, yaitu untuk mempertahankan ajaran Ahlussunnah Waljamaah dan menyebarluaskannya. NU sebagai organisasi keagamaan hanyalah sekedar penegasan

formal dari mekanisme informal para ulama yang berpaham pada salah satu dari empat imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali yang tradisi-tradisinya sudah berjalan dan sudah ada jauh sebelum lahirnya organisasi NU.

Dinamika Perkembangan Politik NU

Sejarah perkembangan NU secara luas dibagi dalam tiga periode, diantaranya ialah periode awal, dimana NU berfungsi sebagai organisasi sosial keagamaan. Periode kedua, selain berfungsi sebagai organisasi sosial keagamaan, NU juga berfungsi sebagai partai politik atau menjadi unsur formal dari sebuah partai. Periode ketiga, mulai kembali ke aktivitas-aktivitas sosial keagamaan.

Pada awal 1940-an, NU berkembang dengan cepat. Kemudian pada Maret 1942, setelah pergantian penjajahan Belanda ke Jepang, banyak tokoh Nahdatul Ulama yang dijebloskan ke penjara seperti yang dialami KH Hasyim Asy'ari dan KH Mahfudh Shiddiq karena dituduh menggalang kekuatan masa untuk melawan saudara tua. Pada masa pendudukan Jepang dan menjelang detik-detik kemerdekaan ini, NU juga memegang peranan penting, yaitu dengan lahirnya wadah baru Masyumi sebagai badan federasi organisasi-organisasi islam. Pimpinan tinggi Masyumi diserahkan kepada KH Hasyim Asy'ari. Melalui Masyumi, NU terlibat aktif melakukan kerja-kerja sosial-politik menuju Indonesia merdeka yang dilakukan bersama para

tokoh nasionalis dan ormas islam. Apabila saat penjajahan Jepang aktivitas NU hanya fokus pada perjuangan membela kemerdekaan agama, nusa dan bangsa, maka pada tahun 1945-1949 lebih diperkuat lagi. Pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai politik, hal ini dikarenakan kekecewaan NU terhadap masyumi terkait masalah distribusi kekuasaan dalam struktur pimpinan partai federasi.

Perubahan status NU dari organisasi keagamaan ke partai politik tentu saja menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap NU hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi ada juga yang berpandangan bahwa sikap NU tersebut merupakan wujud dari fleksibilitas politiknya mereka.

Pada awal tahun 1960, semua partai politik diminta untuk mengubah anggaran dasarnya dan menyatakan menerima Pancasila. Semua partai diharuskan memiliki wawasan nasional dan tidak boleh terlibat dalam pemberontakan apapun. Saat itu NU mengalami perbedaan pendapat mengenai keabsahan keikutsertaannya dalam DPR yang baru. Di satu pihak, KH Bishri Syansuri, KH M Dahlan, Imran Rasyadi dan KH Ahmad Shiddiq menganggap DPR saat itu anti demokrasi. Bagi Kiai Bishri, ikut dalam sebuah DPR yang tidak semuanya dipilih oleh rakyat itu tidak sah menurut fiqh.

Sementara menurut KH. Wahab Chasbullah, masuknya NU ke dalam formasi DPR saat itu tidak ada pilihan lagi, sebab jika tidak kemungkinan NU akan dibubarkan atau ditutup

aksesnya dari pemerintah. Menurutnya, NU harus masuk DPR untuk mengimbangi kekuatan partai-partai sekuler.

Pada tahun 1970, Presiden Soeharto mulai membatasi peran partai politik. Hal ini membuat NU masuk ke dalam wadah politik baru khusus bagi partai politik berbasis islam. Pada tahun 1984, NU mulai memutuskan hubungannya dengan politik praktis dan kembali kembali kepada aktivitas-aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan. Namun, meskipun sudah menyatakan untuk tidak lagi terlibat dalam politik praktis, sebagian warga NU masih belum bisa sepenuhnya melepaskan diri dari politik praktis.

Disaat NU mulai kembali fokus kepada aktivitas-aktivitas non politik, namun saat PBNU memprakarsai pendirian PKB dan naiknya Gus Dur sebagai presiden RI tahun 1999 melalui voting di MPR, semangat berpolitik kembali berkobar di kalangan warga Nahdatul Ulama.

PMII, NU, dan Era *Disruption*
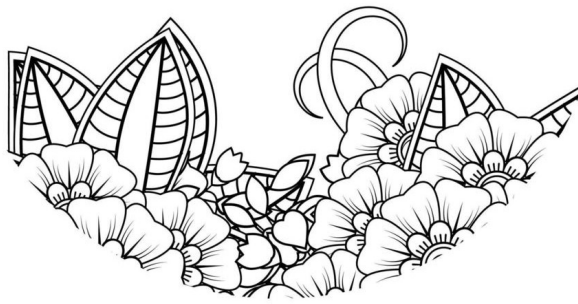
A. PMII, NU dan Masa Depan Indonesia

Pada *Global Innovative Indect* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum,* ada tiga kategori negara berdasarkan konteks inovasinya, yaitu *Most Innovative Countrys atau* Negara dengan tingkat Inovasi tinggi*, Innovative Countrys* Negara dengan tingkat inovasi menengah*, dan Low Innovative Countrys* Negara paling tidak Inovatif*.*

Dalam urutan *Most Innovative Country* ada negara Singapura, Korea dan Jepang. Sedangkan dalam *Innovative Country* ada China, Malaysia, Thailand, Mongolia dan India. Negara Indonesia berada pada daftar *Low Innovative Country* yaitu pada urutan ke 14. Sedangkan dalam rangking dunia Indonesia menempati posisi ke 85 sejak tahun 2018, 2019 hingga 2020, pada tahun 2021 Indonsia turun peringkat pada urutan ke 87 Dunia.

Hal ini jauh berbeda dengan negara tetangga yaitu Malaysia yang berada pada tingkat ke 37 Dunia. Dalam data *Global Competitivnes Indect* Indonesia pada tahun 2018 berada diperingkat 45 dunia, sedangkan pada tahun 2019 Indonesia turun 5 point menjadi urutan ke 50 dunia.

Sebenarnya apa sih yang membuat bangsa Indonesia rendah dalam hal Inovasi dan Kompetisi? Berdasarkan hasil dari data *Global Innovation Indect* Indonesia berada dalam

urutan bawah karena rendahnya nilai *Innovation Capability* dan rendahnya nilai ICT. Dituliskan Indonesia memiliki nilai *Inovation Capability* yang skor nya 38 dari 100 point. Kemudian *Information and Comunication Technology (ICT) Adobtion* Indonesia skor nya 55 dari 100 Point.

Apakah yang salah dengan Indonesia? Apakah pemudanya yang enggan melakukan inovasi, sistem pendidikanya yang kurang mendorong inovasi, regulasi kita yang kurang ramah terhadap inovasi atau jangan-jangan memang bangsa Indonesia dilahirkan ke dunia sebagai manusia rendah inovasi?

Indonesia Bukan Lahir Sebagai Negara Rendah Inovasi

Saya pikir kalau Indonesia dilahirkan sebagai negara yang rendah inovasi kok kayaknya enggak. Sebelum Indonesia lahir, pada tahun 1928 para pemuda dengan perkumpulan melakukan sebuah Inovasi berupa adanya sumpah pemuda. Bisa dikatakan itu adalah Inovasi yang sangat brilian pada zaman nya. Dimana ketika rakyat Indonesia yang waktu itu belum bernama Indonesia, masih dalam kekolotan, kesukuan dan kedaerahan, bahkan dalam kehidupan beragama lalu, para pemuda tampil bersatu dengan dikumandangkannya lagu 'Indonesia Raya' karya WR. Soepratman. Dengan deklarasi pada 28 Oktober 1928 tersebut, seluruh tanah dari kota Sabang sampai Merauke, menjadi satu kesatuan, seluruh suku menjadi satu kebangsaan, dan menggunakan satu bahasa yaitu Indonesia.

Sumpah pemuda adalah Inovasi *brilian* pada masanya, Kemudian NU membangkitkan semangat perlawanan pada laskar santrinya sehingga mampu melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu hingga mereka terusir pergi, namun itu adalah masa lalu bagaimana dengan sekarang? Apa yang harus PMII dan NU lakukan untuk menghadapi perkembangan masa depan bangsa Indonesia dimasa mendatang?

Sebelum Indonesia lahir saja anak muda Indonesia sudah melakukan Inovasi, kemudian apakah benar kita dilahirkan menjadi bangsa yang tidak inovatif sejak dalam kandungan, kok rasa-rasanya tidak. Saya melihat rendahnya Inovasi Masyarakat Indonesia malah lebih cenderung karena sistem pendidikan termasuk kaderisasi PMII-NU dan juga Regulasi Indonesia sendiri.

Tanggung Jawab PMII dan NU

Sebagai Organisasi Mahasiswa terbesar di Indonesia, PMII turut memikul tanggung jawab besar untuk perkembangan SDM pemuda di Indonesia juga dalam mengawal regulasi yang mendukung berkembangnya Inovasi masyarakatnya. Bagaimana tidak, PMII adalah organisasi yang basisnya adalah para Intelektual. Tentu para Intelektual inilah yang kedepanya akan menjadi ujung tombak kemajuan bangsa, kalau bukan mereka lantas siapa lagi.

Begitu pula dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan Organisasi Masyarakat Islam terbesar di

Indonesia, Sesuai dengan namanya yang berarti Kebangkitan Ulama atau bisa dalam artian lain kebangkitan orang-orang yang berilmu, NU dengan semangat kebangkitan nya memiliki tanggung jawab moril untuk mendukung terwujudnya Negara Indonesia yang semakin maju ditengah gempuran Disrupsi.

Memang tidak bisa dipungkiri tanggung jawab ini bukan hanya milik NU dan PMII semata, tentu juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan setiap masyarakat kita. Namun NU dan PMII sebagai dua organisasi besar yang sama-sama memiliki semangat kebangkitan harus segera mengambil peran untuk mendorong kader-kadernya melakukan inovasi. Kita tentu ingat, tanpa adanya inovasi dan gerakan kita hanya akan menjadi air dalam kubangan, yang semakin lama semakin keruh.

Inovasi NU dan PMII Kini

Pada dasarnya ditubuh NU sendiri telah terjadi inovasi seperti adanya aplikasi NU Online yang sekarang memiliki lebih dari 100 ribu pengguna. Didalam PMII juga turut melakukan Inovasi dengan peluncuran E-PMII dalam segi administrasi dan Penerbitan Buku dalam segi Literasi. Namun apakah hanya sebatas itu NU dan PMII akan berinovasi? Apakah iya Inovasi NU dan PMII hanya akan terjadi pada tataran pengurus besarnya saja? Apakah tidak mungkin disektor cabang NU dan PMII mampu melakukan inovasi? Menurut saya sangat mungkin bagi NU dan PMII disetiap

cabang bahkan oleh setiap kadernya dapat melakukan inovasi.

Seperti dapat kita lihat pada pengurusan NU DKI Jakarta, yang kini telah kita lihat telah melakukan inovasi dengan membentuk Word Halal Center (WHC) NU, seharusnya dapat ditiru oleh pengurus NU yang lain, guna melakukan Inovasi dalam merespon perkembangan isu global.

Kemudian kita juga dapat belajar dari seorang Anjas kader PMII Komisariat Universitas Brawijaya yang telah menciptakan aplikasi kelas dunia untuk penyandang disabilitas. Dimana dengan semangatnya melakukan inovasi dibidang aplikasi Anjas telah banyak menolong masyarakat penyandang disabilitas.

Selain Gerakan yang bersifat langsung menyentuh masyarakat, hal semacam inilah yang semestinya oleh NU dan PMII terus dorong, sehingga NU dan PMII tidak hanya terlipat oleh arus disrupsi, namun juga mampu untuk mengambil peran dalam momentum perkembangan Inovasi di Indonesia dengan menyumbangkan SDM terbaiknya. Sehingga Indonesia dimasa mendatang tidak lagi menjadi negara dengan tingkat Inovasi yang rendah, melainkan menjadi negara dengan segudang Inovasi, dimana aktor inovasi tersebut adalah kader NU dan PMII sendiri.

B. Generasi Emas 2045: PMII, NU dan Tantangan Global

Menyambut satu abad kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah merencanakan untuk pembangunan

sumber daya manusia yang unggul. Tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mewujudkan generasi emas yang memilki kecerdasan komprehensif, yang produktif dan menguasai teknologi. Perlu waktu yang panjang dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkannya.

Pemeritah mencanangkan empat pilar untuk Indonesia Emas 2045. Yang pertama pembangunan SDM yang unggul. Pemerintah memiliki harapan sumber daya manusia yang memiliki wawasan yang luas, berbudi luhur, unggul dalam segala bidang, dan berbudaya, serta mampu menguasai teknologi. Pendidikan yang baik dan proses pembelajaran yang efetif akan meningkatkan kualitias SDM, sedangkan penguasaan teknologi akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Yang kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah menginginkan Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dengan terus mendorong investasi, perdagangan, industri dan jasa, maritim, dan pariwisata. Dengan membangun infrastruktur yang baik diharapkan perekonomian Indonesia bisa sejajar dengan negara maju.

Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dilakukan untuk pengentasan kemiskinan dengan mengurangi kesenjangan dimasing-masing daerah. Pembangunan jalur transportasi antar pulau atau jalur transportai ke daera-daerah terpencil. Pemerintah juga mengusahakan untuk melakukan pemerataan pendapatan di

masing-masing daerah.

Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah menginginkan Indonesia Emas 2045, adanya reformasi kelembagaan dan birokrasi untuk mewujudkan pemeritahan yang mengutamakan kepentingan publik. Pemerintah juga melakukan penguatan antikorupsi, sistem hukum nasional dan penguatan dalam sektor ketahanan dan keamanan.

Keempat pilar ini tidak akan mampu diwujudkan tanpa keterlibatan masyarakat. Maka penting bagi masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045, untuk menyelesaikan masalah ekonomi, korupsi, dan kemiskinan yang ada di Inonesia.

PMII dan NU menghadapi Indonesia Emas 2045

Setelah pemerintah mencanangkan Indonesia Emas 2045, Alumni PMII merespon dengan mengadakan Muktamar Pemikiran Dosen PMII dengan tema SDM unggul PMII Menuju Indonesia emas pada 5-7 Apil 2022. Beberapa pembicara didatangkan untuk memaparkan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Beliau adalah Abdul Halim Iskandar yang memaparakn Indonesia Emas dari perspektif pembangunan desa dan Ida Fauziah yang menjabarkan ketenagakerjaan Indonesia Emas.

PMII dan NU memilki peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. PMII dengan SDM yang berasal dari perguruan tinggi dan NU dengan latar belakang pesantren

bisa bersama-sama ikut serta menciptakan SDM yang unggul. melalui pesantren kita mampu mencetak manusia Indonesia yang yang bermoral, dan memilik kedalaman pengetahuan agama. Sedangkan melalui PMII selain mencetak generasi yang berkualitas juga bisa melakukan advokasi kebijakan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi atau pengawasan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan merata.

Masyarakat Indonesia dahulu dikenal ramah dan sopan santun, namun di era gloalisasi ini tedapat degradasi moral yang berakibat pada tidak adanya sikap menghormati kepada orang yang lebih tua ataupun pada orang lain. Maka selain pengawasan orang tua, pesantren merupakan tempat yang tepat untuk membentuk jiwa manusia Indonesia yang bermoral dan berakhlakul karimah.

Hal ini senada dengan yang disampaikan ketua LP Ma'arif NU PBNU, KH. Arifin Junaidi dalam webinar pendidikan nasional. Beliau berujar bahwa proses pendidikan yang terpenting di era pandemi ini adalah pendidikan yang berkarakter. Guna menyongong Indonesia Emas 2045. Islam tidak hanya mengajarkan literasi/iqra saja, yang jauh lebih penting dalam proses pendidikan adalah akhlakul karimah, karakter dan berketrampilan sosial.

Selain membentuk pribadi muslim yang bermoral dan akhlakul karimah, pesantren juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Wawasan kebangsaan penting untuk disampaikan kepada generasi muda Indonesia untuk

mengingat kesejarahan Indonesia. Peran penting pesantren lainnya adalah menjaga persatuan Indonesia dengan mengajarkan Islam yang menjunjung tinggi moderasi. Muslim yang bisa menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kemanusiaan, menginggat Indonesia merupakan negeri multikultural, beragam agama, ras, dan suku bangsa.

Namun ada satu hal yang perlu direnungkan bersama-sama. Apakah kader dan angota baik dari PMII maupun NU sudah unggul dalam teknologi? Jika jawabannya belum, perlu kesadaran bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola teknologi, sehingga dalam pembangunan SDM unggul Indonesia Emas 2045 kita bisa menjadi bagian dari generasi emas bangsa.

Jika SDM Indonesia Emas 2045 dibangun dengan dasar pendidikan pesantren, bangsa Indonesia akan memiliki generasi emas yang bermoral dan memiliki jiwa nasonalis yang tinggi. Sehingga dalam penggunaan teknologi tidak disalahgunakan untuk merugikan negara ataupun masyarakat Indonesia.

Selain pembangunan SDM unggul, pemerintah juga melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. PMII mampu berperan untuk mengelola potensi wisata di masing-masing daerah. Dengan adanya wisata yang dikelola dengan baik, pengentasan kemiskinan sedikit demi sedikit akan teratasi, karena dengan adanya wisata yang dibuka dengan pengelolaan profesional akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

PMII dan NU Menghadapi Tantangan Global

Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, dimana usia produktif masyarakat Indonesia berada di angka 70%. PMII dan NU harus mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi. Kebutuhan pengetahuan dan teknologi harus dikejar jika selama ini kader dan anggota dirasa masih kurang menguasai. Percepatan pembangunan SDM bagi kedua organisasi ini harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan.

Bonus demografi bisa menguntungkan bagi bangsa Indonesia, namun jika tidak mampu menjawab tantangannya akan menjadi bencana, seperti yang di sampaikan oleh M. Hasanuddin Wahid dalam opini Jawa Pos 6 April 2021. Hassanudin dalam opininya yang berjudul *Dari Pergrakan untuk Indonesia Emas* menyebutkan bahwa kondisi Indonesia yang sedang menyambut bonus demografi berupa generasi emas *golden generation* pada 2045 mendatang. Karena itu, perlu penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul agar potensi bonus demografi itu tidak menjadi bencana demografi *demographic disaster.*

PMII dan NU yang memiliki basis massa yang besar diharapkan mampu membantu menjawab tantangan bonus demografi dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, unggul dalam segala bidang, dan memiliki pengetahuan yang luas.

C. Aktualisasi Nilai Aswaja dalam Pergerakan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada umumnya sama halnya dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran *Ahlussunnah Wal Jama'ah (*Aswaja). Pengamalan sumber dasar Keagamaan dari doktrin Aswaja tersebut, membentuk adanya nilai-nilai sikap dan keselamatan dan kebahagiaan guna menghadapi tantangan dari luar secara fleksibel. Nilai-nilai tersebut yakni *Tawassuth* (Moderat), *Tawazun* (Seimbang), *Tasamuh* (Toleran) dan *I'tidal* (Berkeadilan).

Di tengah gempuran era disrupsi yang semakin menguat, nilai-nilai yang terkandung dalam (Aswaja) menjadi signifikan untuk dimunculkan dan diaktualisasikan. Nilai-nilai Aswaja dapat dijadikan sebagai *counter* dalam membendung perkembangan arus disrupsi.

Aktualisasi Nilai Aswaja dalam Peningkatan Kuantitas dan Kualitas

Mengingat dan melihat fenomena dalam era disrupsi ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Fenomena ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi NU dan ormas-ormas lain di Indonesia di tengah gempuran era disrupsi yang menyebabkan umat Islam tidak mau berormas, tidak mau ber-ustadz, dan tidak berorientasi pada ulama. Sama halnya dengan PMII, banyaknya kader yang terdata di dalam E-PMII sedikit sekali yang memahami bagaimana sikap dan peran yang seharusnya dilakukan kader PMII dalam mengambil peran mengaktualisasi nilai-nilai Keaswajaan.

Senada dengan hal tersebut, dilansir dari *NU.Online* Kiai Masduqi pernah menuturkan bahwa sekarang ini banyak sekali bermunculan ulama baru seperti halnya Ulama *Google*, hal inilah yang dinamakan disrupsi. Kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa perkembangan arus di era disrupsi tidak hanya menjadi tantangan semata, akan tetapi menjadi sebuah tanda bahaya bagi PMII dan juga NU untuk mengambil peran penting dalam menjembatani permasalahan yang ada sekarang ini. Dengan demikian sebagai kader PMII sudah seharusnya mengambil peran dalam menyebarkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Aswaja.

Aktualisasi Nilai *Tawassuth* oleh Kader PMII

PMII dan juga NU dituntut harus mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas khususnya bagi generasi muda dalam meneruskan tongkat estafet perjuangan organisasi dan juga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara tidak langsung hal ini tertuang dalam nilai-nilai Aswaja, yakni *Tawassuth* (moderat) yang kerap kali diartikan untuk menghindari sikap atau perilaku ekstrem atau memiliki kecendurungan ke arah dimensi jalan tengah. Pemikiran moderat ini dinilai penting untuk kemudian diterapkan dan diaktualisasikan oleh kader PMII dalam mengambil sebuah kebijakan penting atau mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai permasalahan. Hal ini bisa kita reflesikan bersama bahwa apa yang kemudian terjadi belakangan ini bisa dijadikan pembelajaran dalam langkah pengambilan keputusan. Hal ini tercermin bahwa kita sebagai

kader NU yang memiliki nilai-nilai Aswaja tidak sepantasnya menelan problematika isu-isu yang berkembang tanpa mengkaji ulang apa yang seharusnya dilakukan dan peran apa yang harus dijalankan kader NU yang notabene PMII dalam mengambil suatu kebijakan penting.

Nilai Keseimbangan *Tawazun* yang Dibangun Kader PMII

Poin kedua dalam aktualisasi Nilai-nilai Aswaja adalah *Tawazun* (Seimbang), berimbang dalam hal ini diartikan sebagai konteks pengambilan sikap yang berimbang/ seimbang dan harmonis dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bijak. *Tawazun* (Berimbang) ini merupakan manifestasi dari sikap keberagaman yang mengindari sikap ekstrem. Hal ini juga perlu diterapkan mengingatkan perbedaan di Indonesia sangat beragam dan mengandung unsur perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, hal ini tidak menjadikan alasan sebagai kader PMII dalam menghilangkan nilai-nilai toleransi yang diajarkan kepada setiap individu kader untuk mencintai keberagaman dalam toleransi.

Kita kerap kali menemukan perbedaan, tidak hanya keberagamaan agama. Sedikit halnya perbedaan pendapat pun sering kita temukan dalam keseharian baik dalam sebuah kelompok kecil maupun di dalam sebuah organisasi. Tentu, permasalahan tersebut adalah hal sepele yang jarang diterapkan oleh kader PMII. Saya menilai bahwa PMII dalam menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Aswaja

masih belum tuntas hingga akar-akarnya. Artinya, masih banyak pembelajaran dan refleksi diri dari setiap perilaku yang tercerminkan.

Konsep Aktulisasi Nilai *Tawamuh*

Selanjutnya adalah aktualisasi nilai *Tasamuh* (Toleransi) yang sangat besar terhadap pluralism pikiran. Berbagai pikiran yang tumbuh dalam masyarakat Muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif. Keterbukaan yang demikian lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan Aswaja memiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik Internal Umat Islam.

Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam. Wacana hukum Islam oleh banyak ahli dinilai sebagai wacana pemikiran keislaman yang paling realistik dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosial. Dalam sosial budaya, Aswaja banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat, tanpa melibatkan diri dalam substansinya, bahkan tetap berusaha untuk mengarahkannya.

Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam Aswaja tidaklah memiliki signifikasi yang kuat. Sikap toleran Aswaja telah memberikan makna khusus dalam hubungannya dengan dimensi kemanusiaan yang luas dengan nilai-nilai tersebut, Islam menjadi agama yang mampu berdialektika secara dinamis dengan budaya lokal.

Ini artinya, kader PMII memiliki kesempatan dan peluang

besar untuk mengambil peran dalam keterlibatan toleransi seperti apa yang kemudian Gus Dur ajarkan. Mengenai hal ini, kita masih perlu banyak bercermin dengan konsep dan realitas yang dibangun Gus Dur mengapa hingga saat ini masih bisakita merasakan dampak toleransi yang sangat luar biasa. Dan mengapa juga toleransi yang dibangun Gus Dur masih sangat relevan untuk diterapkan hingga saat ini? Tidak hanya dari satu kalangan agama saja, akan tetapi dari berbagai golongan agama sangat setuju akan kebermanfaatan yang dibangun oleh Gus Dur.

Konsep Penerapan Keadilan

Maksud adil dalam hal ini adalah mampu menjadi kader yang dapat melihat, menimbang, menyikapi dan menyelesaikan segala permasalahan secara adil. Adil yang dimaksud dalam hal ini adalah melakukan segala sesuatu baik berupa sikap, Tindakan, perilaku dalam kehidupan sama.

Saya sepakat dengan salah satu sastrawan besar kebanggan saya Pramoedya Ananta Toer, bahwa beliau pernah mengatakan seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Ini artinya, sebagai aktivis kader PMII sudah sepantasnya apa yang kita lakukan mampu dipertanggungjawabkan. Tidak hanya bertindak, akan tetapi bagaimana dampak yang kemudian terselesaikan secara adil dan bijaksana. Jangan sampai kader PMII tidak mampu mengaktualisasi keadilan dalam

dirinya sendiri. Jika dalam diri sendiri masih belum bisa memerdekaan keadilan, lantas bagaimana dengan PMII yang notabene organisasi kepemudaan terbesar? Mari sama-sama saling berbenah.

D. Prospek NU dan PMII dalam Merespon Dinamika Global

Berbicara tentang era Disrupsi sama halnya membahas era yang dikenal dengan era inovasi dan perubahan yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan dan *landscape* ke dalam cara dan tatanan baru. Dalam merespon perubahan besar tersebut, tentu memerlukan hal baru yang lebih inovatif dalam melaksanakan aktivitas organisasi. Hal ini menyangkut ketertinggalan dalam menjawab tantangan dan persaingan global, yang nantinya akan membawa pengaruh di dalam suatu organisasi.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, dilansir dari *media pmii.id* (PB PMII, 2021) bahwa PMII terdiri dari 5.115 Pengurus Rayon, 1.664 Pengurus Komisariat, 231 Pengurus Cabang, dan 25 Pengurus Koordinator Cabang. Tentu hal ini menjadi tugas bersama tentang bagaimana sistem gerakan yang kemudian bisa digarap PMII dalam menghadapi era perubahan yang bisa dikatakan hancur-hancurnya. Yakni era disrupsi yang jauh lebih menegangkan di bandingkan era-era sebelumnya. Meskipun demikian, sampai saat ini PMII masih belum jelas secara gerakannya.

Melihat fenomena tersebut, jangan sampai besarnya kuantitas kader PMII tidak mampu membuat Gerakan bersama dalam memperbaiki sistem kualitas kader yang dimiliki. Hal ini kita bisa refleksi dan berkaca bersama dari tuturan Gus Dur bahwa "Kalau HMI selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, sementara PMII tak pernah tau tujuannya apalagi caranya." Seharusnya tuturan tersebut menjadi gambaran dalam memetakan setiap permasalahan, keresahan dalam menjawab berbagai tantangan tentang doktrin isu Gerakan PMII yang selalu tidak selaras berbanding dengan tujuan.

Bercermin dalam hal tersebut, kita sebagai kader muda NU dan juga kader PMII yang kini menjadi pelaku era Disrupsi harus mempunyai gagasan inovasi-inovasi baru. Baik berupa inovasi gagasan dalam bidang literasi, digitalisasi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya yang sekiranya membawa dampak perubahan yang bisa dirasakan. Bukan berarti inovasi ini berupa penjiblakan yang direnovasi kembali menjadi sebuah inovasi. Akan tetapi, inovasi gagasan baru yang dimiliki kader PMII yang mampu membawa pengaruh besar bagi kader dan warga Nahdliyin.

Era Disrupsi ini menjadi sebuah keresahan berbagai pihak terlebih bagi PMII sendiri. Hal ini terbukti dari bagaimana PMII merespon perkembangan era disrupsi sekarang ini. Sebagai kader PMII sudah seharusnya bergerak sebagai pelaku inovasi, bukan hanya menjadi penonton dan penikmat saja tanpa tergerak membangun sebuah inovasi gagasan

yang dapat diimplementasikan. PMII yang merupakan organisasi Gerakan dan kaderisasi yang berlandaskan *Ahlusunnah Waljamaah* yang hingga kini masih terus eksis dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara harus terus *mengupgrade* perkembangan. Kemajuan inilah yang kemudian menuntut PMII untuk terus dinamis mengikuti dan memperbaiki sistem. Jangan sampai, pola organisasi yang dibangun lebih dari setengah abad ini lenyap dengan sendirinya hanya tertinggal karena perkembangan era yang tidak bisa dikejar.

Tantangan PMII dan NU di Era Disrupsi

Sebagai pelaku di era disrupsi, setiap individu kader dituntut keras keluar dari zona nyaman untuk menumbuhkan segala kreativitasnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa, di era yang segalanya berubah ini ketika kita tidak memiliki kompetensi dan aktualisasi dalam diri maka secara otomatis kita akan tertinggal jauh dari yang lainnya.

Ini artinya, tolak ukur dalam sistem perkembangan disrupsi bergantung bagaimana kesuksesan kita mengikuti arus utama yang berkembang. Jika tidak, maka bersiaplah untuk tertinggal jauh dengan yang lainnya. Meskipun demikian, sebagai warga NU era ini membukakan pengetahuan kita untuk bisa menyandingkan diri kita ke depan. Kita tahu bahwa tidak lama lagi tenaga-tenaga manusia secara tidak langsung akan tergantikan oleh mesin-mesin pabrik. Hal ini memperlihatkan secara kompleks

bahwa jika kita hanya sebagai pengikut saja tidak cukup, harus ada target yang digapai sebagai tombak pencapaian diri dalam sebuah organisasi.

Pola Organisasi yang Dibangun PMII

Inovasi adalah salah satu aspek penting dalam sebuah organisasi. Hal ini juga dikatakan oleh Jimenez and Valle (2007:83) *"The main reason for this respond to environmental challenges faster and to exploit new products and market opportunities better then noninnovative companies."* Inovasi ini yang kemudian membawa paradigma baru dalam sebuah peningkatan kualitas di dalam sebuah organisasi. Seperti apa yang diusung Ketua PB PMII M. Abdullah Syukri bahwa Paradigma baru yang digagas saat ini berbeda dengan paradigma sebelumnya, yakni paradigma kritis, transformatif dan juga produktif.

Tidak hanya sekadar penambahan diksi di dalam paradigma baru PMII, akan tetapi kader PMII harus memerhatikan dan juga melaksanakan penambahan dalam menjawab segala tantangan pola organisasi. Hal ini dilakukan karena mengingat belakangan ini dirkursus paradigmatik sedikit mati mengingat PMII kerap kali gugup dalam menghadapi revolusi industri terlebih sekarang sudah menghadapi era disrupsi.

Yang kemudian bisa diterapkan sebagai kader PMII yakni mulai memahami bahwa pola organisasi yang diterapkan dan dibangun PMII tidak sebatas tulisan dan refleksi semata.

Akan tetapi lebih kepada bagaimana implikasinya demi kemajuan organisasi.

SDM Sebagai Aktualisasi Peningkatan Kualitas Organisasi

PMII sebagai organisasi kepemudaan yang notabene menganut *Ahlusunnah Waljamah* sudah seharusnya mampu menjawab tantangan. Bagaimana tidak? NU sebagai ormas besar dan PMII sebagai kader kepemudaan terbesar yang memiliki jumlah kader terbanyak harus mampu menjawab tantangan dan juga Gerakan nyata sebagai tombak ukur percontohan OKP dan Ormas yang lainnya. Hal ini dilakukan mengingat di dalam sebuah organisasi seringkali kuantitas tidak memiliki pengaruh besar jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas.

Era disrupsi merupakan peluang sekaligus tantangan terhadap peningkatan kualitas organisasi. Peluangnya dalam rangka meningkatkan kinerja serta kesiapan kader sebagai sumber daya manusia menuju kinerja terbaik, dan tantanganya adalah bagaimana kesanggupan dari sebuah organisasi sebesar PMII melakukan peningkatan kapasitas secara menyeluruh.

Perlunya peningkatan SDM karena, banyaknya kader PMII yang kemudian tidak mrmiliki arah secara jelas atau disorientasi. Masih sering kita temui bahwa banyaknya kader PMII belum menemukan jati dirinya atau bahkan sekedar kompetensi yang dimiliki saja masih kurang. Hal ini yang kemudian menyebabkan kita tertinggal jauh dengan

organisasi kepemudaan lain. Meski demikian, tidak menutup mata bahwa secara ketertinggalan tersebut masih bisa kita kejar jika sumber daya kita memiliki kualitas yang sepadan dengan kuantitasnya.

Lemahnya Literasi Kader PMII

Melihat hasil survei yang dilakukan Program *for International Student Assessment (PISA)* (Mendagri: 2021) menemukan bahwa literasi di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini juga tidak jauh berbeda dari sebagian besar kader PMII yang tersebar luas di berbagai daerah. Dalam hal menulis, kader PMII harus terus ditingkatkan. Hal ini melihat masih sedikitnya kader yang mampu menulis dengan baik.

Seharusnya di era disrupsi yang sedang berlangsung ini, kita memahami bahwa sebagai kader PMII kita mengenal salah satu pendiri PMII yakni Sahabat Mahbub Djunaidi. yang mana beliau adalah penulis. Bahkan ada tuturan beliau yang seharusnya menjadi cambuk bagi kita “Aku akan menulis dan terus menulis sampai aku tidak mampu menulis” akan tetapi apa yang kita lakukan sekarang ini masih belum cukup membuktikan bahwa kader PMII Sebagian besar menekuni literasi.

Alasan tersebut seharusnya sudah cukup kuat mengikat kita bahwa kita dilahirkan oleh pendiri yang sangat luar biasa. Mampu menorehkan sejarah dan mengenang sejarah melalui tulisan. Mampu membuat *Framing* media secara

baik ataupun buruk pun dapat dilihat dari bagaimana kita mengatur tulisan dan menguasai media.

Di Era disrupsi siapapun yang ingin berkuasa yakni dialah yang mampu menguasai teknologi. Hal ini juga kemudian diimbangi dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki dalam literasi. Baik literasi kepenulisan maupun literasi digital yang kita miliki.

Akan tetapi sejauh ini, masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya literasi organisasi dalam mengcover berjalanya organisasi di masa-masa mendatang. Minimal yang dilakukan saat ini yakni mampu membaca peluang yang kemudian bisa dieksekusi melalui gagasan dan juga tulisan-tulisan kita. Hal demikian sangat perlu digalakkan mengingat rendahnya minat baca kader PMII, rendahnya literasi menulis kader PMII dan juga arah gerak yang ada di dalam Gerakan setiap kader.

KITAB VI

Rekomendasi
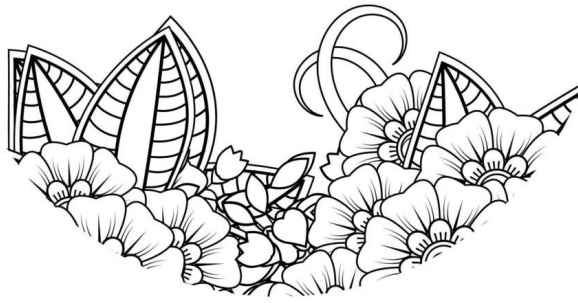
A. Ahlusunnah Wal Jamaah Solusi Penanganan Krisis Ekologi

Marvel Studio pernah sukses besar pasca mengeluarkan film *Avanger: Infinity War* pada tahun 2018. Diketahui bahwa film *science fiction* superhero ini sukses meraup pendapatan lebih dari USD 2 miliar (lebih Rp27 triliun) di seluruh dunia. Dalam film ini Thanos diilustrasikan sebagai sosok antagonis yang membuat seluruh dunia mengalami kehancuran total. Adapun alasan kenapa Thanos memiliki hasrat besar untuk melakukan genosida di bumi yaitu lantaran adanya over populasi, sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Sehingga ia berfikiran bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia yaitu setengah dari populasi harus dimusnahkan.

Apabila diamati secara holistik, alur cerita film *science fiction dibuat tidak mungkin tanpa ada pertimbangan atau pesan moral yang ingin disampaikan. Pesan moral krisis ekologi yang disematkan dalam film infinity war ini memiliki linieritas dengan statement yang pernah diungkapkan oleh fisikawan* Stephen Hawking dalam wawancaranya bersama *The Guardian* pada akhir 2016 sebelum ia meninggal dunia.

> *"Perhaps in a few hundred years, we will have established human colonies amid the stars ..."*

Hawking hingga mengeluarkan *statement* seperti ini tentu bukan tanpa alasan. Apabila dianalisa secara luas, hal ini dapat terjadi berdasarkan beberapa faktor. Pertama *akibat* perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Kedua over populasi hingga meningkatkan tingkat kemiskinan, pengangguran hingga kriminalitas. Ketiga adanya penyakit epidemik yang memusnahkan manusia secara massif, dan yang keempat adalah perang nuklir yang terjadi antar negara.

Dalam artikel ini kita akan mencoba memberikan titik poin terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Sebab saat ini perubahan iklim menjadi ancaman besar yang paling mendesak. Berbagai hal dapat terjadi apabila perubahan iklim tidak segera diatasi, seperti pemanasan suhu bumi yang berdampak pada cuaca tidak menentu. Padahal, perubahan iklim ini memberikan berdampak besar terhadap habitan seluruh populasi mahluk hidup di dunia. Lantas pertanyaan yang muncul adalah Apa penyebab munculnya perubahan iklim? Dan bagaimana peran kita dalam mengatasi perubahan iklim?

Titik Masalah Ekologi dan Perubahan Ikim

Tidak sedikit pihak yang berpikiran bahwa salah satu penyebab perubahan iklim yaitu pola pikir manusia dalam upaya optimalisasi pemanfaatan lingkungan untuk

memenuhi kebutuhannya. Salah satu penyebabnya adalah lantaran adanya mis-orientasi pembangunan yang dilakukan. Pembangunan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan beberapa aspek yang kait berkelindan seperti sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

Sebagaimana Sonny Keraf dalam karyanya berjudul *sutainable development,* manusia saat ini memiliki pola pikir yang menempatkan lingkungan sebagai obyek untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal, statement dari Magdoff dan Foster yang dikutip dari *the epiceru readers* juga memiliki kebenaran yang perlu dipertimbangkan. Ia menjelaskan bahwa apabila manusia tidak memiliki batasan dalam mengumpulkan kekayaan, hal ini akan berdampak pada munculnya fenomena kemiskinan besar di masyarakat lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Mansur Fakih dalam karyanya yang berjudul runtuhnya teori pembangunan juga menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh manusia perlu diberikan perhatian lebih atau diwaspadai. Alih-alih memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara luas, pembangunan sering kali diselipi kepentingan akumulasi modal oleh *Multi National Corporation* (MNC) dan *Trans National Corporation* (TNC) yang sulit untuk dibendung. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa apabila pembangunan ekonomi dilakukan secara tidak terkendali maka akan memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Aswaja Solusi untuk Krisis Ekologi

Pembanguan ekonomi pada dasarnya tidak menjadi masalah apabila dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal untuk masa yang akan datang. Sebagaimana hemat penulis, pembangunan ekonomi akan baik apabila diterapkan sebagaimana nilai yang terkandung dalam *ahlusunnah wal jamaah*. *Ahlusunnah wal jamaah*, setidaknya memiliki beberapa prinsip penting yang perlu diketahui, yaitu: *tawassuth, tawazun, tasamuh, dan ta'adul*.

Tawazun yang memiliki arti seimbang memiliki kerkaitan paling erat dalam pembangunan ekonomi yang nantinya berfungsi sebagai rem atau pengontrol. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa sekarang, menusia perlu melakukan aktivitas ekonomi untuk bertahanan hidup. Namun bukan berarti bahwa proses akumulasi modal tersebut dapat dilakukan tanpa memiliki batasan. Nilai tawazun dalam akumulasi modal inilah yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan.

Namun, kelestarian lingkungan tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya menjalankan nilai tawazun secara tunggal. Hal tersebut akan lebih optimal apabila dikaitkan dengan semangat menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang terkandung dalam *jihad bi'ah*. *Jihad bi'ah* sebagai nilai memiliki relevansi dan sesuai dengan maqashid as-asyari'ah yang bermuara pada perwujudan

kemaslahatan untuk seluruh lapisan masyarakat dan menghindari mafsadatnya.

Sebagaimana nilai yang tekandung di atas, sebagai generasi muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang senantiasa berpegang teguh pada nilai *ahlusunnah wal jamaah annahdlyiihah*, sudah seharusnya menjalankan nilai kelstarian lingkungan. Terlebih, PMII sebagai organisasi mahasiswa yang besar memiliki Nilai Dasar Pergerakan (NDP) berupa Hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*), Hubungan antar manusia (*hablun minan-nas*), dan Hubungan manusia dengan alam (*hablun minal alam*).

B. IKN dan Wajah Indonesia

Nusantara dijadikan nama ibukota negara saat ini yang terletak di Pulau Kalimantan tepatnya di kalimantan Timur. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah karena telah di pindahkaannya Ibu kota negara. Sejarah ini bisa di katakan sebagai sejarah berulang dimana pada tahun 1600 tahun lalu telah berdiri kerajaan pertama di Indonesia yang bernama kerajaan Martadipura, letaknya di muara kanan Kutai Kartanegara.

Kalimantan Timur dulunya hanyalah wilayah yang primitif dimana sekelompok komunal menghabiskan generasinya dengan berburu, bercocok tanam sampai menemukan cahaya peradaban. Tanah Borneo menjadi tempat masuknya manusia purba untuk mengenal banyak hal, yaitu mulai belajar dari pemerintahan, budaya, seni dan

agama. Kerajaan Martadipura merupakan kerajaan pertama di nusantara ini, sehingga bibit dari segala hal berasal dari Tanah Borneo. Mulai dari Pemerintahan manusia mengenal tata kelola memerintah, menguasai hingga mengayomi.

Pemerintahan melahirkan sistem hingga tercipta masyarakat yang disebut rakyat dan pemimpin yang disebut raja. Melalui pemerintah lahir aturan-aturan yang kemudian menjadi hukum formal. Ada hak dan kewajiban, melanggar akan di ganjar saksi.mengatur dan melindungi keberlangsungan masyarakat meski masih sederhana. Di tanah Borneo khususnya di kerajaan martadipura perlahan mencium peradaban itu sehingga mampu tersebar di seluruh Tanah air. Agama dan budaya pun demikian, Hindu menjadi agama pertama dan tertua yang menjaga harmoni Kerajaan Kutai Martadipura berjaya. Keputusan raja jarang rasanya tanpa konsultasi dan restu para Brahmana (Ulama Hindu). Melalui agama dan Budaya lahir Norma, kebaikan dan karma. Bahkan kata gotong royong yang selalu jadi slogan kampanye politisi modern saat ini tidak bisa dilepaskan bahwa itu dikenalkan oleh Kerajaan tertua Kutai Martadipura Lalu, sudahkah kita berterima kasih karena memetik semangat Nusantara yang kini Indonesia masih utuh karenanya? Selain itu pula benarkah berdirinya kerajaan lain di seantro Nusantara tak bertemali dengan garis turunan raja Kutai Martadipura mengingat Kerajaannya adalah yang tertua di Nusantara? Sepintas itu menjadi wajar jika tanah Borneo dengan kerajaan tertuanya menjadi awal silahturahmi peradaban Nusantara.

Jakarta sebagai Ibu kota Negara mulai dipertanyakan dan didebatkan. Pasalnya, setelah puluhan tahun menjadi sentralisme kekuasaan, padatnya penduduk dengan masalah sosial yang menjalari sudut metropolisnya. Jakarta hendak pensiun jadi Ibukota. memindahkan Tuan rumah Indonesia agar Jakarta berbenah dari beban sentra kekuasaan. Pilihan itu jatuh di Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara (PPU) tepatnya. dipilihnya PPU, Kaltim sebagai Tuan Rumah menyanggah gemuknya Indonesia adalah alasan rasional. Indonesia takkan remuk karena secara historis tanah Borneo adalah wajah dari peradaban Nusantara silam. Menjadikannya Ibukota seperti hendak mengembalikan pemerintahan kepangkuan sejarah yang pernah dimulai Kerajaan Kutai Martadipura 1600 tahun lalu.

Secara geografis pula, posisi Kalimantan Timur berada di tengah-tengah sehingga akan aman dari gangguan teknis negara-negara luar. Apalagi secara sejarah, tentu sudah selayaknya demikian. Lalu, apakah kita siap memikulnya? tak berbenah dan keliru melangkah IKN nantinya akan tetap dikuasai monopoli Negara luar, Pemudanya akan kembali menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Pemerintah harus menggenjot Sumber Daya Manusia (SDM) agar Pemuda Indonesia siap bersinergi dengan IKN nantinya jangan berbanding terbalik dengan limpahan kekayaan Indonesia yang hampir semuanya di kuasai oleh investor asing. Setiap tahunnya ratusan Triliun hasil Bumi kita di keruk dan hanya beberapa persen saja yang masuk ke

dalam khas negara. Begitu banyaknya putra-putri Indonesia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan tak sedikit pula yang menghabiskan waktu belajarnya di luar negeri, tapi apa yang salah dalam pengelolaan ini, apakah para pemangku kebijakan hanya percaya pada negara luar atau mereka memanfaatkan ini hanya untuk kepentingan kelompok saja, inilah hal yang harus kita bahas dan urai sehingga Indonesia bisa benar-benar menjadi negara yang adil dan Makmur.

Maka dalam hal ini Pemuda Indonesia harus siap berkolaborasi membangun sinergi dalam segala aspek yang nantinya mampu mensukseskan Pembangunan IKN di Kalimantan Timur sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita harapkan yaitu tidak merusak lingkungan, tata ruang yang hijau Sukses atau tidaknya pemindahan Ibukota Baru tentu banyak aspek dan elemen yang terlibat karena hal ini bukan hanya urusan politik, tapi akan melibatkan masyarakat adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan akademisi dll,

Ibu Kota Negara adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatunegara, dan tempat dihimpunnya unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif danyudikatif. Presiden Republik Indonesia, melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota di Indonesia sangat memungkinkan, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melarangnya. Dalam undang-undang sendiri, tidak terdapat pasal yang menyebutkan bagaimana mengatur ibu kota.

Dengan demikian, terdapat fleksibilitas dalam mengatur ibu kota, termasuk memindahkannya. Namun, dalam rangka pemindahan sebuah ibu kota, harus ada alasandan urgensi yang jelas mengapa ibu kota tersebut harus dipindahkan.

Bagi Presiden Pemindahan IKN dinilai sebagai keputusan yang tepat, mengingat kondisi ibukota saat ini berada dalam kawasan yang dianggap sudah terlalu padat. Populasi manusia maupun kendaraan sudah memenuhi setiap sudut kota, sehingga terjadi kemacetan yang parah sehuingga berpotensi mengganggu akses mobilitas dan perekonomian.

Selain itu, kurangnya sumber daya yang tersedia di ibukota, seperti kebutuhan ruang hijau atau kebutuhan air harian, kemudian kerusakan lingkungan dan udara yang tidak baik karena polusi. Sehingga Melihat kondisi tersebut, maka sangatlah memungkinkan adanya pemindahanibu kota ke Kalimantan Timur, dimana terdapat ketersediaan lahan dan sumber daya yang paling mungkin di kembangkan.

Selain berbagai hal positif di atas, tak dapat dipungkiri pemindahan ibu kota membawa berbagai konsekuensi buruk, seperti termakannya anggaran yang tidak sedikit, yakni untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan penyanggah dalam proses pertumbuhan ibu kota baru. Hal ini berarti pembangunan di bidang lain harusrela tersisih demi ibu kota baru.

Peran dan Konstribusi Masyarakat Sipil dalam IKN

Seperti tak pernah usai bahwa dalam setiap ada pembangunan dan perubahan maka akan ada perbedaan sudut pandang, kepentingan dan ego sentris .Sesuatu hal yang hampir mustahil untuk di hilangkan tetapi semuanya bisa di kontrol dan di minimalisir, dengan hal apa tentuk semua memerlukan peran masyarakat untuk bahu-membahu, gotong royong dan semuanya harus dengan spirit yang sama yaitu menjadikan Indoenesia pusat peradaban dunia.

Nusantara, para peneliti berhasil menemukan Sejarah Nusantara tidak sekerdil sejarah yang tertulis di buku-buku pelajaran sejarah sekolah yang resmi atau literasi sejarah yang ada. Bahkan lebih dari itu, para peneliti menemukan bukti tentang kebesaran leluhur Nusantara yang disekitar 10.000 tahun sebelum masehi sudah menguasai dua per-tiga bumi.

Selain itu para peneliti juga berhasil memetakan dan mendokumentasikan lebih dari 20 jenis aksara purba asli Nusantara yang dapat dipakai untuk membaca prasasti dan rontal-rontal kuno. Hal yang berhubungan dengan pencitraan sejarah sebagai mitos, para peneliti juga berhasil menemukan bukti bahwa beberapa cerita mitos itu adalah benar adanya, bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur atau celoteh dongeng keheroikan belaka yang selama ini kita dengar.

Menurut Ernest Gellner, *Civil Society* merujuk pada mayarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-

pemerintah yang otonom dan cukup kuat. Ada pun syarat keberadaan *civil society* itu sendiri terdiri dari partisipasi politik, asosiasi, perlindungan hukum bagi individu. Aspek *civil society* terdiri dari pertanggungjawaban negara, keterbukaan informasi, pengakuan HAM, inklusifitas (Nordholt, 2002).

Ada banyak adopsi *civil society* dengan pendekatan scholar di Indonesia dengan berbagai padanan seperti 'masyarakat sipil' atau 'masyarakat madani.' Kata madani berasal dari kata "madaniyah" yang berarti peradaban. Masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad, sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban dengan ciri antara lain: *egalitarian* (kesederajatan), menghargai pluralsime, menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi dan musyawarah (Nurcholis Madjid, 1999). Oleh karena itu, masyarakat madani berarti masyarakat yang berperadaban.

Selain itu masyarakat sipil merupakan situasi masyarakat yang mandiri dan demokratis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu. Sedangkan, Syamsudin Haris mengatakan bahwa masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada di luar pengaaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab

seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat.

Berangkat dari hal inilah kemudian kita bangsa Indonesia, harus menjadikan sejarah, nilai-nilai, dan norma-norma sebagai pijakan bahwa kita Nusantara memiliki modal kuat untuk menjadi bangsa yang besar dan di takutin bangsa lain. Spirit kebersamaan yang telah di contohkan para nenek moyang kita harus kita aktualisasikan kembali, tidak tersekat oleh perbedaan suku, agama, budaya, strata yang hal ini malah akan menjadikan kita terkotak-kotak sehingga orang luar lebih mudah memecah belah kita. Kita bisa mengguanakan pendekatan sosiologis, Pendekatan sosiologis mempelajari tentang individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok sehingga terbangun hubungan yang erat.

Masyarakat harus menggeser paradigma Sesungguhnya yang menjadi tamu di IKN bukanlah orang Indonesia walaupun bukan berasal dari Kalimantan tempat IKN akan di bangun, tetapi orang luar yang masuk negara kita yang tujuannya hanya mengkapitaliasi negara kita untuk mengeploitasi alam dan investasi. Hal ini bisa di kategorikan sebagai tamu di rumah kita. Cara berpikir ini bukan berarti orang Indonesia anti orang asing, tidak ini hanya soal sudut padang membangun Indonesia-sentris sehingga kita punya semangat dan spirit yang sama yaitu kita tidak ingin negara kita dalam tanda kutip IKN investasinya tidak hanya di kuasai pihak asing.

Lalu bagaimana caranya, menurut saya yang pertama masyarakat harus memperkuat aspek sosial budaya karena pemindahan ibu kota akan mengakibatkan akulturasi budaya seolah ada batas, tabir yang tak terlihat antara IKN dan bukan IKN. Kita akan berakulturasi dengan masyarakat lokal, tidak menimbulkan sentimen karena ingat, ini Indonesia-sentris, mengusung kesatuan, kebersamaan, keunggulan kita sebagai bangsa yang semakin majemuk, justru akan semakin solid.

Kedua masyarakat fokus dalam pembangunan Sumber Daya Manusia sehingga nantinya kita mampu menghasilan Sumber Daya yang unggul, berkompeten dan berintegritas, hal ini bisa di lakukan dengan menjadikan pemerintah sebagai patner melalui program-program yang sudah di rencanakan, mengapa hal ini harus di lakukan, jawabannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan sehingga nanti akan terjadi gate seolah-olah warga lokal tidak terakomodir. Menurut Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk dan urbanisasi yang akan terjadi di Ibu Kota Negara. Saat ini, penduduk setempat Ibu Kota Negara tercatat 100 ribu jiwa. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 700 ribu jiwa di 2025, kemudian berkembang menjadi 1,5-1,6 juta jiwa di 2035, hingga mencapai perkiraan 1,7-1,9 juta jiwa di 2045.

Tantangan & Peluang Ibu Kota Negara

Populasi pulau jawa mencapai kurang lebih 60% populasi masyrakat Indonesia dan setengah dari aktivitas

ekonomi sedangkan Kalimantan empat kali lebih luas dari pulau jawa tetapi kurang dari 1/10 produksi domestic. Pemindahan Ibu kota bertujuan untuk menangi kualitas dan mengurangin beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan service.

Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hal yang mudah dan remeh temeh, maka perlu juga kita belajar dari negara-negara yang sudah melakukan hal yang serupa yakni pemindahan ibu kota negara. Kazakhstan, yang dalam penyusunan masterplan ibukota negaranya mampu mengadakan kompetisi skala internasional guna mendapatkan desain kawasan yang terbaik di mata dunia. Di sisi lain, ada dubai yang sukses dikenal dengan slogan *"The happiness city in the earth".* Impian kita semua rakyat Indonesia bahwa ibukota baru nantinya akan bisa menjadi *"The best city in the earth"* Ibukota baru nanti perlu dirancang bangun sebagai kota masa depan dengan mengusung konsep *"Smart Metropolis".* Dimana nantinya akan ada orang-orang dengan talenta terbaik berstandar nasional dan internasional akan tinggal dan berkarya disana

Potensial dan tantangan harus kita pelajarin dan lakukan benar-benar merujuk pada ahli-ahli di bidangnya baik secara teori dan praktikal. meski direncanakan dengan matang, bukan berarti pembangunan ibukota baru tersebut tidak memiliki tantangan. Sejumlah tantangan tersebut diantaranya sensitivitas lingkungan kota, waktu dan skala pembangunan, kondisi geologi, budget, serta masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Membangun sebuah kota tidak cukup hanya dengan membangun gedung-gedung maupun infrastruktur dan sebagainya. Namun, juga harus membangun fungsi dan manfaat dari kota itu bagi penduduknya. Hal ini terbukti dari beberapa kota di dunia yang pernah memindahkan ibukota lamanya ke wilayah baru dan akhirnya justru berakhir dengan kegagalan. "Konsep pembangunan adalah kunci pembangunan ibukota baru agar nantinya kota tersebut bermanfaat bagi penduduknya sehingga tidak ditinggalkan.

Oleh karena itu, ibukota baru ini harus memiliki fasilitas-fasilitas terbaik di asia tenggara dari sisi pendidikan, kesehatan, rekayasa industri, tekhnologi, riset, ketersediaan air bersih dan pariwisata. Ibukota baru ini juga diharapkan bisa menjawab persoalan-persoalan urban saat ini, meliputi: kota bebas emisi, dinamis, modern, terjangkau, lingkungan sehat dan hijau.

Selain dirancang sebagai kota cerdas, ibukota negara juga perlu mencerminkan identitas negara RI yang diterjemahkan dalam urban desain secara filosofis dari dasar-dasar negara RI, seperti: Pancasila, UUD'45, dan NKRI. Dapat menjamin kesinambungan sosial & ekonomi, dan berstandar internasional. Perlu ada perubahan sistem, pola pikir, & budaya nantinya pada ibukota baru kearah yang lebih modern dan maju untuk menghadapi tantangan kedepan. Jadi, bukan hanya sekedar pindah lokasi, tapi perlu juga disertai dengan perubahan sistem, budaya kerja, dan paling penting pindah pola pikir.

Pemindahan Ibu Kota Negara tentu akan berdampak pada pemerataan pembangunan yang menyentuh kepada seluruh komponen masyarakat terkhusus wilayah Ibu Kota Baru dan daerah penyangganya. Kita bisa mengambil peluang yang sebesar-besarnya terkait pemindahan ibukota ini mengingat banyak potensi di daerah yang bisa di Kembangkan, mulai dari fasilitas sarana prasarana Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur ,industri, ekonomi, pertanian, perkebunan dll yang ini akan berjalan beriringan dengan pembangunan ibu kota Nusantara.

Lingkungan menjadi Nawacita dan Komitmen Pembangunan

Bulan April bukan saja menjadai bulan pergerakan, tapi juga menjadi hari Bumi sedunia yang kita kenal dengan *eart day.* Momentum *Eart Day* di peringati setiap tanggal 22 April untuk mengingatkan pentingnya perlindungan lingkungan. Tanpa disadari, lingkungan yang menopang kehidupan kita selama ini semakin lesu dengan seiringnya waktu.Terkadang, kita lebih terlena terhadap kehidupan yang modern. Kita senang melihat pembangunan infastruktur yang semakin meluas, menjulang ke atas karena akan mempermudah kehidupan. Tetapi, kita lupa, di balik proses pembangunan infrastruktur tersebut, ada alam yang menangis karena kehilangan entitasnya.

Sebenarnya, pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, harus diimbangi dengan peremajaan lingkungan dan rehabilitas

bukannya malah merusaknya serta meninggalkannya begitu saja. Selain itu, salah satu bukti nyata yang menunjukkan bahwa planet kita ini sedang bermasalah, yakni suhu bumi semakin panas. Jika pemanasan global dibiarkan, maka semakin banyak masalah lingkungan yang akan kita hadapi, salah satunya cairnya gunung es di kutub utara dan selatan.

Selain itu ada masalah lingkungan yang sangat serius yang harus kita pahami, Pertama *polusi udara* yang semakin hari semakin tidak terkendali bahkan ada beberapa penyakit yang di sebabkan oleh udara semisal paru-paru dan flu akibat udara yang di hirup tercemar oleh asap kendaraan dan industry apalagi di negara-negara maju dan berkembang. Kedua yaitu *pencemaran air*, di negara maju dan berkembang potensi pencemaran air sangat tinggi di karena pembuangan limbah dan bahan kimia ke laut, ke sungai serta tak hanya itu ternyata setiap tahunnya terjadi peningkan kuantitas sampah plastik. Hal ini sangat mengancam makhluk hidup dan menyebabkan kematian habitat laut. Ketiga penpisan *lapisan ozon* , penyebab kanker di seluruh dunia ternyata akibat menipisnya lapisan ozon. Ada beberapa hal yang menyebabkan penipisan ozon salah satunya efek rumah kaca,hal ini menyebabkan suhu bumi semakin panas sehingga mengganggu kekebalan tubuh dan pertanian. Keempat *deforestasi,* deforestasi di sebabkan dari konsekuensi dari penggundulan hutan. Tetapi,Kegiatan tersebut menimbulkan banyak masalah yang kita hadapi saat ini. Seperti kekurangan air, ketidakseimbangan dalam keanekaragaman hayati, kepunahan spesies, hingga polusi udara. Selain itu, akibat

urbanisasi yang signifikan mengakibatkan banyak pohon di kawaasan hutan ditebang untuk perumahan dan industri yang seharus di manfaatkan untuk mengurangin populasi. Sehingga pembangunan yang tidak terencana dan terukur dengan baik berdampak buruk untuk keberlangsungan kehidupan, ternyata juga bisa menjadi bumerang untuk kita di masa depan. Kelima, *hilangnya keanekaragaman hayati* Setelah mengulas isu lingkungan yang telah di bahas di atas, kita bisa mengamati peningkatan tajam dalam kepunahan beberapa spesies tumbuhan hewan, burung, serangga, dan organisme lainnya. Hilangnya keanekaragaman hayati itu mengakibatkan ketidakseimbangan yang cukup besar dan kemudian selanjutnya dapat menyebabkan reaksi berantai yaitu Gangguan pada rantai makanan dan kehidupan tumbuhan dan ini bisa mengancam ekosistem kita serta dapat mempengaruhi sumber utama makanan dan obat-obatan.

Selain berbicara makna teologis hablum minallah, hablum minannas ada juga yang namanya hablum minal alam. Tiga perkara ini bernilai ibadah dan menjadi misi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Selain itu, tiga kategori tersebut juga harus diamalkan secara seimbang, meskipun pada hakikatnya hablum minannas dan hablum minal 'alam memiliki tujuan vertikal, yakni mendapat ridha Allah SWT . Hablum minallah adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Pencipta dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangannya. hablum minallah dikenal sebagai kesalehan individu atau ibadah mahdhah, hablum minannas

merupakan kesalehan sosial atau ibadah ghair mahdhah. Sebab hablum minannas adalah konsep di mana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. hablum minal alam adalah hubungan manusia dengan alam. Selain ditugaskan untuk beribadah dan menjaga persaudaraan, manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Allah SWT bahkan secara tegas mengancam manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Penyataan dalam Al Qur'an sangat jelas sebagai berikut : "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (Q.S. Ar Rum:41). Sebagian ciri dari perusak bumi yaitu mereka yang bersikap sombong, mengingkari adanya Tuhan, merusak tanaman, membunuh binatang ternak, mencemari lingkungan, dan lain sebagainya. (Al-Baqarah ayat 11, 12, 205 serta At-taubah ayat 47).

Pernyataan ini jelas datangnya langsung dalam al-qur'an sehingga kita sebagai umat manusia harus menjaga lingkungan sebagai sumber kehidupan yang ini sangat menentukan kondisi bumi di masa yang akan datang. Menjaga dan merawat alam harus menjadi komitmen semua umat manusia tanpa kecuali sehingga dalam pembangunan apapun harus terukur dan di perhitungkan sehingga tidak menjadi bencana untuk kita semua umat manusia.

Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru pemerintah harus memperioritaskan visi Lingkungan jangka panjang

jangan asal membangun. Pembangunan pasti akan memberikan dampak negatif Pertama, ancaman terhadap tata air dan resiko perubahan iklim karena sistem hidrologi yang terganggu dan telah ada catatan air tanah yang tidak memadai kemudian wilayah tangkap air terganggu sehingga ada resiko terhadap pencemaran air dan kekeringan. Kedua, pemindahan Ibu Kota Negara baru juga mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna, padahal mereka berfungsi menjaga ekosistem.

Ketiga, pemindahan IKN juga berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti meningkatkan resiko kebakaran hutan, pencemaran minyak, penurunan nutrein pada kawasan pesisir dan laut. Melihat beberapa contoh yang akan di alami dalam pemindahan Ibu Kota Baru pemerintah harus melakukan upaya-upaya bijak untuk mengantisipasi bahkan memberikan solusi konkrit terhadap potensi kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh pemindahan Ibu Kota Negara.

Nasib DKI Jakarta Terhadap Pemindahan Ibukota

Penetapan pemindahan Ibukota terkesan terburu-buru banyak pihak menggap pemindahan ibukota ini terkesan politis tidak di pikirkan secara matang dan serius sehingga banyak kalangan tidak melihat visi yang jelas terkait pemindahan ibukota ini. Kekhawatiran, pro dan kontra muncul di permukaan karena menggap bahwa pemindahan tidak urgent apalagi di tengah pandemi covid-19. Karena kita

harus fokus kepada pemulihan ekonomi bukan menambah beban keuangan negara. Pemindahan ibukota negara menjadi isu terhangat banyak ruang-ruang diskusi yang mendiskursuskan tema terkait IKN, mulai dari mahasiswa/ pemuda pengamat politik, akademisi, ekonom, LSM, tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya yang mana tidak sedikit hampir di seluruh penjuru dari sabang sampai Merauke bahkan menjadi isu internsional.

Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disahkan. Artinya, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur segera dilakukan. Banyak pihak bertanya-tanya. Bagaimana nasib Jakarta setelah tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota. Apakah posisi Jakarta akan sama dengan provinsi lainnya. Atau tetap dipertahankan keistimewaannya dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Seperti yang kita pahami semua bahwa pemindahan Ibukota Negara hanya memindahkan pusat pemerintahannya saja tidak secara keseluruhan sehingga hal ini tidak begitu berdampak signifikan. Jakarta akan lebih fokus menjadi pusat perekonomian.

Menurut saya sebaiknya DKI diberi status sebagai wilayah otonomi khusus atau spesial otonomi khusus di bidang ekonomi. Pemerintah nantinya bisa membahas terkait nama undang-undang yang tepat untuk menjadikan wilayah DKI aebagai wialayah khusus di bidang Ekonomi Provinsi Jakarta Raya.fakta Jakarta sebagai pusat ekonomi

Tanah Air tidak bisa di kesampingkan. Data terkini, 80 persen perekonomian Indonesia diputar di Jakarta, sisanya di luar Jakarta. Kita bisa membayangkan bagaimana jika Jakarta akan menjadi seperti New York ketika benar-benar difungsikan menjadi daerah pusat bisnis Indonesia. Sementara pusat pemerintahannya ada di Kalimantan. Persis sebuah pemerintahan di Amerika Serikat yang bermarkas di Washington DC. Secara kebijakan dan kondisi kita sanagt yakin bahwa Jakarta lebih akan bisa mengexplore karena prasarana, fasilitas, kemudahan akses aksesibiliti yang ada di Jakarta bagi para pebisnis, Jakarta tetap primadona bagi mereka. Maka setelah pusat pemerintahan dipindah. Bahkan jika dikembangkan dengan baik, Jakarta bisa menjadi kota metropolitan setara Tokyo Metropolitan City dan kota-kota besar lainnya di dunia.

Jakarta Tak sekadar menjadi pusat bisnis. Jakarta memiliki sejarah Panjang atas maju dan berkembangannya Indonesia.Ragam cerita sejarah mewarnai perjalanan Jakarta dari jaman dahulu sebelum merdeka sampai saaat ini. Dari segi historis, Jakarta adalah kota pemerintahan yang penting sejak zaman kolonial yang terlihat dari bangunan-bangunan bersejarah lama, istana kepresidenan, monumen, dan patung-patung bersejarah. Tempat bersejarah tentang kelahiran Republik Indonesia juga ada di Jakarta Jakarta terekam jelas bagaimana lahirnya Indonesia hal inilah kemudia pula yang menjadi alasan mengapa Jakarta harus tetap istimewa meski tidak lagi menjadi ibu kota negara. Bagi kita Jakarta masih menjadi magnet bagi masyarakat Indonesia walaupun tidak

lagi menjadi ibu kota. Jakarta menjadi daerah lengkap, mulai dari wisata, sarana dan prasarana hingga pusat pendidikan. Dengan hal ini harapan Indonesia akan lebih maju dan fokus dalam membangun kenegaraan dan peningkatan ekonomi di masa yang akan datang.

C. 62 Tahun PMII Merawat Peradaban, Kini Jihad Lingkungan Hidup

Salah satu isu penting yang diusung Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) yang ke-62 Tahun adalah ekosistem lingkungan hidup.

Mengapa di hari lahir PMII ke-62 Tahun ini, isu lingkungan menjadi jihad utama PMII? Sebetulnya, dalam ruang-ruang diskursus PMII pada setiap level struktural sudah mulai menyadari terkait perubahan iklim dan pemanasan global.

Fenomena dunia yang tak terkendali tersebut, sebagai efek domino dari keserakahan manusia sendiri, maka kemudian sebagai Insan Pergerakan PMII diwajibkan agar memikirkan jalan keluar akibat multikrisis lingkungan tersebut. Paling tidak, aktivis PMII mesti mencari alat untuk mitigasinya (solusi) atas problem sosial. Salah satunya melalui aksi nyata PMII lewat gerakan menghijaukan Indonesia seperti penanaman 62.000 pohon se Indonesia.

Harlah PMII ke 62 Tahun, seyogyanya PMII memiliki semangat yang kuat untuk menjadi garda terdepan dalam merawat ekosistem lingkungan hidup. PMII secara insaf dan sadar bahwa ekosistem lingkungan hidup adalah hal utama

yang harus dijaga oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini agar tetap menjadi habitat yang layak untuk kehidupan manusia secara berkelanjutan (sustainablelity).

Dalam menjaga lingkungan hidup agar tetap layak, terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka dibutuhkan kerja gotong royong oleh seluruh manusia di dalamnya. Maka dari itu, pemerintah, pengusaha, organisasi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan termasuk PMII yang menjadi komponen penting didalamnya serta seluruh masyarakat Indonesia dengan mempraktekan cara hidup yang ramah lingkungan.

62 Tahun Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berkhid bagi Negeri. Kini, PMII harus menjadi juru kampanye dalam membendung keserakan korporasi dan tangan-tangan jahat tersebut yang merusak tatanan lingkung hidup.

PMII punya pijakan yang cukup kuat, mengapa harus berjuang bagi kelestarian lingkungan hidup. Aswaja sebagai basis teologis saya pikir dapat menjadi pijakan aktivis PMII. Di lain sisi, kita sadar betul bahwa salah satu persoalan serius yang harus disikapi dengan kuat nan kokoh dari PMII adalah menjaga lingkungan hidup secara menyeluruh.

Bahkan, para kiai Nahdlatul Ulama (NU) seperti KH. A Mustofa Bisri (Gus Mus) sudah menyerukan dan bergerak dengan aksi nyata kepada bangsa ini untuk menjaga lingkungan hidup dengan membangun planning yang tepat, juga disertai dengan kebijaksanaan. Kalau sesuatu itu merusak lingkungan, ya tidak boleh.

Hal tersebut memberikan signal yang kuat bagi aktivis PMII di semua komponen PMII, baik struktural (pengurus) maupun kultural (alumni) harus secara masif bergerak mengawal masa depan lingkungan hidup yang makin tergerus. Ragam bencana sudah menjadi saksi bahwa arah jihad lingkungan harus terus disuarakan dan diperjuangkan dengan sepenuhnya.

Saat ini, dunia bukan lagi tengah diperhadapkan dengan situasi perubahan iklim dan pemanasan global, melainkan, kita semua tengah diperhadapkan dengan "kejahatan lingkungan".

Bayangkan, selama periode 2015-2021, Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menangani 6.143 pengaduan terkait dengan aksi kejahatan lingkungan. Dari aduan tersebut, KLHK telah memberikan 2.185 sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebanyak 214 kasus. Sementara itu, gugatan perdata yang dilayangkan Ditjen Gakkum sebanyak 31 gugatan, 14 diantaranya inkracht, dengan ganti rugi pemulihan LHK Rp20,7 triliun.

Kemudian, gugatan kasus pidana LHK yang sudah P.21 ada 1.156. Ditjen Gakkum LHK juga melakukan 417 operasi TSL, 671 operasi pembalakan liar, dan 653 operasi perambahan. Mencermati fakta tersebut, aktivis PMII mempunyai tugas teramat serius, selain mengkampanyekan gerakan menghijaukan Indonesia, tetapi kemudian hsrus bergerak dalam proses pengawalan terhadap sejumlah

kebijakan dan kasus kejahatan lingkungan.

Di ketahui, seiring perkembangan proses penegakan hukum di Indonesia, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) juga diarahkan untuk memberikan keadilan restoratif. Dengan tidak mengabaikan aspek pidana, penegakan hukum LHK tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian terhadap lingkungan/ ekosistem, masyarakat dan negara. Saya pikir, PMII dapat mengerjakan hal tersebut.

Kendati demikian, dalam rangkaian harlah PMII kali ini, selain mengawal ekosistem lingkungan hidup, tetapi juga PMII secara konsistem mengawal ekosistem politik dan ekosistem ekonomi.

PB PMII di bawah Kepemimpinan Sahabat Muhammad Abdullah Syukri selaku Ketua Umum mendorong narasi besar yakni; Transformasi Organisasi, Maju, dan Mendunia. Menjawan hal itu, Harlah ke 62 ini PB PMII mengusung tema Transformasi Gerakan, Merawat Peradaban.

Harlah ke 62 tahun menjadi bahan reflektif organisasi, kemudian membaca dinamika kebangsaan dan merumuskan strategi gerakan (Stratak) PMII kedepannya.

Melalui tiga ekosistem ini (lingkungan, politik dan ekonomi) menjadi modal PMII melakukan transformasi gerakan, pada gilirannya merawat peradaban. Secara konseptual, transformasi gerakan mengarah pada tiga (3) hal

mendasar; (1) PMII Progresif; (2) PMII Adaptif, dan (3) PMII Kolaboratif.

Kedepan, PMII secara konsisten tetap merawat ketiga ekosistem itu, karena ketiga entitas itu menjadi hal penting bagi peradaban umat manusia. Selamat Hari Lahir (HARLAH) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

D. Mendedah Kebijakan Pemerintah

Ada banyak isu kontemporer mengenai kebijakan pemerintah yang harus mendapatkan respon mahasiswa, khusunya organisasi ekstra kampus yang selama ini dikenal doyan kajian, diskusi, dan pengabdian masyarakat. Paling hangat, soal kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Pajak Pertambahan nilai (PPN), dan gonjang-ganjing penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. .

Tepat pada 1 April 2022, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax menjadi Rp 12.500/liter dari Rp 9.000/liter dengan landasan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kenaikan harga Pertamax sebenarnya kebijakan domino imbas perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan fluktuasi minyak dunia.

Berkaca pada realisasi subsidi energi pada 2021,

pemerintah Indonesia mampu membukukan Rp 142 triliun, di mana jumlah tersebut melonjak 30,5% dari 2020 yang tercatat sebesar Rp 108,8 triliun. Apabila BBM non-subsidi seperti Petamax tidak naik, maka BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah ke produk Pertalite dipastikan menambah beban APBN.

Namun, kenaikkan harga BBM Pertamax memicu peralihan penggunaan Pertalite besar-besaran lantaran perbandingan harga hampir 200 persen, yakni Rp 12.500/liter dengan Rp 7.650/liter. Peralihan ini akan memberikan ancaman kelangkaan Pertalite dengan statusnya sebagai BBM subsidi yang telah dibatasi dengan kuota 23,05 juta KL sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Bayangan Idul Fitri

Kurang tepatnya lagi, kenaikan Pertamax ini terjadi saat pemerintah memberikan lampu hijau mudik Idul Fitri yang secara historis tingkat konsumsi masyarakat meningkat dan naiknya sejumlah komoditas. Seyogyanya, pemerintah harusnya mengotak-atik kebijakan agar kenaikan Pertamax dapat ditahan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah terpaan fluktuasi minyak dunia. Begitu juga dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang berpatokan pada Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah sendiri memperkiraan target inflasi sebesar 2% hingga 4% yang semoga tidak meleset jauh. Perkiraan tersebut di luar dari efek lebaran 2022 dan potensi kenaikan inflasi setelah keputusan pemerintah yang membolehkan mudik. Target inflasi bisa saja berhasil jika Pemerintah dan Bank Indonesia mampu dan berhasil mengurangi risiko inflasi serta menstabilkan kenaikan harga pangan. Namun, inflasi Indonesia tahun ini diperkirakan membengkak melebihi target maksimal dari 4%. Sebab, memasuki kuartal II tahun 2022, terjadi kenaikan harga yang dipicu tekanan global.

Selain kebijakan, pemerintah sendiri juga melempar bola liar tentang wacana penundaan Pemilu 2024 yang sejatinya dipantik Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan meminjam nama para pengusa sebagai pandangan pada Januari 2022 lalu. Bagaimanapun juga penundaan Pemilu 2024 sangat senstif yang menggunjing semangat reformasi untuk membatasi masa jabatan presiden dan wakilnya. Penundaan pemilu akan mengancam demokrasi melalui perubahan amandeman Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun secara lisan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menggugah Nalar Kritis

Banyak kelompok mahasiswa merespon setiap detail kebijakan pemerintah dengan aksi dan demonstrasi. Tidak

menyayangkan aksi dan demonstrasi untuk membendung keputusan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Namun, sebagai kaum intelektual, mahasiswa dituntut untuk memberikan sumbangsihnya lewat pemikiran kritis serta konstruktif dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Baiknya, mahasiswa yang melayangkan tuntutan untuk mengubah dan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat memulainya dengan kajian yang komprehensif. Pasti memiliki daya ledak yang luar biasa, bila mereka yang selama ini berteriak-teriak menyuarakan tuntutannya membingkai ide dan gagasan melalui kajian, apalagi dalam bentuk Policy Brief. Alangkah kuatnya suara para mahasiswa dari semua elemen, baik organisasi intra maupun organisasi ekstra bila buah pikiran mereka memenuhi isi kolom-kolom dan pemberitaan media massa. Dahsyat, Pasti!

Memang, aksi dan demonstrasi turun jalan telah menjadi sejarah untuk merobah kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat secara paksa dengan konsekuensi bentrokan hingga korban jiwa bisa dilanjutkan untuk menjadi pilihan terakhir. Namun, sejarah baru akan terukir jika setiap organisasi mahasiswa berhasil mempengaruhi bahkan merubah kebijakan pemerintah melalui kajian yang telah digelar di mana-mana dan tersiar di berbagai penjuru Nusantara.

Mari, utamakan sikap kritis terhadap pemerintah terutama, mengenai kebijakan yang tidak pro-rakyat seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Pajak

Pertambahan nilai (PPN), dan gonjang-ganjing penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui sebuah kajian. Mantapkan pilih untuk turun jalan bila gagasan tak mempan pengaruhi kebijakan pemerintah. Saatnya kembali ke khittoh dengan memegang teguh independensi sebagai kalangan oposisi yang mengontrol kekuasaan agar pemerintah tak sewenang-wenang dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kader-kader PMII seluruh Indonesia jangan hanya turun jalan karena sikap reaktif saja, akan tetapi pahami masalahnya, mari kita budayakan mengkaji terlebih dahulu, sehingga apa yang nantinya kita perjuangkan penuh makna ditambah semangat yang menggelora untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Republik Indonesia.

Selamat Harlah PMII Ke-62! PMII Maju, Keren, dan Mendunia, Indonesia Sejahtera. Salam Pergerakan!

E. Industrialisasi dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Iklim

Industrialisasi merupakan sebuah proses perubahan tatanan sosial ekonomi masyarakat dari yang berbasis mata penceharian pertanian menjadi manufaktur atau industri. Dalam industrialisasi ini ada banyak lahan baik itu sawah, kebun dan lainnya yang bersifat pertanian mengalami tranformasi menjadi lahan industri. Terdapat banyak sekali macam macam industri khususnya di Indonesia, diantaranya industri primer, industri sekunder, industri ekstraktif, industri manufaktur, industri konstruksi, industri jasa, dan

industri kuarter. Hampir setiap negara yang ada di dunia mengalami industrialisasi sebab kemajuan zaman tentunya tidak bisa dibendung.

Jika membahas industrialiasi, maka erat kaitannya dengan perubahan iklim. Iklim merupakan rata-rata cuaca dimana cuaca adalah keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Sedangkan perubahan iklim atau yang banyak dikenal dengan *climate change* dapat diartikan dengan perubahan iklim bumi dalam jangka waktu tertentu. Perubahan ini dapat menyebabkan efek domino yang luas terhadap kehidupan mahluk hidup di muka bumi. Dampak yang disebabkannya akan berkaitan langsung terhadap sosial, kebudayaan, pendidikan serta kelestarian lingkungan hidup.

Industrialisasi merupakan penyebab utama dari perubahan iklim yang terjadi di bumi. Sebab ketika industrialisasi ini terjadi ada banyak lahan hijau yang hilang dan digantikan dengan pembangunan pabrik-pabrik yang membantu banyak dalam menghasilkan gas karbon dioksida ke atmosfer bumi. Maka terjadilah *deforestation* dimana banyak pohon di muka bumi ditebang yang sebenarnya pohon ini merupakan penyumbang utama dalam memproduksi oksigen secara alami ke alam terbuka.

Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas bumi sebagai bahan bakar dalam menyuplai energi bagi industri juga menjadi penyebab utama perubahan iklim. Penggunaan fosil dapat menghasilkan gas karbon

dioksida ke udara sehingga atmosfer bumi tertutup gas ini. Gas ini menyebabkan permukaan bumi menjadi panas sebab sinar matahari yang masuk ke bumi menjadi terus terpantul ke permukaan bumi. Dan suhu bumi berubah dari waktu ke waktu. Penggumpalan gas karbon dioksida ini juga bisa menyebabkan *Acid Rain* yakni hujan asam yang dapat membuat permukaan tanah menjadi tidak subur sehingga akan mengurangi produktifitas pertumbuhan tanaman dan pangan.

Dalam *Acid Rain* terdapat gas methana, yang ketika bercampur dengan air laut menyebabkan *Ocean Accidification* atau yang biasa kita kenal dengan pengasaman air laut. Hal ini membuat terumbuk karang berhenti memproduksi plankton hingga menyebabkan ikan kecil tidak mampu lagi hidup karena konsumsi utama mereka berkurang. Ketika hal ini terjadi tentunya rantai makanan menjadi terganggu, efeknya adalah ikan ikan besar pun menjadi kesulitan dalam berkembang biak. Sehingga terjadilah kelangkaan ikan.

Dan masih banyak lagi dampak-dampak yang disebabkan oleh industrialisasi. Kenaikan suhu yang terus menerus menyebabkan lapisan es di kutub utara dan selatan mencair dan berubah menjadi air sehingga hal ini ikut menambah volume air laut. Ketika air laut bertambah maka daerah pesisir pantai yang permukaan tanahnya bawah, akan tertutupi air laut yang menyapa daratan. Bukan hanya pesisir pantai yang terkena imbasnya, sungai juga kan mengalami luapan sebab air hilirnya tidak mampu menerima air dari hulu. Dan

terjadilah banjir didaerah sekitaran sungai, jika ada ladang dan sawah di pinggiran sungai maka akan terkena dampak luapan sungai dan terjadilah gagal panen.

Perubahan iklim ini juga akan menyebabkan *over consumption* dimana akan terjadi pembeludakan penduduk bumi di masa yang akan datang namun tidak diimbangi dengan cadangan makanan yang memadai untuk menyuplai penduduk. Hal ini dikarenakan banyak ladang yang berubah menjadi industri manufaktur. Sehingga produksi pangan terhambat, dan akan menjadi sulit untuk mendapatkan bahan pangan. Akan ada banyak manusia yang kelaparan di belahan bumi ini karena minimnya supplai bahan baku makanan bagi mereka.

Lantas solusi apa yang bisa kita berikan bagi industri-industri yang saat ini sedang beroperasi dan atau yang akan dibangun. Mengingat kemajuan merupakan suatu kondisi yang tidak bisa dibendung. Tidak mungkin pemerintah suatu negara harus menutup semua industri yang memberikan sumbang asih bagi perubahan iklim. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi negara tersebut. Bayangkan saja ketika sebuah industri ditutup, maka akan banyak sekali pekerja yang akan di-PHK dan tingkat pengangguran negara kita akan naik. Disisi lain pendapatan pajak negara menjadi berkurang. Akan sangat besar sekali dampaknya. Jadi penutupan suatu industri tidak bisa dibenarkan baik dari sisi ekonomi maupun sosial masyarakat.

Maka daripada itu solusi dari penulis yang bisa membantu meminimalisir perubahan iklim dan penurunan gas rumah kaca. Diantaranya dirangkum sebagai berikut, pertama jika ditinjau dari segi kebijakan yang bisa dilakukan oleh sebuah negara adalah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil serta memperbanyak industri yang suplai energinya dari energi baru terbarukan seperti Pembangkil Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin Bayu (PLTB) dan lainnya yang ramah lingkungan. Hal ini bisa membantu penurunan emisi gas ke permukaan bumi. Semakin banyak industri yang menggunakan energi baru terbarukan maka semakin banyak pula pengurangan gas emisi. Dan jika semua industri menggunakan EBT, maka yang terjadi adalah nol emisi di masa yang akan datang.

Kedua, perusahaan bisa melakukan reforestasi yakni penanaman kembali pohon pada lahan-lahan kosong sisa garapan industri. Dengan penanaman kembali, hal ini mampu membantu penghijauan serta meminimalisir dampak bencana alam seperti longsor, banjir dan lain sebgaainya. Reforestasi ini dapat menyababkan udara semakin segar karena pohon-pohon ini dapat menambah suplai oksigen di area tersebut. Karbon dioksida dikonversi menjadi oksigen yang membantu suhu lingkungan menjadi sejuk kembali. Hasilnya kesehatan karyawan di sekitar wilayah industri bisa terpantau dan bisa menghirup udara yang lebih segar.

Ketiga, perusahaan dapat melakukan konservasi hutan. Konservasi hutan disini adalah melindungi hutan yang

ketika digarap akan menyebabkan dampak lingkungan yang berbahaya bagi masyarakat setempat. Selain itu juga perusahaan bisa membuat regulasi bagi karyawan dalam rangka penghematan energi supaya karyawan bisa lebih efektif lagi dalam bekerja untuk menghemat energi mesin-mesin produksi maupun suplai energi kebutuhan listrik-listrik lainnya. Dan tak lupa, Industri harus senantiasa melakukan inovasi dalam rangka penghematan energi dilingkungan produksinya.

Terakhir, tentunya hal ini tidak akan berjalan signifikan. Jika tidak ada kolaborasi keduanya serta pengawasan dari para mahasiswa, pemuda, masyarakat serta komunitas-komunitas lingkungan. Peran kita selaku mahasiswa dan organisasi pergerakan harus bergerak dan menyadarkan kadernya. Bahwa kondisi bumi saat ini sedang tidak baik-baik saja, selain industrialisasi ini besar manfaatnya hanya bagi segelintir orang namun dampak buruknya dirasakan semua orang. Mahasiswa harus mampu menjadi pengingat bagi pemerintah dan industri serta penggagas bagi ide-ide serta aksi-aksi lingkungan yang dapat menyelamatkan bumi kita dari dampak buruk perubahan iklim.

F. Hablum Minal Alam: Sebuah Upaya Menelusuri Konsep Fiqh Lingkungan

Hal pertama yang harus dilakukan oleh manusia adalah *Ma'rifat* kepada Allah dengan memahami dalilnya sebagaimana dalam sebuah kaidah disebutkan *Awwalu wajibin alal Insani # Ma'rifatul Ilahi bistiqhony.*

Dalam rangka Ma'rifatullah tersebut, menurut Imam Al-Ghozali dalam kitab *Jawahirul Qur'an* bahwa Allah bisa diketahui lewat *Dzat, Sifat* dan *Af'al* nya. Nah diantara dari *Af'alullah* ini sebagaimana dalam Alqur'an banyak dinyatakan adalah seperti langit bumi gunung dan lain sebagainya.[11] Maka dari itu, memahami Alam dan lingkungan sekitar merupakan bagian daripada *step* untuk *Ma'rifatullah.*

Tulisan ini akan mencoba mengungkap tentang hubungan manusia dengan alam serta lingkungan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama Ahlusunnah wal Jama'ah yang *Mu'tabaroh.*

Pertama-tama akan dijelaskan tentang makna alam dan lingkungan sebagaimana dinyatakan dalam kamus-kamus ulama. Penulis akan mencukupkan diri pada kitab *At-Ta'rifat* nya Al-Jurzany serta *Lisanul Arobnya* Ibnu Mandzur.

Kedua menggali ayat dan hadits tentang relasi manusia dengan alam (*hablun minal alam*). Pembahasan ini akan dimulai dengan menggali tentang penciptaan alam semesta serta relasinya terhadap manusia.

Ketiga adalah tanggungjawab manusia terhadap alam semesta menurut Al-Qur'an dan Hadits. Point ini merupakan point inti dari pembahasan kali ini yakni tentang peran dan tanggungjawab manusia di muka bumi.

---

11 Abu Hamid Bin Muhammad Al-Ghozaly, *Jawahirul Qur'an,* Bairut: Darul Ihyail Ulum, 1990, Hal. 26-27

1. Pengertian Alam Dan Lingkungan

Al-Jurzany membagi definisi alam menjadi dua, yakni secara etimologis dan ternimologis. Secara etimologis, istilah *Al-Alam* adalah tanda (*Alamat*). Namun secara termonologis adalah segala yang ada selain Allah SWT. Kenapa selain Allah dinamai *Al-Alam* karena alam ini merupakan tanda atas keberadaan Allah.[12] Sedangkan Ibnu Mandzur memberikan dengan bahasa yang berbeda ketika mendefinisikan *Al-Alam,* menurut beliau bahwa *Al-Alam* adalah seluruh ciptaan Allah, ada lagi yang membahasakan dengan ungkapan segala sesuatu yang ada di jagat raya. Jadi lafadz *Al-Alam* ini berlaku untuk mufrod maupun jamak.[13]

Dari definisi di atas, bisa dinyatakan bahwa *Al-Alam* adalah segala sesuatu yang ada yang yang diciptakan oleh Allah SWT baik yang kasat mata atau tidak baik berupa biotik maupun abiotik.

Kemudian, dalam kajian selanjutnya adalah tentang lingkungan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Al-Biiah.* Ibnu Mandzur dalam *Lisanul Arob* menginventarisir makna-makna dari istilah ini, namun menurut penulis bahwa makna yang paling relevan dengan kajian ini adalah Istilah *Al-Biiah* diartikan dengan *Manzil* (tempat tinggal).[14] Maka dari itu secara istilah *Al-Biiah* adalah lingkungan hidup manusia atau segala sesuatu yang mengitari lingkungannya baik biotik maupun abiotik.

12 Ali bin Muhammad As-Sayyid As-Syarif Al-Jurzany, *At-Ta'rifat,* Kairo: Darul Fadhilah, tt, Hal. 122

13 Ibnu Mandzur, *Lisanul Arob,* Kairo: Darul Ma'arif, tt, hal. 3085

14 *Ibid,* hal. 382

Selanjutnya Al-qur'an dan Hadits menyebut alam semesta ini terkadang menggunakan istilah *As-Samawati wal Ardh* (QS. As-Sajdah: 4, Al-Kahfi: 51, dll), juga terkadang menyebut dengan istilah *Ma fil Ardhi Jami'a* (Al-Baqoroh: 29, dll), atau *Kullu Syai'i* (Al-Anbiya: 30, dll) serta istilah lainnya. Ada pula yang menyebutkannya secara partikular seperti Gunung, sungai, hewan-hewan serta lainnya.

Nah, dari ungkapan di atas bisa kita tarik benang merahnya (1). Bahwa alam merupakan ciptaan Allah, (2). Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, artinya pasti memiliki hikmah dibalik penciptaan itu. Maka dalam dalam bab selanjutnya marilah kita bahas keterelasian antara manusia dengan Alam (*Hablun minal alam*).

2. Hubungan Manusia dengan Alam

Sebagaimana diungkapkan di atas, alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT. Namun dalam Al-qur'an, Allah menyebutkan proses penciptaan alam semesta ini dengan istilah *Qodaro, Kholaqo, An-Sya'a, Bada'a, Ja'ala, Sakhoro, Makkanna.* Serta ungkapan-ungkapan yang lain. Jadi alam semesta ini bisa disebut sebagai *Kholqillah, Masyiatullah, Qudrotillah, Amrillah* dan lain sebagainya.

Namun yang menjadi objek kajian kali ini adalah karakteristik ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta kebanyakan selalu di korelasikan dengan manusia. Seperti contoh surat Ibrahim ayat 32

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ لِتَجۡرِيَ فِي ٱلۡبَحۡرِ بِأَمۡرِهِۦۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡأَنۡهَٰرَ

Artinya: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki bagimu; Dan Dia telah menundukan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menunduka pula bagimu sungai-sungai.

Dalam ayat ini pertama Allah menciptakan (*Kholaqo*) kemudian Allah tundukan untuk manusia (*Sakhoro*). Yang menjadi contoh adalah lafadz *Rizqollakum,* dalam tinjauan Nahwu lafadz ini kedudukannya menjadi *Al-Hal,* jadi Allah menjadikan buah-buahan itu sebagai rizki bagimu. Juga kita lihat lagi lafadz *Litajriya.* Lam yang ada di situ dalam kajian Nahwu adalah *Lam Kaiy* artinya "agar/supaya". Nah dari penjelasan itu kita bisa menilai bahwa keberadaan alam semesta ini justru menjadi infrastruktur bagi manusia.

Sebagai penguat marilah kita lihat dengan seksama penggunaan istilah *Ja'ala* dalam Al-Qur'an, yang secara langsung memiliki korelasi dengan manusia sebagai contoh dalam Surat Al-Baqarah ayat 22, surat Al-An'am ayat 92, surat Al-Mulk ayat 15, juga penggunaan Istilah *Sakhoro* sebagamana contoh dalam surat Ar-Ro'd ayat 2, surat Al-Jatsiyah ayat 13 dan surat An-Nahl ayat 12. Serta masih banyak ayat lainnya. Untuk menentukan ayat secara komplit

silahkan bisa di lihat dalam kitab *Mu'jamul Mufahros li alfhadhil Qur'an* atau setidaknya bisa dilihat dalam kitab *Fathurrohman.*

Walhasil, dari penjelasan di atas, bahwa alam semesta ini merupakan makhluq Allah yang ditundukan (*Taskhir*) dan dijadikan (*Taj'il*) untuk manusia memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia memiliki kewajiban untuk mengurus dan memakmurkannya bukan untuk merusaknya. Sebagai makhluk Allah, manusia memiliki peran penting, yakni sebagai kholifatullah fil ardh, yakni sebagai mandataris Allah untuk mengurus dan mengatur serta meramaikan alam semesta ini.

Dalam pembahasan selanjutnya marilah kita simak tentang tanggungjawab manusia terhadap Alam dan lingkungan sebagai pengejewantahan dari status kholifatullah fil ardh.

3. Tanggungjawab Manusia Terhadap Alam

Manusia memiliki tanggungjawab yang sangat besar terhadap keberlangsungan alam semesta ini, karena manusia sudah di daulat untuk menjadi mandataris Allah di muka bumi. Untuk lebih jauh memahami status manusia sebagai mandataris Allah di muka bumi, marilah kita lihat Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةًۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "sesunguhnya Aku hendak menjadikan seorang Kholifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Ada beberapa *Key word* yang akan kita analisa dari ayat ini.

Pertama lafadz *Jaa'ilun.* Lafadz ini merupakan bentuk masdar dari *Fi'il madhi* (kata kerja lampau) lafadz *Ja-a-la* yang berarti *Shoyyaro* (menjadikan). Lafadz ini memiliki dua *maf'ul* (objek) yakni lafadz *Fil Ardhi* dan lafadz *khalifah* yang mana kedua lafadz ini adalah berupa *mubtada* dan *khobar.* Jadi posisi *Mubtada* dan *Khobar* ini menjadi objek dari lafadz *Jaa'ilun.* Selain itu, bisa juga lafadz *Jaa'ilun* ini bermakna *Kholaqo* (menciptakan) maka yang menjadi *maf'ul*nya adalah lafadz *Kholifah* sedangkan lafadz *Fil Ardhi* bergantung kepada lafadz *Kholifah.*[15] Dari pembahasan ini, maka bisa disimpulkan bahwa status manusia adalah *Kholifatullah Fil Ardh* dengan langsung dilantik oleh Allah, bukan dengan proses manusia.

Kedua. Lafadz *Fil Ardhi.* Istilah ini Menurut pendapat mayoritas ulama berarti seluruh jagat raya dari Timur sampai

15 Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani,* Bairut: Ihya Turats Aroby, tt, Vol 1, Hal. 220

Barat, namun ada pula yang berpendapat yang dimaksud *Al-Ardh* dalam ayat ini adalah tanah Mekah.[16]

Ketiga. Lafadz *Khalifah.* Lafadz ini mengikuti wazan *Fa'iilah* bermakna *Makhlufun* (yang diwakili) atau *Khaalifun* (yang mewakili).[17] Maka menurut Ar-Razy bahwa Khalifah adalah orang yang mewakili orang lain, dan menduduki posisi itu.[18] Oleh karena itu, mayoritas Ahli Tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan *Khalifah* adalah (1) Adam Alaihi salam, (2). Keturunan Adam Alaihi salam.[19] Adapun yang memahami *Khalifah* dalam arti kepemimpinan sebuah komunitas itu hanya terdapat dalam satu kitab Tafsir yakni *Al-Jamiu Ahkamil Qur'an* Imam Al-Qurthuby kemudian di ikuti oleh ulama kontemporer yakni Syakh Wahbah Az-Zuhaily dalam *Tafsiirul Munir* nya.[20]

Selanjutnya, yang paling penting adalah tentang tugas *Khalifah.* Dalam pandangan Imam Al-Baghowi bahwa pendapat yang sohih adalah bahwa manusia (keturunan Adam AS) adalah mandataris Allah atau wakil Allah atau Kholifatullah di muka bumi ini yang bertugas untuk menjalankan hukum Allah dan melaksanakan titah-titahnya.[21]

16 Muhammad Ar-Razi Fakhruddin, *Mafatihul Ghoib,* Bairut: Darul Fikr, 1981, Vol 2, Hal. 180

17 Al-Allamah As-Showi, *Hasyiyah Showi Alal Jalalain,* Indonesia: Al-Haramain, tt, Vol. 1, Hal. 39

18 Muhammad Ar-Razi Fakhruddin, *Mafatihul Ghoib,* Hal. 180

19 *Ibid,* Hal. 181

20 Untuk soal ini kita akan bahas dalam tema yang berbeda Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthuby, *Al-Jamiu Ahkamil Qur'an,* 2006, Bairut: Muassasah Ar-Risalah, Vol 1, Hal. 395-409; lihat pula Wahbah Az-Zuhaily, *At-Tafsiir Al-Muniir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj,* 2009, Damsyiq: Darul Fikr, Vol. 1, Hal. 140-141

21 Abi Muhammad Al-Husain Bin Mas'ud Al-Baghowy, *Ma'alimu Tanziil,*

Dengan bahasa yang lebih spesifik Al-Alusi mengungkapkan bahwa seluruh Nabi adalah *Khalifah* untuk memakmurkan bumi (*Imarotul Adrh*), mengurus manusia dan melaksanakan titah-titah Allah SWT.[22]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Khalifah* adalah seluruh manusia dan tugasnya adalah untuk memakmurkan bumi Allah ini dengan melaksanakan titah-titahnya. Hal ini senada dengan ayat lain, yakni Al-Qur'an Surat Hud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya: ...Allah telah menciptakan kamu dari Bumi dan Allah menjadikan kamu sebagai pemakmurnya.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia di ciptakan dari bumi, kemudian Allah menjadikan manusia sebagai pemakmur bumi. Bahkan bukan hanya Allah menjadikan manusia sebagai pemakmur bumi, tetapi Allah juga memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi. Karena lafadz Ista'maro masuk pada wazan Istaf'ala yang salah satu maknanya adalah Tholabul Fi'li (perintah atau permintaan untuk melakukan sesuatu). Kenapa? Karena manusia merupakan mandataris Allah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkannya, sebagaimana dalam surat Al-Baqoroh ayat 30 di atas. Dan Imam Showi dalam tafsirnya telah nyata merelasikan ayat ini dengan Al-Baqoroh ayat 30 di atas tadi.[23]

Riyadh: Daru Thaibiyyah, 1409 H, Vol 1, Hal. 79

22 Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani,* Hal. 220

23 Al-Allamah As-Showi, *Hasyiyah Showi Alal Jalalain,* Vol 2, Hal. 274

Bahkan Syakh Wahbah Az-Zuhaily secara tegas menerangkan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk memakmurkan bumi ini dengan cara pengembangan pertanian (*Az-Ziroah*), Industri (*Shona'ah*), Infrastruktur (*Al-Bina*) dan pertambangan (*Ta'din*). Karena bumi ini membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi untuk kemanfaatan manusia sedangkan manusia mampu untuk melakukan itu.[24]

Jika melakukan eksplorasi dan eksploitasi bumi untuk memanfaatan manusia adalah sebuah perintah dari Allah SWT kepada manusia. Maka dalam Ilmu *Ushul Fiqih* perintah itu disebut *Amar. Amar* adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu yang disampaikan dari atasan ke bawahan. Jika tidak ada yang membelokannya, maka perintah tersebut statusnya *Wujub.*[25] Sehingga bagi orang yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa dari Allah SWT.

Dalam rangka berelasi dengan alam dan lingkungan, Allah SWT bukan hanya memerintahkan manusia untuk memakmurkannya, tetapi juga memberikan larangan (*An-Nahy*) kepada manusia untuk berbuat kerusakan. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang berbicara tentang larangan berbuat kerusakan (*Al-Fasad*) di muka bumi. Seperti lanjutan surat Al-Baqoroh ayat 30 tadi, yang menjadi penyebab *complain* nya Malaikat kepada Allah tentang penciptaan Adam dan keturunannya karena jenis manusia ini akan senantiasa berbuat kerusakan (*yufsidu fiiha*) dan

24 Wahbah Az-Zuhaily, *At-Tafsiir Al-Muniir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj,* Vol 6, Hal. 416

25 Abi Ishaq Ibrahim Asyairazy, *Al-Luma' Fii Ushulil Fiqh,* Indonesia: Al-Haramain, tt, Hal 6 & 7

menumpahkan darah (*yasfiku dima*).

Menurut Ahli Tafsir diantaranya Syaikh Nawawi Al-Bantani, juga As-Showi dan yang lainnya. Manusia berbuat kerusakan karena yang menonjol adalah potensi Syahwatnya, sedangkan manusia menumpahkan darah karena yang menonjol adalah potensi *Qodhob* (amarah) nya. Padahal Allah memberikan potensi lain yakni potensi Akal kepada manusia untuk mengendalikan kedua potensi itu.[26] Bahkan menurut KH. Hamdun Ahmad, selain ketiga potensi itu, Allah juga menurunkan Agama agar manusia memiliki bimbingan eksternal. Agama berfungsi sebagai *Hand book* bagi akal untuk mengendalikan *Syahwiyyah* dan *Godhbiyyah.*

Ayat yang secara jelas menyebut larangan untuk berbuat fasad diantaranya QS. Al-A'rof ayat 56 dan surat Al-Arof ayat 85:

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَاۚ

Artinya: Janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menjadikannya baik.

Larangan di dalam ayat ini terdapat pada kalimat *Laa Tufsidu. Laa* yang ada dalam ayat itu adalah *Laa Nahyi* yang berarti larangan. Dalam Ushul Fiqih setiap ada larangan maka itu menunjukan makna Haram.[27]

Menurut Imam Roghib Al-Asfahany makna *Al-Fasad* secara bahasa diderivasi dari *Fasada-Yufsidu-Fasadan*

26 Al-Allamah As-Showi, *Hasyiyah Showi Alal Jalalain,* Vol 1, Hal. 40
27 Abi Ishaq Ibrahim Asyairazy, *Al-Luma' Fii Ushulil Fiqh,* Hal. 12

merupakan lawan dari lafadz *Sholah,* yang berarti keluarnya sesuatu dari kondisi yang seharusnya.[28] Maka di dalam surat Al-A'rof di atas, kata *Al-Fasad* ini di lawankan dengan kata *Al-Ishlah.*

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaily, makna *Al-Ishlah* ini umum, meliputi persoalan Aqidah, perilaku, etika, membangun masyarakat, peradaban, kebudayaan dan seluruh hal yang dapat mendorong kemajuan baik dalam aspek pertanian, industri dan perdagangan. Maka dari itu, menurut syaikh Wahbah, bahwa surat Al-A'rof ayat 85 ini merupakan larangan untuk berbuat kerusakan (*Al-Fasad*) baik dalam hal duniawi maupun ukhrowi.[29]

Walaupun sudah terdapat larangan, tetap saja tangan-tangan jahil manusia tidak bisa mengendalikan *Syahwatnya* sehingga menyebabkan kerusakan litosfer, biosfer dan atmosfer bumi. Sebagaimana dalam surat A-Rum ayat 41:

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ

Telah nyata kerusakan di daratan maupun di lautan karena ulah tangan manusia

Oleh karena itu, ulama mengerahkan segenap kemampuannya untuk memberi panduan kepada manusia agar berlaku *Islah* terhadap alam semesta ini. Sebagai contoh Imam Al-Ghozali membagi kitab *Ihya Ulumuddin* beliau

28 Roghib Al-Asbahany, *Ghoribi Mufrodatil Qur'an,*Damsyiq: Darul Qolam, cet 4, 2009, hal. 636

29 Wahbah Az-Zuhaily, *At-Tafsiir Al-Muniir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj,* Vol 4, Hal. 663

menjadi empat bagian. Jilid pertama tentang *Ubudiyah,* Jilid kedua tentang *Adat,* jilid ketiga tentang *Munjiyat* (hal yang bisa menyelamatkan manusia), dan jilid ke empat bicara tentang *Muhlikat* (hal yang bisa menghancurkan manusia). Ketika berbicara tentang *Al-Adat,* Imam Al-Ghozali menyebutkan banyak sekali adab-adab yang harus dilakukan oleh manusia, baik adab bergaul dengan orang lain, adab mencari rezeki bahkan sampai disebutkan kasab untuk mencari rizki itu dari mana saja, baik dari pertanian, industri pertambangan dan lain-lain.

Selain Al-Ghozali, ada Imam Al-Mawardi yang menulis kitab *Adabu dun'ya waddin*. Dalam tulisan beliau dinyatakan bahwa untuk melahirkan *Sholahu dun'ya* (kebaikan atau kestabilan) dan kemaslahatan hidup di alam dunia maka bisa dicapai dengan 2 Aspek, (1). Sistemnya (*Maa yantadzimu umuru juhlatiha*), (2). Individu atau personnya (*Halu kulli wahidin min Ahliha*).

Untuk mencapai sistem yang baik sekurang-kurangnya harus terpenuhi sekurang-kurangnya enam prinsip:

1. Agama yang ditaati (*Diinun Muttaba'*)
2. Pemerintahan yang berdaulat (*Sulthonun Qohirun*)
3. Keadilan yang menyeluruh (*Adlun Syamilun*)
4. Keamanan yang menyeluruh (*Amanun A'mun*)
5. Kesejahteraan yang berkelanjutan (Khosbun Daimun)
6. Memiliki cita-cita yang tinggi (*Amalun Faasihun*).

Adapun untuk mencapai individu-individu masyarakat yang baik maka harus terpenuhi tiga prinspi.

1. Jiwa yang taat (*An-Nafsu Al-Muthiah*)
2. Keharmonisan secara menyeluruh (*Al-Ulfah AL-Jaami'ah*)
3. Cukup secara material (*Al-Maadah al-Kafiyah*).[30]

Itulah sekelumit contoh dari para ulama ketika menyajikan arahan kepada umat manusia untuk mencari kemaslahatan hidup.

4. Simpulan Dan Penutup

Manusia telah di daulat sebagai *Khalifatullah fil Ardh* memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan meramaikan alam ini dengan berbagai cara yang bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Perintah Allah untuk melestarikan Alam ini juga disandingkan dengan larangan Allah agar manusia tidak berbuat kerusakan pan penghancuran di muka bumi ini.

Maka dari itu para ulama, memberikan rumusan fiqih agar terciptanya kehidupan yang baik di dunia, dan mendapatkan surganya Allah di akhirat kelak. Sejak awal perumusannya ilmu fiqih senantiasa memperhatikan kesesuaiannya dengan *Nash,* juga selalu berkesesuaian dengan keadaan, bahkan perubahan hukum pun senantiasa berkesesuaian dengan lokus waktu dan tempat.

Sebagai contoh dari mulai bab Toharoh sampai bab Siyasah dalam Fiqih, senantiasa menyesuaikan dengan *azminal wal amkinah.* Agar fiqih ini tetap membumi dalam

30 Abul Hasan Ali Al-Mawardi, *Adabu dun'ya waddin,* Indonesia: Al-Haramain, tt, Hal. 224-254

merespon persoalan umat. Wal hasil fiqih yang dirumuskan ulama merupakan fiqih yang ramah lingkungan.

Mungkin hanya ini sekelumit tentang kajian Alam dan lingkungan serta relasinya dengan tanggungjawab manusia terhadapnya yang disarikan dari pendapat-pendapat ulama yang mu'tabaroh. Mudah-mudahan ada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syafii Maarif. *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante: Islam Dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.

Asmiyati, R. (2019). Di Balik Teluk Balikpapan (Analisis Framing mengenai?

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kya*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Dastin, N. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan Kalimantan Timur.

Hardwinarto, S. (2002). Kajian Erosi Dan Sedimentasi Pada Das Teluk Balikpapan Kalimantan Timur.

Hartono, S. R. (2017). Bunga Rampai Kebaruan Hukum Perdata Dan Hukum Bisnis Indonesia. Semarang.

Hutasoit, W. L. (2019). Analisa Pemindahan Ibukota Negara. Dedikasi, 39(2), 108-128.

Ismail, Faisal. *Islam and Pancasila: Indonesia Politics 1945-1995*. Jakarta: alitbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2001.

Kasali, Rhenald. *Self Disruption: Bagaimana Perusahaan Keluar Dari Perangkat Masa Lalu Dan Mendisrupsi Dirinya Menjadi Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta Selatan: Mizan, 2018.

Kuntowijoyo. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*.

Yogyakarta: IRCiSoD., 2017.

Siraj, Said Aqil. *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 1997.

W, Ahmad. *Pratiknya, Anatomi Cendekiawan Muslim: Potret Indonesia*, n.d.

Kusumaatmadja, M. (1995). Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Bina Cipta.

Megantara, E. N., & Damayanti, K. (2003). Pengaruh Lalu Lintas Kapal Terhadap Perilaku Muncul Pesut (Orcaella Brevirostris) Di Sungai Mahakam Dan Teluk Balikpapan. Bionatura, 5(3).

Nahak, S. (2019). Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur. Ganaya: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2-2), 31-40.

Nurdiyani, N. Bentuk-bentuk Kekhawatiran Pegiat Lingkungan Hidup dalam Berita online atas Rencana Kepindahan Ibukota ke Kalimantan (Kajian Apraisal dalam Linguistik Sistemik Fungsional). In Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra *(SEMANTIKS)* (Vol. 1, pp. 427-435).

Pandit, I. G. S. (2019). Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2-2), 15-21.

Puspoayu, E. S., Hakim, A. R., & Bella, H. S. (2018). Tinjauan Yuridis Pertanggung jawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan. *Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM*, 25(3), 560-580.

Ramli, M., Santosa, E. B., & Hidayati, A. N. (2018). Adaptasi Masyarakat Bajo Terhadap Perubahan Lingkungan Di Teluk Balikpapan. Tataloka, 20(3), 233-249.

Sujana, I. N. (2019). Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibu Kota Negara. Ganaya: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2-2), 49-57.

Tahir, AMIRUDDIN, Bengen, D. G., & Susilo, S. B. (2002). Analisis kesesuaian lahan dan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan pesisir teluk Balikpapan. Jurnal Pesisir dan Lautan, 4(3), 1-16.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/09284821/4-alasanmengapa-ibu-kota-indonesia-harus-keluar-dari-pulau-jawa?page=all#page4 diakses pada tanggal 9 April 2022 pukul 21.00

Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh Kajian Fikih Siyasah. Ahmad Muhtadi Anshor. Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2013. Khoirul Anwar Afa. https://islamina.id/penjelasan-istilah-darul-islam-dan-dar-as-salam-yang-jarang-diketahui/. 10 Februari 2022.

Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam) Oleh:

Edi Gunawan.

Relasi Agama Dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam) Oleh: Edi Gunawan.2014.Jurnal al-hikmah. Vol XV No.2

Relasi dan reposisi agama dan negara (tatapan masa depan keberagamaan di indonesia). Sofyan Hadi. 2018. Ri'ayah Vol.03 No.01 Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia. Fatkhul Mubin.

Dinamika Perkembangan Politik Nahdatul Ulama Pasca Khittah Tahun 1984-1999. Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah , 1 (1) (2021), 8-17 Vol. 1, No. 1, Februari 2021.

Al-Allamah As-Showi, tt, Vol. 1 *Hasyiyah Showi Alal Jalalain,* Indonesia: Al-Haramain.

Al-Alusi, Syihabuddin As-Sayyid Mahmud, tt, Vol 1. *Ruhul Ma'ani,* Bairut: Ihya Turats Aroby Al-Ashbahany, Roghib, cet 4, 2009. *Ghoribi Mufrodatil Qur'an,* Damsyiq: Darul Qolam

Al-Baghowy, Abi Muhammad, 1409 H, Vol 1 *Ma'alimu Tanziil,* Riyadh: Daru Thaibiyyah Al-Ghozaly, Abu Hamid Bin Muhammad, 1990. *Jawahirul Qur'an,* Bairut: Darul Ihyail Ulum.

Al-Jurzany, Ali bin Muhammad As-Sayyid As-Syarif, tt *At-Ta'rifat,* Kairo: Darul Fadhilah.

Al-Qurthuby, Abi Abdillah Muhammad, 2006, Vol 1 *Al-Jamiu Ahkamil Qur'an,* Bairut: Muassasah Ar-Risalah Al-Mawardi, Abul Hasan Ali, tt *Adabu dun'ya waddin,*

Indonesia: Al-Haramain.

Ar-Raziy, Muhammad Fakhruddin, 1981, Vol 2

Mafatihul Ghoib, Bairut: Darul FikrAs-Syairazy, Abi Ishaq Ibrahim, tt*Al-Luma' Fii Ushulil Fiqh,* Indonesia: Al-Haramain Az-Zuhaily, Wahbah, 2009, Vol. 1, Vol VI

At-Tafsiir Al-Muniir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, Damsyiq: Darul Fikr Ibnu Mandzur, tt*Lisanul Arob,* Kairo: Darul Ma'arif.

Argenti, G. (2018). Civil Society, Shadow State, dan Local Strongmen dalam Kajian Politik Lokal. *Cosmogov, Departemen Ilmu Pemerintahan UNPAD*.

Hutasoit, W. L. (2018). Analisa Pemindahan Ibukota Negara. *Fisipol Universitas 17 Agustus 1945*.

Maftuchan, A., & dkk. (2021). Mengukur Indeks Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia. *Prakarsa*.

Malisan, J., & dkk. (2022). Kajian Pengembangan Pelabuhan dalam Mendukung Ibu Kota Baru Berdasarkan Konsep Smart City, Smart Mobility. *Kemenhub*.

Parwata, A. (2020). Potensi Dampak Lingkungan Khususnya di Teluk Balikpapan Terhadap Pembangunan dari Kebijakan Pemindahan Ibu Kota. *Maritim Indonesia*.

MENYEBARKAN ISLAM YANG DAMAI & TOLERAN
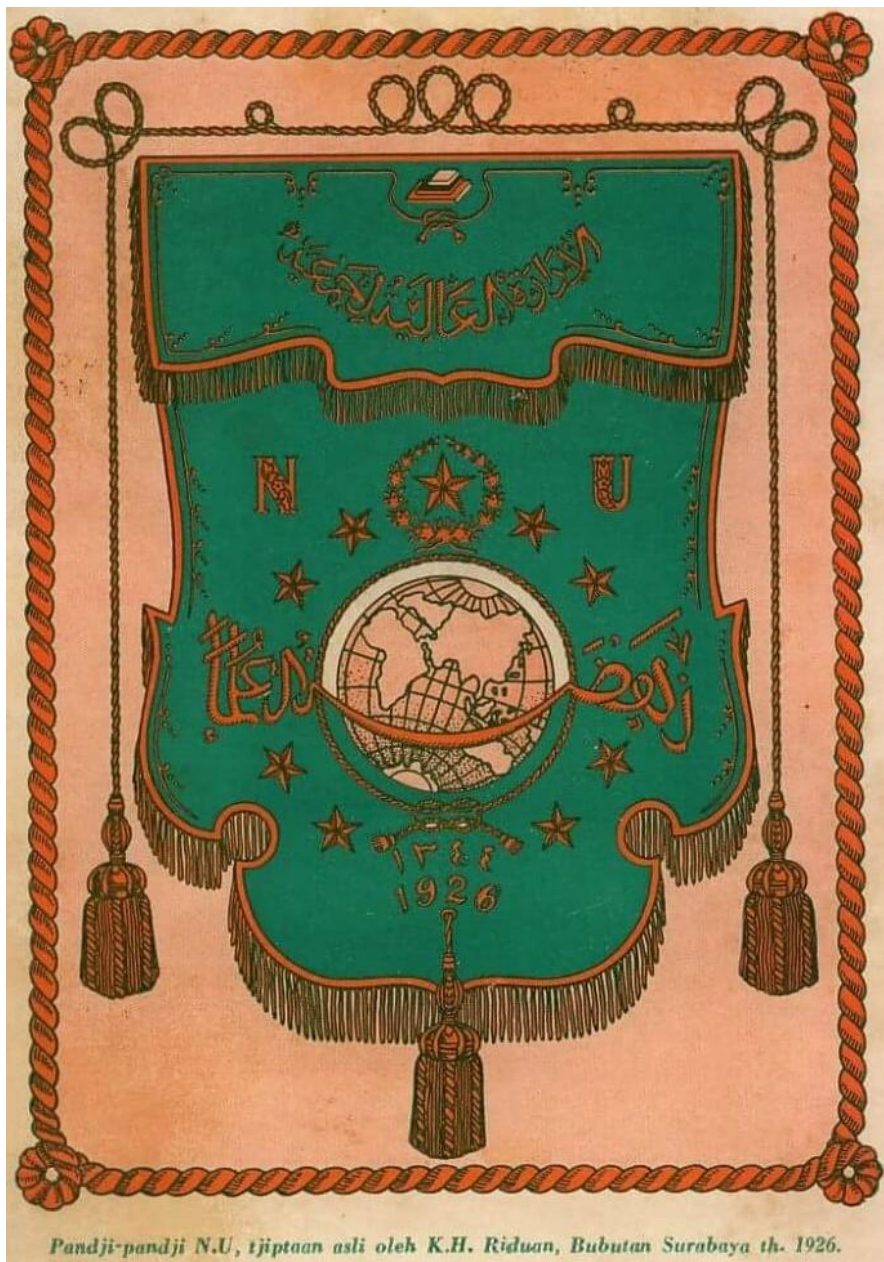
Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.